

**PENGARUH PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA
MASYARAKAT (PHBM) TERHADAP KELESTARIAN
KAWASAN HUTAN DAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DESA HUTAN
DI KABUPATEN NGAWI**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota

Oleh :

AGUS SUTOPO

L4D 003 074



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2005**

**PENGARUH PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA
MASYARAKAT (PHBM) TERHADAP KELESTARIAN
KAWASAN HUTAN DAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DESA HUTAN
DI KABUPATEN NGAWI**

Tesis diajukan kepada
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Oleh:

AGUS SUTOPO

L4D 003 074

UPT-PUSTAK-UNDIP	
No. Daft:	3728 / T / 2005
Tgl.	16 Juni 2005

Diajukan pada Sidang Ujian Tesis
Tanggal 28 Maret 2005

Dinyatakan Lulus
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Teknik

Semarang, 28 Maret 2005

Pembimbing Pendamping

Pembimbing Utama

Ir. Hadi Wahyono, MA

Prof. DR. Ir. Sugiono Soetomo, CES. DEA

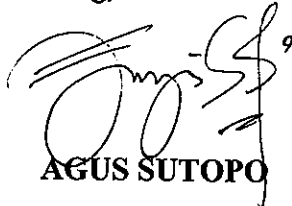
Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Prof. DR. Ir. Sugiono Soetomo, CES. DEA

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini dan diterbitkan dalam Daftar Pustaka

Semarang, 28 Maret 2005



AGUS SUTOPO

L4D 003 074

" BagiNya apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi.
Tidak ada yang memberi syafa'at disisiNya, melainkan dengan ijinNya.
Dia mengetahui apa-apa yang dihadapan mereka
dan apa-apa yang dibelakang mereka. Mereka tiada mengetahui sesuatu
pengetahuan, melainkan dengan kehendakNya.
KursiNya (IlmuNya/kerajaanNya) meliputi langit dan bumi,
dan tiada susah bagiNya memelihara keduanya.
Dia Maha Tinggi lagi Maha Besar"
(QS. AlBaqoroh: 255)

Karya ini kupersembahkan kepada:
Istriku Tercinta Siti Ulinni'amah, engkaulah inspirasiku,
engkaulah penyejukku,
Calon babyku yang masih di dalam kandungan,
anugrah tiada tara yang kumiliki, smoga engkau menjadi anak yang
sholeh/sholehah dan menjadi kebanggaan orang tua.
Kedua orang tuaku yang sejak dulu mendambakan aku bisa sekolah S2,
engkaulah penuntun hidupku.
Ibu mertua, Kakak Ipar dan semua saudaraku

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya atas rahmat dan petunjuk-Nyalah penulis dapat menyelesaikan Tesis ini, meskipun masih banyak yang harus disempurnakan. Penyusunan Tesis ini dalam rangka memenuhi persyaratan memperoleh gelar Magister Teknik (MT) pada Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota (MPPWK), Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Melalui kesempatan ini pula, penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Sugiono Soetomo, DEA selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Teknik Pembangunan Kota Universitas Diponegoro Semarang, dan sekaligus selaku Mentor yang telah memberikan bimbingan, masukan dan arahan dalam penulisan Tesis ini.
2. Bapak Ir. Hadi Wahyono, MA. selaku Co-Mentor yang telah memberikan bimbingan, masukan dan arahan dalam penulisan Tesis ini.
3. Semua Dosen yang telah memberikan banyak ilmu, dari awal sampai akhir perkuliahan, yang sangat bermanfaat dan akan menjadi bekal bagi pelaksanaan tugas dilapangan nanti.
4. Rekan-rekan MPPWK 3, yang telah banyak memberi dukungan dan motivasi selama masa perkuliahan dan penyelesaian Tesis ini. *Thanks for all you've done to me!*
5. Istriku tercinta Siti Ulini'amah, yang tak pernah kering dari untaian dan iringan do'a, semangat dan cinta tersuci, dan tak lupa calon buah hatiku.
6. Pihak-pihak lain yang tidak disebutkan satu-persatu.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna, namun demikian penulis berharap agar tulisan ini tetap bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, Maret 2005

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan dan Sasaran Studi	4
1.4 Ruang Lingkup	5
1.5 Kerangka Pemikiran	9
1.6 Pendekatan Studi dan Metode Penelitian	12
1.6.1 Kebutuhan Data	13
1.6.2 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	14
1.6.3 Teknik Penyajian Data	16
1.6.4 Teknik Sampling	17
1.6.5 Teknik Analisis	20
1.7 Sistematika Penulisan	30

BAB II TEORI PEMBANGUNAN KEHUTANAN DAN PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT

2.1	Pembangunan Kehutanan	
2.1.1	Pengelolaan Hutan	33
2.1.2	Pembangunan Kehutanan yang Berkesinambungan (Sustainable)	34
2.2	Pembangunan Kehutanan merupakan subsistem dari Pengembangan Wilayah	36
2.2.1	Pengembangan Wilayah	37
2.2.2	Pengembangan Ekonomi Lokal	39
2.3	Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat	
2.3.1	Latar Belakang Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat	42
2.3.2	Pengertian Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat	45
2.4	Kesejahteraan Masyarakat	47
2.2	Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat	49
2.3	Rangkuman Kajian Teori	52

BAB III KONDISI UMUM LOKASI PENELITIAN

3.1	Kondisi Geografis Wilayah	56
3.2	Potret Sektor Kehutanan di Kabupaten Ngawi	58
3.3	Jenis Kegiatan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat	62
3.4	Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Lokasi Penelitian	66
3.5	Ringkasan Gambaran Umum Lokasi Penelitian	68

BAB IV ANALISIS PENGARUH PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT TERHADAP KELESTARIAN KAWASAN HUTAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA HUTAN DI KABUPATEN NGAWI

4.1 Analisis korelasi antara Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat, Kelestarian kawasan Hutan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa hutan	71
4.2 Analisis pengaruh Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat terhadap Kelestarian kawasan Hutan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa hutan	82
4.3 Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat	99
4.4 Analisis Analisis Perbandingan antara Kodisi Program PHBM dengan Faktor-faktor yang mempengaruhinya	104
4.5 Arahan Pengembangan Komoditas Kehutanan	108
4.6 Aktifitas Ekonomi Keluarga Masyarakat Desa Hutan	115

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Temuan Studi	119
5.2 Kesimpulan	122
5.3 Rekomendasi	123

DAFTAR PUSTAKA	126
----------------------	-----

LAMPIRAN	128
----------------	-----

RIWAYAT HIDUP	153
---------------------	-----

DAFTAR TABEL

TABEL I.1	Data yang dibutuhkan	13
TABEL I.2	Jumlah Sampel per Desa	20
TABEL I.3	Pedoman untuk memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi	22
TABEL I.4	Tipologi Wilayah Keberhasilan	27
TABEL III.1	Jumlah Desa Hutan di Kabupaten Ngawi dan Luas Desanya	60
TABEL III.2	Kawasan Hutan Negara Kabupaten Ngawi Berdasarkan Fungsi Tahun 2001	61
TABEL III.3	Kondisi Hutan Negara Kabupaten Ngawi Tahun 2001	61
TABEL III.4	Jumlah Penduduk	66
TABEL III.5	Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	67
TABEL III.6	Jumlah Sarana Pendidikan	67
TABEL III.7	Jumlah Sarana Kesehatan	68
TABEL IV.1	Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi	71
TABEL IV.2	Persepsi Masyarakat terhadap PHBM, Kelestarian Hutan dan Kesejahteraan Masyarakat di KPH Ngawi	73
TABEL IV.3	Analisis Korelasi antara Program PHBM, Kelestarian Kawasan Hutan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Hutan di KPH Ngawi	74
TABEL IV.4	Persepsi Masyarakat terhadap PHBM, Kelestarian Hutan dan Kesejahteraan Masyarakat di KPH Saradan	76
TABEL IV.5	Analisis Korelasi antara Program PHBM, Kelestarian Kawasan Hutan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Hutan di KPH Saradan	77

TABEL IV.6	Persepsi Masyarakat terhadap PHBM, Kelestarian Hutan dan Kesejahteraan Masyarakat di KPH Lawu DS	79
TABEL IV.7	Analisis Korelasi antara Program PHBM, Kelestarian Kawasan Hutan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Hutan di KPH Lawu DS	80
TABEL IV.8	Hasil Perhitungan Korelasi	81
TABEL IV.9	Analisis Perubahan Lahan Non Produktif	84
TABEL IV.10	Analisis Perubahan Tingkat Pencurian Kayu	85
TABEL IV.11	Analisis Perubahan Tingkat Pendapatan	88
TABEL IV.12	Analisis Angka Melek Huruf	90
TABEL IV.13	Analisis Angka Usia Sekolah	91
TABEL IV.14	Analisis Perubahan Tingkat Pendidikan	93
TABEL IV.15	Analisis Perubahan Tingkat Harapan Hidup	94
TABEL IV.16	Keberhasilan Program PHBM di Kabupaten Ngawi	95
TABEL IV.17	Hasil Perhitungan <i>Chi Square</i> dari Faktor-faktor yang Mempengaruhi Program PHBM di KPH Ngawi	100
TABEL IV.18	Hasil Perhitungan <i>Chi Square</i> dari Faktor-faktor yang Mempengaruhi Program PHBM di KPH Saradan	101
TABEL IV.19	Hasil Perhitungan <i>Chi Square</i> dari Faktor-faktor yang Mempengaruhi Program PHBM di KPH Lawu Ds	102
TABEL IV.20	Analisis Perbandingan	104
TABEL IV.21	Komoditas Pertanian Kehutanan Program PHBM di Kabupaten Ngawi	108
TABEL IV.22	Pemasaran Komoditas Pertanian Kehutanan Program PHBM di Kabupaten Ngawi	109

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1	Peta Lokasi PHBM di Kabupaten Ngawi	8
GAMBAR 1.2	Kerangka Pemikiran	11
GAMBAR 2.1	Proses Manajemen	46
GAMBAR 3.1	Wilayah Kabupaten Ngawi berdasarkan ketinggian dari permukaan air laut	57
GAMBAR 3.2	Wilayah Kabupaten Ngawi berdasarkan peruntukannya	58
GAMBAR 3.3	Peta Sebaran Hutan di Kabupaten Ngawi	59
GAMBAR 3.4	Pola Plong-plongan di KPH Ngawi	63
GAMBAR 3.5	Pola Plong-plongan di KPH Saradan	64
GAMBAR 3.6	Pola Plong-plongan di KPH Lawu Ds	65
GAMBAR 4.1	Bagan Korelasi antara PHBM, kelestarian Kawasan Hutan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Hutan di Kabupaten Ngawi	82
GAMBAR 4.2	Peta Tipologi Wilayah Keberhasilan	98
GAMBAR 4.3	Bagan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Program PHBM pada masing-masing KPH di Kabupaten Ngawi	104
GAMBAR 4.4	Peta Keberhasilan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat	107
GAMBAR 4.5	Peta Distribusi Pemasaran Komoditas Pertanian Kehutanan	110
GAMBAR 4.6	Peta Arah Pengembangan Komoditas Kehutanan di Kabupaten Ngawi	114
GAMBAR 4.7	Bagan Sumber Pendapatan Keluarga	116

ABSTRAK

Pengelolaan kawasan hutan di Kabupaten Ngawi sampai saat ini belum banyak merubah kemiskinan di desa-desa sekitar hutan, padahal banyak desa-desa yang berada di sekitar kawasan hutan dan menggantungkan hidupnya di hutan. Dari 55.918,31 Ha (43%), tercatat ada 85 desa yang memiliki ketergantungan terhadap hutan. Pengelolaan hutan di Kabupaten Ngawi oleh Perhutani selama ini menunjukkan masih belum terdistribusinya kemakmuran ke seluruh pihak, dimana masyarakat khususnya yang bertempat tinggal di sekitar hutan tidak ikut serta menikmati keuntungan dari keberadaan hutan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi bersama dengan Perhutani mulai tahun 2001 melaksanakan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan, yang dilaksanakan pada 9 (sembilan) desa yang berada pada 3 (tiga) Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH), Program tersebut mempunyai dua tujuan utama yaitu menjaga kelestarian hutan dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa hutan. Didalam pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat yang sudah berjalan 3 (tiga) tahun tentunya harus tetap mengacu pada tujuan yang telah ditentukan yaitu menjaga kelestarian hutan dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa hutan. Namun sampai saat ini keberhasilannya belum diketahui.

Oleh karena itu studi ini akan mengkaji pengaruh Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat terhadap kelestarian kawasan hutan dan kesejahteraan masyarakat desa hutan di Kabupaten Ngawi. Untuk mengetahui pengaruh program tersebut dilakukan dengan; Analisis korelasi, analisis ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antar variabel yaitu PHBM, kelestarian kawasan hutan dan kesejahteraan masyarakat desa hutan. Analisis kondisi, analisis ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari pelaksanaan program PHBM terhadap kelestarian kawasan hutan dan kesejahteraan masyarakat desa hutan. Analisis faktor yang mempengaruhi, analisis ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program PHBM. Dan dilanjutkan dengan menentukan arah pengembangan komoditas kehutanan

Dari hasil analisis korelasi diketahui bahwa program PHBM mempunyai pengaruh terhadap kelestarian kawasan hutan dan kesejahteraan masyarakat desa hutan. Dan dari analisis kondisi ditemukan bahwa pelaksanaan program PHBM di Kabupaten Ngawi bisa dikategorikan sedang (cukup berhasil). Sedangkan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program PHBM yang diperoleh dari hasil analisis faktor adalah faktor metoda, sumberdaya manusia dan kedekatan lokasi, faktor tersebut sangat berperan dalam keberhasilan program PHBM. Sedangkan arah pengembangan kehutanan di Kabupaten Ngawi adalah dengan pengembangan agroindustri yang berbasis komoditas hasil pertanian kehutanan, dengan cara membagi peran kepada masing-masing Kesatuan Pemangkuan Hutan

Dari hasil penelitian dirumuskan rekomendasi bahwa penanganan program PHBM dengan mengoptimalkan indikator yang belum berhasil yaitu pendidikan dan harapan hidup masyarakat yang belum meningkat. Mengoptimalkan peran faktor peralatan dan pembiayaan, yang didalam pelaksanaannya belum memberikan pengaruh yang maksimal. Dan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat direkomendasikan arah pengembangan kehutanan yang dibagi kedalam tiga pengembangan Kesatuan Pemangkuan Hutan

Kata Kunci: Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat, Kestarian Kawasan Hutan, Kesejahteraan Masyarakat Desa Hutan.

ABSTRACT

Nowadays processing forest region in Ngawi can not change poverty for villages around it, whereas there are so many villages over their, and they life depend on it forest. From 55.918,31 Hectare (43%) were noted 85 villages which life dependence of the forestry. The processing of forest in Ngawi by forestry department showed can not be distributed to be area which shares in prosperity, mostly for the people who live around the forest can not enjoy profit of forest.

Local Government Ngawi and Forestry Department have been holding processing of Forest Program With Society (PHBM) since 2001 with involve society around forest, which was heed on 9 villages on 3 union around forest management (KPH). This program has two purpose they are, to keep conservation forest and increase prosperity of forest villagers. In realizing this Programs of Forest Processing With Society which has been running for three years must point for the main purpose they are to keep the forest conservation and increase prosperity of forest society. But until this time the fruit of the program not been known yet.

Therefore this study will examine or study about the effect of processing forest programs with society for forest conservation area and the prosperity of forest society in Ngawi Regent. To know the effect of this program is done with: Correlation Analyze, it is done to know correlate among variables they are PHBM, conservation of forest area and prosperity of forest society. Condition Analyze, it is done to know effect from realizing PHBM program for conservation of forest area and prosperity of forest society. Analyze factor which influence, it is done to know factor which influence realized this program of PHBM. And to decide point of developing forestry region.

From the result of analyzed correlation was known that PHBM program has effect to conservation forest region and prosperity of forest society. From analyzed condition was found that realizing this PHBM program in Ngawi can be classified middle (success enough) and the factors which influent realizing of PHBM program, that it got from analyzed factors are methods factor human recourses and the closing location, these factor have important rule the successful of PHBM program. While the direction of developing forestry region in Ngawi is agro industry developing which based on farming commodities, forestry with dividing duty for their unity of forest management (KPH).

From result of research can be formulated by recommendation that PHBM program handling by is optimal of indicator which not yet succeeded that is society a spark of life and education which not yet mounted is. Optimal role of equipments factor and defrayal, which in its execution not yet given maximal influence. And to be more improve prosperity of society recommended by divided forestry development direction into three development Unity of Forest Management(KPH).

Keyword: Society Forest Management Programs, Forest area conservations, Prosperity of forest villages society.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan kawasan hutan di Kabupaten Ngawi sampai saat ini belum banyak merubah kemiskinan di desa-desa sekitar hutan, padahal banyak desa-desa yang berada di sekitar kawasan hutan dan menggantungkan hidupnya di hutan. Dari 55.918,31 Ha (43%), tercatat ada 85 desa yang memiliki ketergantungan terhadap hutan. Pengelolaan hutan di Kabupaten Ngawi oleh Perhutani selama ini menunjukkan masih belum terdistribusinya kemakmuran ke seluruh pihak, dimana masyarakat khususnya yang bertempat tinggal di sekitar hutan tidak ikut serta menikmati keuntungan dari keberadaan hutan.

Perubahan paradigma pembangunan kehutanan cukup lambat, dan tidak mampu mengantisipasi masalah-masalah yang berakar dari problem sosial ekonomi masyarakat. Beberapa tahun belakangan ini, terutama setelah pergantian pemerintahan Orde Baru, kondisi hutan di Kabupaten Ngawi semakin mengkhawatirkan, baik karena faktor alam karena kebakaran hutan, maupun penjarahan hutan (*illegal logging*). Keadaan ini mengakibatkan terjadinya degradasi hutan dan lingkungan, dan timbulnya banjir di mana-mana.

Seiring dengan era otonomi daerah, sesuai implementasi UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004, pemerintah daerah Kabupaten Ngawi harus dilibatkan di dalam pengelolaan hutan. Di sisi lain untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, salah satu cara yang harus

dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah dan Perhutani adalah melibatkan secara aktif masyarakat yang tinggal di sekitar hutan di dalam pengelolaan hutan. Paradigma pembangunan kehutanan harus didasarkan pada jiwa otonomi daerah, yaitu demokrasi, transparansi dan berorientasi pada kehutanan sosial yang mengakomodasi aspirasi dari masyarakat lokal.

Didalam pengelolaan hutan di Pulau Jawa, mulai tahun 2001, Perhutani mengeluarkan Surat Keputusan No.136/Dir/2001, tentang program pengelolaan hutan dengan melibatkan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan yaitu dengan program pemberdayaan masyarakat sekitar hutan yang berbasis pertanian atau disebut *Agroforestry*. Program tersebut bernama Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang mempunyai dua tujuan utama yaitu menjaga kelestarian hutan dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa hutan

Didalam pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat yang sudah berjalan tiga tahun secara umum telah banyak menuai pujian karena telah dirasakan hasilnya oleh masyarakat desa hutan maupun Perhutani. Namun keberhasilan program tersebut harus tetap mengacu pada tujuan yang telah ditentukan yaitu menjaga kelestarian hutan dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa hutan. Keduanya harus memiliki tingkat keberhasilan yang sama karena kedua tujuan tersebut saling mempengaruhi satu sama lainnya. Dikatakan berhasil apabila kedua tujuan tercapai, apabila salah satu atau keduanya tidak tercapai, maka program tersebut tidak berhasil.

Pelaksanaan program PHBM di Kabupaten Ngawi mendapat perhatian yang besar oleh Pemerintah Daerah. Untuk keberhasilan program tersebut Pemerintah Daerah melakukan program pendampingan. Upaya tersebut menuai banyak pujian dari berbagai pihak baik akademisi maupun praktisi bidang kehutanan. Belakangan ini Bupati Ngawi sering diminta untuk menjadi nara sumber dalam berbagai acara seminar dan dialog tentang kehutanan. Namun pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di Kabupaten Ngawi belum diadakan studi evaluasi yang komprehensif. Untuk itu studi ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat terhadap kelestarian kawasan hutan dan kesejahteraan masyarakat desa hutan.

1.2 Perumusan Masalah

Penyebab terjadinya kerusakan hutan di Kabupaten Ngawi tersebut, sebagaimana kerusakan hutan di Jawa pada umumnya, dapat dibedakan antara faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal berkaitan dengan pertambahan penduduk yang tidak diimbangi dengan perluasan lapangan pekerjaan yang sepadan, sehingga mengakibatkan tidak terserapnya ledakan tenaga kerja oleh lapangan kerja yang tersedia. Kondisi ini diperparah dengan ambruknya perekonomian karena imbas krisis ekonomi pada tahun 1997-an, dan lemahnya penegakan hukum.

Sedangkan faktor internal di Perhutani adalah sistem pengelolaan yang tidak komprehensif. Seiring dengan perkembangan waktu dan semakin kompleksnya permasalahan sosial ekonomi masyarakat, program PHBM yang

diterapkan diharapkan mampu menjaga kelestarian dan mengangkat harkat hidup serta kesejahteraan masyarakat desa sekitar hutan di Kabupaten Ngawi. Kegiatan-kegiatan produksi yang dilaksanakan diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah dan pendapatan masyarakat.

Dari uraian tersebut dapat dirumuskan beberapa permasalahan berkaitan dengan Prongam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Kabupaten Ngawi yaitu:

1. Belum jelasnya pengaruh program ini terhadap kelestarian hutan karena selama ini kegiatan pencurian kayu dan pengrusakan hutan baik yang dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan maupun orang luar merupakan penyebab utama menurunnya kelestarian hutan
2. Belum jelasnya pengaruh program ini terhadap kesejahteraan masyarakat desa hutan, dimana sebagian besar masyarakat desa hutan merupakan penduduk miskin dan terisolasi.

Dari rumusan masalah tersebut dapat dibuat *Research Question*
Bagaimanakah pengaruh Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) terhadap kelestarian kawasan hutan dan kesejahteraan masyarakat desa sekitar hutan di Kabupaten Ngawi

1.3 Tujuan dan Sasaran Studi

1.3.1 Tujuan Studi

Tujuan studi ini adalah untuk mengkaji pengaruh Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat terhadap kelestarian kawasan hutan dan kesejahteraan masyarakat desa hutan di Kabupaten Ngawi.

1.3.2 Sasaran Studi

Dari tujuan studi tersebut maka diturunkan sasaran studi ini sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi latar belakang, maksud dan tujuan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat.
2. Mengkaji hubungan antara program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat, kelestarian kawasan hutan dan kesejahteraan masyarakat desa hutan
3. Mengkaji pengaruh Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat terhadap kelestarian kawasan hutan dan kesejahteraan masyarakat desa hutan
4. Mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di Kabupaten Ngawi
5. Mengkaji tingkat keberhasilan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di Kabupaten Ngawi

1.4 Ruang Lingkup Studi

1.4.1 Ruang Lingkup Substansial

1. Mengkaji hubungan antara variabel independen (PHBM) dengan variabel dependen (kelestarian kawasan hutan dan kesejahteraan masyarakat desa hutan, dengan analisis korelasi
2. Mengkaji pengaruh Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat terhadap kelestarian kawasan hutan berdasarkan perubahan lahan non produktif dan perubahan tingkat pencurian kayu

3. Mengkaji pengaruh Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat desa hutan dengan parameter perubahan tingkat pendapatan, tingkat pendidikan dan tingkat harapan hidup masyarakat desa hutan
4. Mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di Kabupaten Ngawi dengan analisis *chi square*
5. Membandingkan pengaruh program PHBM dengan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program PHBM, dilakukan dengan tabulasi silang hasil dari analisis kondisi dengan hasil analisis faktor
6. Merumuskan arah pengembangan kehutanan dikaitkan dengan potensi-potensi lokal
7. Merumuskan rekomendasi yang dapat dijadikan masukan bagi Perhutani dan Pemerintah Daerah dalam mengambil kebijakan

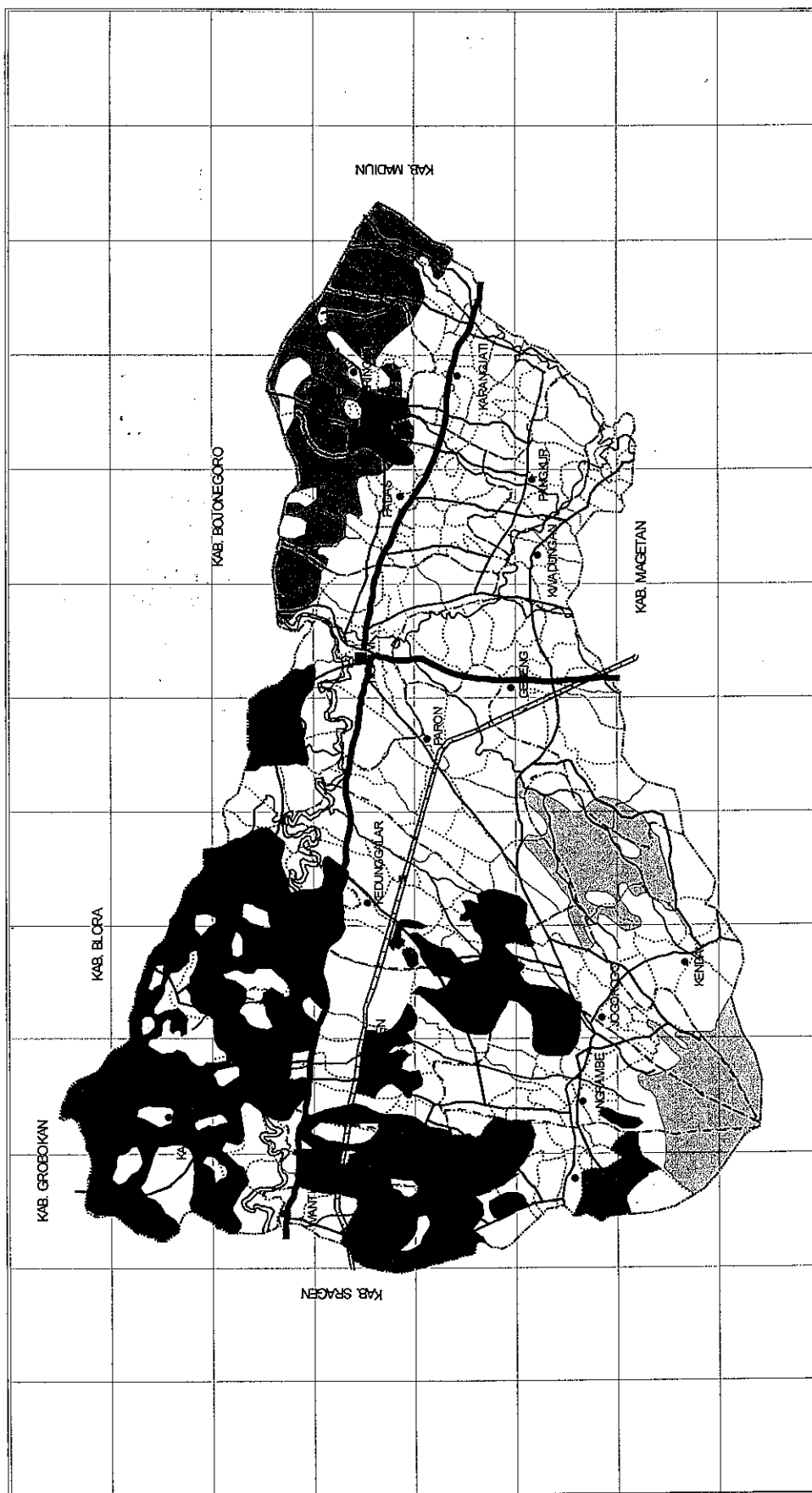
1.4.2 Ruang Lingkup Spasial

Lokasi studi penelitian ini adalah kawasan hutan di Kabupaten Ngawi dan masyarakat desa yang berada di sekitar hutan. Luas kawasan hutan Kabupaten Ngawi sebanyak 55.918,31 Ha (43%), terdiri dari kawasan hutan negara seluas 45.428,6 Ha (35%) dan kawasan hutan rakyat seluas 10.489,71 Ha (8%), namun yang akan menjadi objek penelitian ini adalah kawasan hutan negara saja. Dari luas kawasan hutan negara seluas 45.428,6 ha, terdiri atas kawasan hutan di wilayah KPH Ngawi seluas 34.921,3 Ha, KPH Saradan seluas 5.198,9 Ha dan KPH Lawu DS seluas 5.308,4 Ha. Sedangkan jumlah desa-desa yang berada di

sekitar hutan Kabupaten Ngawi adalah 85 desa, namun studi ini akan mengambil lokasi di desa-desa yang telah dicanangkan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat yaitu di 9 desa pada 3 kecamatan yang termasuk dalam wilayah 3 KPH, diantaranya :

- a. KPH Ngawi :
 - Desa Tambakboyo Kecamatan Mantingan
 - Desa Sambirejo Kecamatan Mantingan
 - Desa Pakah Kecamatan Mantingan
 - Desa Jagir Kecamatan Sine
- b. KPH Saradan :
 - Desa Dero Kecamatan Bringin
 - Desa Krompol Kecamatan Eringin
- c. KPH Lawu Ds :
 - Desa Pandansari Kecamatan Sine
 - Desa Girikerto Kecamatan Sine
 - Desa Pocol Kecamatan Sine

Untuk lebih jelasnya mengenai letak dan posisi desa yang telah dicanangkan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut:



MAGISTER PERENCANAAN
PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG 2005

HALAMAN : 8

GAMBAR 1.1
PETA LOKASI PROGRAM
PENGLOLAAN HUTAN BERSAMA
MASYARAKAT (PHBM)
DI KABUPATEN NGAWI

SUMBER : PT. PERUTANI KAB. NGAWI, 2005

LEGENDA:

- HIRARKI KOTA
- KPH NGAWI
- KPH SARADAN
- KPH LAWU DS
- LOKASI PHBM
- BATAS DESA
- JALAN NEGARA
- JALAN KABUPATEN
- JALUR KERETA API
- SUNGAI

SKALA : 1 : 300.000

0 3 6 9

HALAMAN : 8

1.5 Kerangka Pemikiran

Studi ini dilatarbelakangi oleh suatu kondisi saling ketergantungan antara hutan dengan masyarakat sekitar. Disatu sisi kesejahteraan masyarakat sekitar hutan yang rendah, kondisi yang terpencil, di sisi lain pencurian kayu yang merajalela hingga mengakibatkan penggundulan hutan, sehingga berdampak pada kerawanan bencana alam. Namun ironisnya masyarakat sekitar yang paling merasakan dampak kerusakan hutan tidak berusaha melindunginya, rendahnya rasa memiliki (*sence of belonging*).

Untuk menanggulangi permasalahan yang kompleks tersebut PT. Perhutani dan Pemerintah Daerah menerapkan pola pemberdayaan masyarakat hutan yaitu Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dengan tujuan antara lain :

1. Menjaga kelestarian kawasan hutan
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa hutan

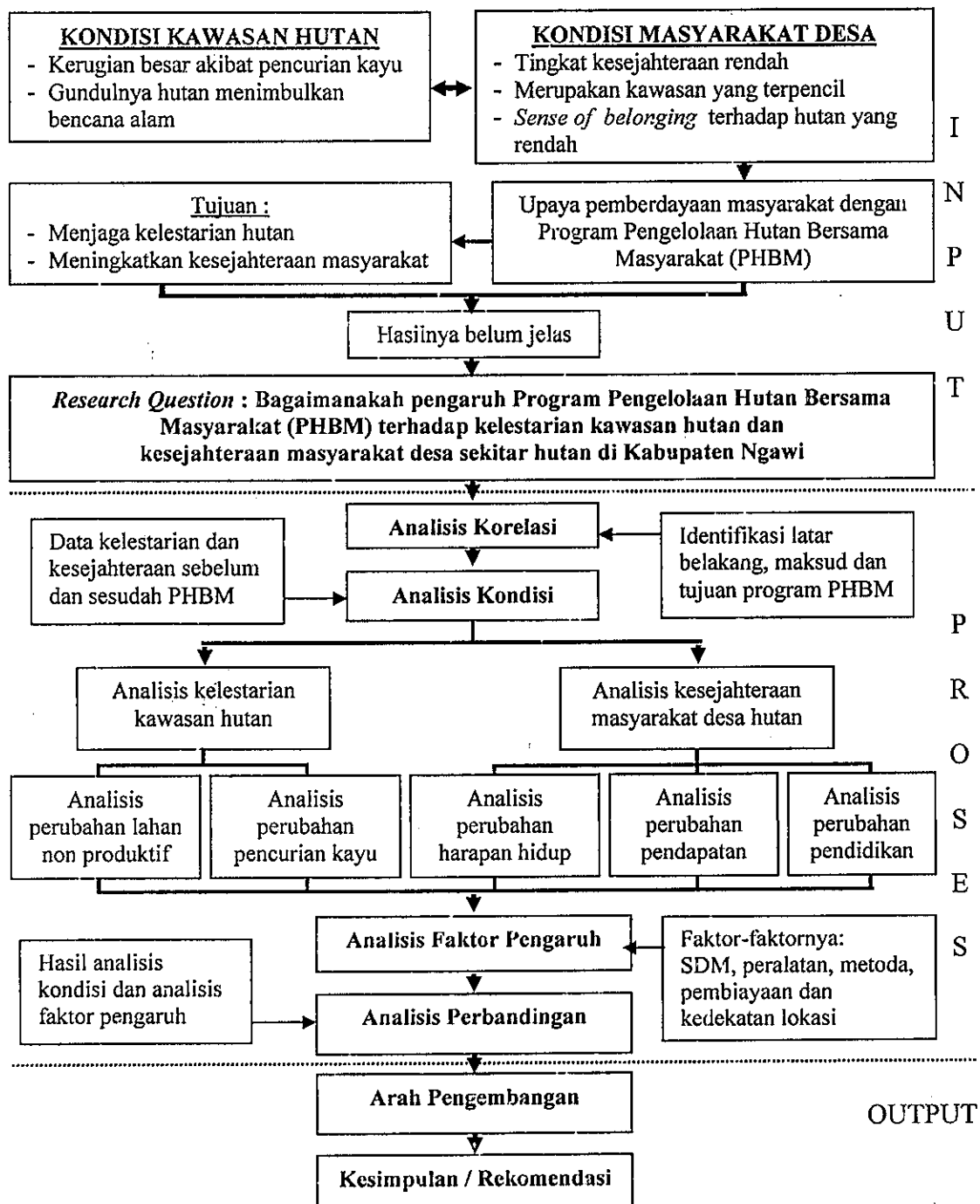
Namun program tersebut belum jelas pengaruhnya terhadap kelestarian kawasan hutan dan kesejahteraan masyarakat desa hutan. Untuk mengetahui pengaruh tersebut dilakukan dengan beberapa analisis yaitu :

1. Analisis korelasi, dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel Program PHBM dengan variabel kelestarian kawasan hutan dan kesejahteraan masyarakat desa hutan
2. Analisis kondisi pengaruh PHBM terhadap kelestarian kawasan hutan dan kesejahteraan masyarakat desa hutan. Untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kelestarian kawasan hutan dilakukan dengan menganalisa perubahan lahan

non produktif dan perubahan tingkat pencurian kayu sebelum dan sesudah program. Kemudian untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat desa hutan dilakukan dengan menganalisa perubahan tingkat pendapatan, pendidikan dan harapan hidup sebelum dan sesudah program.

3. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program, dilakukan dengan mengkaji seberapa kuat pengaruh faktor sumberdaya manusia, peralatan, metoda, pembiayaan dan kedekatan lokasi terhadap keberhasilan program PHBM pada masing-masing Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH)
4. Analisis perbandingan antara pengaruh program PHBM dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
5. Dari temuan-temuan tersebut dirumuskan rekomendasi untuk bahan masukan bagi penentu kebijakan, terkait dengan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di Kabupaten Ngawi

Urutan kerangka pikir di atas telah dituangkan kedalam bagan kerangka pikir yang dapat dilihat pada Gambar 1.2 berikut ini :



GAMBAR I.2
KERANGKA PEMIKIRAN

1.6 Pendekatan Studi dan Metode Penelitian

Pendekatan studi yang digunakan dalam penelitian ini adalah gabungan antar pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif, sesuai dengan tujuan dan sasaran studi yang ingin dicapai. Pendekatan kuantitatif karena penelitian yang dilakukan berkaitan dengan data-data angka yang tersusun dalam data statistik. Sedangkan pendekatan kualitatif dilakukan untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif karena keterbatasan data yang ada.

Metoda penelitian merupakan suatu sistem untuk memecahkan suatu persoalan yang terdapat di dalam suatu kegiatan penelitian. Menurut Nazir (1988), metoda penelitian merupakan satu kesatuan sistem dalam penelitian yang terdiri dari prosedur dan teknik yang perlu dilakukan dalam suatu penelitian. Prosedur memberikan kepada peneliti urutan pekerjaan yang harus dilakukan dalam suatu penelitian, sedangkan teknik penelitian memberikan alat-alat ukur apa yang diperlukan dalam melaksanakan suatu penelitian.

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan, maka metoda penelitian yang dipakai adalah penggabungan antara metoda penelitian kualitatif dan metoda penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif merupakan cara untuk memahami fenomena sosial, berupa serangkaian kegiatan atau upaya menjangkau informasi secara mendalam dari permasalahan yang ada dalam kehidupan suatu objek, dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun empiris. Sedangkan metoda penelitian kuantitatif berupa data lahan

hutan yang non produktif dan data pencurian kayu hutan yang diperoleh dari instansi terkait.

1.6.1 Kebutuhan Data

Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer dibutuhkan untuk menganalisa persepsi masyarakat terhadap Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat dan pengaruhnya terhadap kelestarian kawasan hutan dan kesejahteraan masyarakat desa hutan yang tidak dapat dipenuhi melalui data sekunder. Sedangkan data sekunder diperoleh untuk mendukung analisis yang berkaitan dengan kelestarian kawasan hutan dan kesejahteraan masyarakat desa hutan. Adapun kebutuhan data dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL I.1
DATA YANG DIBUTUHKAN

No	Kebutuhan Data	Jenis Data	Sumber	Ket.
I.	Data Primer			
1.	Persepsi masyarakat terhadap program PHBM, kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat	Primer/informasi langsung	Masyarakat	Penyebaran Kuesioner
2.	Perubahan pendapatam masyarakat sebelum dan sesudah PHBM	Primer/informasi langsung	Masyarakat	Penyebaran Kuesioner
3.	Tingkat pendidikan masyarakat	Primer/informasi langsung	Masyarakat	Penyebaran Kuesioner
4.	Tingkat harapan hidup masyarakat	Primer/informasi langsung	Masyarakat	Penyebaran Kuesioner
II.	Data Sekunder			
5.	Perubahan pemanfaatan lahan hutan non produktif di Kabupaten Ngawi	Data Time Series Th 2000 - 2003	Perhutani.	Dokumen
6.	Pencurian kayu di hutan Kabupaten Ngawi	Data Time Series Th 2000 - 2003	Polres, perhutani	Dokumen

Sumber: Hasil Analisis, 2005

1.6.2 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Dalam upaya mengumpulkan data yang relevan dengan obyek studi, maka teknik yang digunakan adalah :

1. Wawancara; teknik ini dilakukan untuk mengetahui persepsi masyarakat desa hutan terhadap pelaksanaan program PHBM
2. Observasi; suatu teknik pengumpulan data dimana penulis secara langsung terjun ke lokasi penelitian untuk mengamati secara langsung obyek yang hendak diteliti. Metode observasi digunakan untuk mengidentifikasi berbagai fenomena karakteristik objek penelitian guna memperdalam fakta yang mungkin belum terdata.
3. Kuesioner; suatu teknik pengumpulan data dimana para responden diberikan seperangkat daftar pertanyaan untuk dijawab. Dalam daftar pertanyaan tersebut responden diminta untuk memilih salah satu dari alternatif jawaban yang telah tersedia bila pertanyaannya tertutup, dan membuat alternatif jawaban sendiri bila pertanyaan terbuka. Penyebaran kuesioner didasarkan pada jumlah sampel yang telah dipilih.
4. Dokumentasi; suatu teknik pengumpulan data dengan jalan mengutip kembali data-data yang diperlukan. Dokumentasi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data-data deskriptif objek penelitian.

Dalam studi ini data primer diperoleh dari kuesioner dan observasi (pengamatan). Penggunaan metode kuisisioner dimaksudkan untuk menghimpun informasi atau keterangan mengenai hal-hal yang diketahui responden menurut

apa yang ia alami atau ia ketahui. Sedangkan observasi yang dilakukan adalah observasi langsung, yaitu cara pengumpulan data berdasarkan pengamatan yang menggunakan mata atau telinga secara langsung tanpa melalui alat bantu yang terstandar (Subana dan Sudrajad, 2001).

Kemudian untuk mendapatkan data sekunder digunakan teknik dokumentasi, yaitu suatu teknik untuk mendapatkan data dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan mencatat dokumen-dokumen yang ada mengenai perencanaan, peraturan, dan lain sebagainya berkaitan dengan masalah yang diteliti sebagai bahan analisis.

Sedangkan untuk mengolah data yang telah diperoleh, digunakan teknik pengolahan sebagai berikut :

1. Data-data yang tersaji dalam bentuk angka dan dapat terukur (data kuantitatif) diolah melalui :
 - Perhitungan matematika sederhana, yaitu mengelola data dengan berbagai perhitungan statistik sederhana. Misalnya : jumlah, selisih dan prosentase data.
 - Perhitungan matematika tertentu, yaitu mengelola data dengan menggunakan perhitungan statistik yang telah ditentukan rumus dan kebutuhan datanya oleh para pakar. Misalnya : menghitung *Human Development Index* (HDI).
 - Perhitungan matematika lainnya yang diperlukan, terutama kuantifikasi terhadap data kualitatif agar dapat dikelola secara numerik, dengan membuat skala, skoring dan pembobotan tertentu sesuai kebutuhan.

2. Data-data kualitatif (non numerik)., diolah melalui :

- metode deskriptif yaitu memberi gambaran penjelasan serta pengertian tentang keadaan atau berbagai fenomena yang ada di wilayah studi dengan sejelas mungkin.
- metode asumptif yaitu analisis dengan menggunakan asumsi-asumsi tertentu yang dibuat dengan berdasarkan pada kondisi tertentu dan diperkirakan kondisi tersebut terjadi dalam kurun waktu yang cukup dapat mewakili studi yang diamati.
- metode komparatif yaitu membandingkan dua data atau lebih untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan yang dimiliki masing-masing, sehingga memungkinkan pemilihan dan penggunaan data yang akurat guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan.

1.6.3 Teknik Penyajian Data

Teknik penyajian data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Data naratif, menyajikan data ke dalam bentuk narasi dalam sebuah paragraf atau alinea, digunakan untuk menyajikan data-data kualitatif.
2. Data tabel, menyajikan data-data baik data numerik maupun data non numerik ke dalam bentuk baris dan kolom.
3. Data diagram, menyajikan data-data numerik ke dalam bentuk diagram agar mudah dipahami oleh pembaca, meliputi diagram batang, diagram pie dan grafik.
4. Data peta, menyajikan data-data yang dituangkan dalam perspektif spatial dengan menggambarannya dalam bentuk Peta-peta.

1.6.4 Teknik Sampling

1. Populasi

Populasi dalam studi ini adalah masyarakat desa hutan yang telah dijadikan lokasi Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat. Pelaksanaan PHBM di Kabupaten Ngawi mengambil lokasi di 9 desa pada 3 kecamatan yang termasuk dalam wilayah 3 KPH, yaitu :

a. KPH Ngawi

- Desa Tambakboyo Kecamatan Mantingan
- Desa Sambirejo Kecamatan Mantingan
- Desa Pakah Kecamatan Mantingan
- Desa Jagir Kecamatan Sine

c. KPH Saradan

- Desa Dero Kecamatan Bringin
- Desa Krompol Kecamatan Bringin

c. KPH Lawu Ds

- Desa Pandansari Kecamatan Sine
- Desa Girikerto Kecamatan Sine
- Desa Pocol Kecamatan Sine

2. Jumlah Sampel

Karena keterbatasan waktu dan biaya pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan :

- ##### a. Menentukan lokasi desa penelitian yang dilakukan secara *cluster sampling* (sampling daerah). Teknik ini digunakan untuk menentukan sampel bila

objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas, (Sugiono, 2004).

Untuk menentukan desa penelitian dengan kriteria :

- Mewakili masing-masing KPH
- Termasuk desa prasejahtera (miskin)
- Tidak tersedianya lapangan kerja yang cukup memadai sehingga banyak terdapat pengangguran
- Mempunyai tradisi turun terurun mengenai kegiatan pencurian kayu
- Banyak dijumpai areal hutan yang kurang produktif disekitar desa tersebut

Berdasarkan kriteria tersebut terdapat 3 desa yang dijadikan lokasi penelitian:

- Desa Sambirejo Kecamatan Mantingan
- Desa Krompol Kecamatan Bringin
- Desa Pandansari Kecamatan Sine

- b. Menentukan jumlah Rumah Tangga (KK) yang akan dijadikan objek penelitian ini.. Jumlah rumah tangga yang menjadi obyek dalam studi ini adalah 2.806 KK.

Untuk menentukan besarnya ukuran sampel digunakan rumus kekeliruan untuk pendekatan proporsi populasi dengan asumsi populasi tidak terbatas atau besar, yaitu:

$$n = \frac{Z^2 \cdot p (1 - p)}{J^2}$$

n = Ukuran populasi

p = Perbandingan antara subjek yang menjadi objek dengan seluruh subjek.

J = Setengah jarak kekeliruan terhadap rata-rata hitung yang dapat divariansi

Z = Derajat konfidensi terpilih = distribusi t

Dengan mengambil derajat kepercayaan 95% dan kekeliruan 5% untuk perbandingan populasi yang sebenarnya dari seluruh masyarakat yang telah dilaksanakan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di Kabupaten Ngawi, maka perhitungan besarnya sampel adalah:

$$p = 2.806 : 39.310 = 0,07$$

$$j = 5\%; Z = 95\% = 1,96 \text{ maka:}$$

$$n = \frac{(1,96)^2 (0,07) (1 - 0,07)}{(0,05)^2} = 100$$

Dengan demikian besar sampel yang akan digunakan dalam studi ini adalah 100 Kepala Keluarga (KK)

3. Teknik sampling yang digunakan

Teknik Sampling yang digunakan dalam studi ini adalah *Sampling Purposive*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2003). Sebagaimana telah disebutkan di atas, Kepala Keluarga (KK) merupakan sampel dalam studi ini karena KK dianggap sebagai pihak yang paling mengetahui tentang informasi yang akan digali.

Sedangkan untuk menentukan jumlah sampel pada masing-masing Desa ditetapkan berdasarkan metoda proporsional (*Propotionate*). Adapun rumus yang digunakan adalah :

$$n_{\text{Desa}} = \frac{\text{Jumlah KK}_{\text{Desa}}}{\text{Jumlah KK}_{\text{Total}}} \times \text{Jumlah Sampel}$$

$$n_{\text{Desa}} = \text{Jumlah Sampel Desa}$$

Berdasarkan rumus tersebut maka diperoleh jumlah sampel masing-masing desa adalah sebagai berikut :

TABEL I.2
JUMLAH SAMPEL PER DESA

No.	Kecamatan	Desa	Jumlah KK	Jumlah Sampel
1.	KPH Ngawi	Desa Sambirejo Kec. Mantingan	1171	50
2.	KPH Saradan	Desa Krompol Kec Bringin	672	29
3.	KPH Lawu Ds	Desa Pandansari Kec. Sine	494	21
	Jumlah		2337	100

Sumber : Hasil Analisis, 2005

Jumlah sampel pada tiap-tiap Desa didasarkan pada besarnya sebaran Rumah Tangga yang ada di masing-masing desa karena subyek penelitian yang dipilih adalah Kepala Rumah Tangga (KK). Sebaran sampel juga didasarkan pada pemerataan pada tiap-tiap dusun di masing-masing desa.

1.6.5 Teknik Analisis

Dalam upaya memperkaya data dan lebih memahami fenomena sosial yang diteliti, terdapat usaha untuk mengombinasikan pendekatan kuantitatif dengan kualitatif dalam suatu penelitian (Singarimbun, 1995). Dengan demikian metoda analisis yang digunakan dalam penelitian tersebut juga merupakan gabungan atau perpaduan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada kerangka analisis yang telah disusun. Analisis dibedakan atas 3 proses analisis, analisis pertama dilakukan untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antara Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat dengan kelestarian kawasan hutan dan kesejahteraan masyarakat desa hutan, analisis kedua dilakukan untuk menilai kondisi dan pengaruh Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat

terhadap Kelestarian kawasan hutan dan kesejahteraan masyarakat, yang kemudian akan diketahui tingkat keberhasilan Program Pengelolaan hutan Bersama Masyarakat di Kabupaten Ngawi. Dan analisis ketiga dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat.

1. Analisis Korelasi

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh antara program PHBM dengan kelestarian kawasan hutan dan kesejahteraan masyarakat desa hutan. Apakah kondisi kelestarian dan kesejahteraan yang terjadi disebabkan oleh program PHBM atau karena faktor lain. Untuk itu dilakukan beberapa pembuktian korelasi, yaitu :

- a. Apakah terdapat hubungan antara Program PHBM dengan kelestarian kawasan hutan
- b. Apakah terdapat hubungan antara Program PHBM dengan kesejahteraan masyarakat desa hutan
- c. Dan apakah ada hubungan antara kelestarian kawasan hutan dengan kesejahteraan masyarakat desa hutan.

Analisis korelasi ini dilakukan dengan menggunakan analisi korelasi pada SPSS.10 for windows. Dan untuk menginterpretasikan koefisien korelasi dapat berpedoman pada standar menurut Sugiono, 2004

TEBEL 1.3
PEDOMAN UNTUK MEMBERIKAN INTERPRETASI
KOEFISIEN KORELASI

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat kuat

Sumber : Buku Metode Penelitian Administrasi, Sugiono, 2004

2. Analisis Kondisi

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat terhadap kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat desa hutan. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui perubahan yang terjadi sebelum dan setelah program PHBM. Adapun variabelnya adalah:

- Tingkat kelestarian kawasan hutan, diukur dengan indikator :
 - Perubahan lahan hutan yang non produktif setelah PHBM
 - Tingkat pencurian kayu
- Tingkat kesejahteraan masyarakat desa hutan, diukur dengan indikator
 - Tingkat pendapatan
 - Tingkat pendidikan
 - Tingkat harapan hidup atau kesehatan

Dari dua variabel tersebut dilakukan analisis sebagai berikut:

a. Analisis tingkat kelestarian kawasan hutan

Analisis ini dilakukan dengan mengurangkan data setelah program dengan data sebelum program, kemudian dibagi dengan data sebelum program dikalikan 100 persen, seperti rumus berikut ini :

$$P = \frac{H_n - H_o}{H_o} \times 100$$

P = Perubahan

H_o = Kondisi sebelum program

H_n = Kondisi setelah program

- Perubahan lahan hutan yang non produktif setelah PHBM

Untuk menganalisa perubahan lahan hutan non produktif, dengan membandingkan data sebelum dan setelah pelaksanaan PHBM. Dari hasil analisa ditentukan kriteria sebagai berikut:

- Perubahan lahan menurun mempunyai nilai positif
- Perubahan lahan meningkat mempunyai nilai negatif
- Tingkat pencurian kayu

Untuk menganalisa tingkat pencurian kayu, dengan membandingkan data dalam beberapa kurun waktu sebelum dan sesudah pelaksanaan PHBM. Dari hasil analisa ditentukan kriteria sebagai berikut:

- Tingkat pencurian kayu menurun mempunyai nilai positif
- Tingkat pencurian kayu meningkat mempunyai nilai negatif

Kriteria penilaian tingkat pengaruh PHBM terhadap kelestarian kawasan hutan sebagai berikut:

- Tinggi = apabila semua hasil bernilai positif
- Sedang = apabila salah satu hasil bernilai negatif
- Rendah = apabila semua hasil bernilai negative

b. Analisis tingkat kesejahteraan masyarakat desa hutan

Analisis yang digunakan berdasarkan *Human Development Index (HDI)*, yang merupakan perhitungan dari beberapa indeks dalam kurun waktu sebelum dan sesudah PHBM, yang mempunyai indikator berbeda.

- Tingkat pendapatan masyarakat

Untuk mengetahui tingkat pendapatan masyarakat berdasarkan perhitungan indeks pendapatan (*Purchasing Power Index*) menurut UNDP (2001), diberi kisaran nilai pendapatan masyarakat Indonesia dengan nilai minimum Rp. 360.000,- sampai nilai maksimum Rp.737.720,- sampai dengan tahun 2018, dengan proses perhitungan indeks pendapatan sebagai berikut:

$$I = \frac{P1 - 360.000}{737.000 - 360.000} \times 100$$

I = Indeks pendapatan

P1 = Rata-rata pendapatan kepala keluarga

Kemudian untuk mengetahui pengaruh PHBM terhadap pendapatan masyarakat dilakukan dengan membandingkan indeks pendapatan sebelum dan sesudah pelaksanaan PHBM, dengan kriteria:

- Tingkat pendapatan masyarakat ≥ 1 mempunyai nilai positif
- Tingkat pendapatan masyarakat < 1 mempunyai nilai negatif

- Tingkat pendidikan masyarakat

Untuk mengetahui tingkat pendidikan dengan melihat angka melek huruf (usia 15 tahun keatas) dan rata-rata usia sekolah sebagai salah satu variabel dari *Human Development Index (HDI)*. Dasar dari perhitungan indeks pendidikan yang telah dicapai adalah:

- Indeks Angka Melek Huruf (*Literacy Rate Index*) menurut IHDR (2001), diberi kisaran persentase angka melek huruf masyarakat Indonesia dengan nilai kisaran dari 0 sampai 100 proses perhitungan indeks melek huruf sebagai berikut:

$$I_1 = \frac{P1 - 0}{100 - 0} \times 100$$

I_1 = Indeks melek huruf

$P1$ = Persentase angka melek huruf masyarakat desa hutan

- Indeks rata-rata usia sekolah (*Mean Years of Scholing Index*) menurut IHDR (2001), diberi kisaran rata-rata usia sekolah penduduk Indonesia dengan nilai kisaran minimum 0 sampai maksimum 15 tahun, proses perhitungannya sebagai berikut:

$$I_2 = \frac{P1 - 0}{15 - 0} \times 100$$

I_2 = Indeks rata-rata usia sekolah

$P1$ = Rata-rata usia sekolah masyarakat desa hutan

Rumus yang digunakan untuk menghitung indeks tingkat pendidikan masyarakat berdasarkan IHDR (2001) adalah perpaduan antara indeks melek huruf dengan indeks rata-rata usia sekolah sebagai berikut:

$$I = (2/3 \times I_1) + (1/3 \times I_2)$$

I = Indeks pendidikan

I₁ = Indeks melek huruf

I₂ = Indeks rata-rata usia sekolah

Kemudian untuk mengetahui pengaruh PHBM terhadap pendidikan masyarakat dengan dilakukan pengurangan indeks pendidikan masyarakat sesudah program PHBM dengan indeks pendidikan sebelum program PHBM, dengan kriteria:

- Tingkat pendidikan masyarakat ≥ 1 mempunyai nilai positif
- Tingkat pendidikan masyarakat < 1 mempunyai nilai negatif
- Tingkat harapan hidup atau kesehatan

Dasar dari perhitungan indeks harapan hidup (*Life Expectancy Index*) menurut IHDR (2001), diberi kisaran umur harapan hidup Penduduk Indonesia dengan nilai minimum 25 tahun sampai nilai maksimum 85 tahun dengan proses perhitungan indeks harapan hidup sebagai berikut:

$$I = \frac{P1 - 25}{85 - 25} \times 100$$

I = Indeks harapan hidup

P1 = Tingkat harapan hidup masyarakat desa hutan

Kemudian untuk mengetahui pengaruh PHBM terhadap tingkat harapan hidup masyarakat dilakukan dengan membandingkan indeks tingkat harapan hidup sebelum dan sesudah pelaksanaan PHBM, dengan kriteria:

- Tingkat harapan hidup masyarakat ≥ 1 mempunyai nilai positif
- Tingkat harapan hidup masyarakat < 1 mempunyai nilai negatif

Kriteria penilaian tingkat pengaruh PHBM terhadap kesejahteraan masyarakat desa hutan sebagai berikut:

- Tinggi = apabila salah satu hasil bernilai negatif
- Sedang = apabila ada dua hasil bernilai negatif
- Rendah = apabila semua hasil bernilai negatif

Dari hasil analisis kondisi di atas dilanjutkan dengan melakukan pembobotan berdasarkan kriteria penilaian dengan memberikan skor. Sehingga akan diperoleh besaran jumlah dan tipologi wilayah keberhasilan, sebagaimana tersaji dalam Tabel I.3 berikut ini :

TABEL I.4
TIPOLOGI WILAYAH KEBERHASILAN

Tipologi Wilayah	Kelestarian			Kesejahteraan			Jumlah
	Tinggi	Sedang	Rendah	Tinggi	Sedang	Rendah	
Tipologi I	3			3			6
Tipologi II	3				2		5
Tipologi III	3					1	4
Tipologi IV		2			2		4
Tipologi V		2				1	3
Tipologi VI			1			1	2

Sumber : Hasil Analisis, 2005

Dari tabel tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Tipologi I, apabila kedua variabel mempunyai kriteria tinggi
 2. Tipologi II, apabila satu variabel mempunyai kriteria tinggi dan variabel lain mempunyai kriteria sedang
 3. Tipologi III, apabila salah satu variabel mempunyai kriteria tinggi dan variabel lain mempunyai kriteria rendah
 4. Tipologi IV, apabila kedua variabel mempunyai kriteria sedang
 5. Tipologi V, apabila salah satu variabel mempunyai kriteria sedang dan variabel lain mempunyai kriteria rendah
 6. Tipologi VI, apabila kedua variabel mempunyai kriteria rendah
3. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di Kabupaten Ngawi, dengan menggunakan analisis *Chi Square*. Adapun variabel terpengaruhnya adalah kelestarian kawasan hutan dan kesejahteraan masyarakat desa. Sedangkan variabel yang mempengaruhinya adalah Sumber daya manusia, peralatan, metoda dan biaya.

Hipotesis nol (H_0) adalah hipotesis yang menyatakan tidak ada hubungan mempengaruhi antara variabel-variabel yang sedang diteliti (variabel saling bebas), sedangkan pernyataan hipotesis alternatif (H_1) adalah hipotesis yang menyatakan ada hubungan mempengaruhi antara variabel-variabel yang sedang diteliti. Nilai *Chi Square* tersebut dihitung berdasarkan selang kepercayaan atau tingkat signifikan tertentu. Selang kepercayaan yang

digunakan dalam studi ini sebesar 95%. Penetapan selang kepercayaan ini berdasarkan pertimbangan praktis dan kelaziman dalam penelitian sosial.

- Jika nilai *Chi Square* hitung \geq *Chi Square* tabel , maka pernyataan H_0 ditolak (hipotesis H_1 diterima).
- Jika nilai *Chi Square* hitung $<$ *Chi Square* tabel maka H_0 diterima (hipotesis H_1 ditolak).

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat adalah :

a. Sumber daya manusia (*Men*)

- Pendidikan
- Umur
- Jenis kelamin
- Lama bekerja

b. Peralatan (*Materials*)

- Kecukupan alat (Jumlah alat)
- Jenis alat
- Kemudahan alat
- Kualitas alat.

c. Cara/Metoda (*Methods*)

- Kesesuaian metoda
- Kejelasan metoda (pemahaman terhadap metoda)
- Kemampuan pelaksanaannya

d. Biaya (*Money*)

- Bantuan
- Kemudahan mendapatkan biaya
- Kecukupan

e. Kedekatan dengan lokasi (faktor lingkungan)

- Jarak tempuh
- Waktu tempuh

4. Analisis Perbandingan antara Kondisi Program PHBM dengan Faktor-faktor yang mempengaruhinya

Analisis ini dilakukan dengan membandingkan pengaruh program PHBM dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya, sehingga akan didapatkan suatu kondisi yang disebabkan oleh program PHBM dan sebab-sebab terjadinya suatu kondisi tersebut. Teknik yang dilakukan adalah membandingkan hasil analisis kondisi dengan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi.

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan Pra Tesis dengan Judul Pengaruh Prpgram Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat terhadap Kelestarian kawasan hutan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Hutan di Kabupaten Ngawi, tersusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini dijelaskan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Sasaran Studi, Ruang Lingkup Studi, Kerangka Pemikiran, Pendekatan Studi dan Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TEORI PEMBANGUNAN KEHUTANAN DAN PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT

Bab ini menjelaskan landasan teoritis yang digunakan sebagai dasar berpikir dalam penyusunan studi yang meliputi kajian teori mengenai Pengertian Pengelolaan Hutan, Pengertian Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat dan Rangkuman Kajian Teori

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH PELAKSANAAN PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT DI KABUPATEN NGAWI

Bab ini menjelaskan kondisi empiris wilayah studi yang meliputi Kondisi Geografis, Kondisi Hutan, Jenis-jenis kegiatan PHBM dan Kondisi sosial ekonomi masyarakat desa hutan di Kabupaten Ngawi

BAB IV ANALISIS PENGARUH PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT TERHADAP KELESTARIAN KAWASAN HUTAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA HUTAN DI KABUPATEN NGAWI

Bab ini berisikan tentang analisis korelasi, analisis kondisi dan analisis faktor penyebab serta arah pengembangan wilayah kehutanan. Semua analisis terkait dengan pengaruh program PHBM terhadap kelestarian kawasan hutan dan kesejahteraan masyarakat desa hutan.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan temuan studi yang akan dijadikan rekomendasi didalam pelaksanaan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di Kabupaten Ngawi.

BAB II

TEORI PEMBANGUNAN KEHUTANAN DAN PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT

2.1 Pembangunan Kehutanan

2.1.1 Pengelolaan Hutan

Hutan menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Sedangkan menurut Dengler dalam Salim HS. (1997), hutan adalah sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas sehingga suhu kelembapan, cahaya, angin dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan, pepohonan baru akan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat (horizontal dan vertikal).

Hutan merupakan suatu asosiasi kehidupan, baik tumbuh-tumbuhan (*flora*) maupun binatang (*fauna*) dari yang sederhana sampai yang bertingkat tinggi dan dengan luas sedemikian rupa serta mempunyai kerapatan tertentu dan menutupi areal sehingga dapat membentuk iklim mikro tertentu (Arief Arifin ; 2001). Pengertian hutan disini adalah merupakan satu kesatuan ekosistem berupa lapangan (tanah) yang ditumbuhi oleh pepohonan, flora dan fauna beserta lingkungannya yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan.

Pembangunan kehutanan menurut Arief Arifin (2001) merupakan upaya pengelolaan sumber daya hutan secara lestari dan pemanfaatan hutan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sedangkan pengelolaan hutan menurut Davis dalam Simon Hasan (1993) adalah aplikasi teknik pengusahaan dan prinsip-prinsip teknik kehutanan untuk mengoperasionalkan sifat-sifat hutan

Berdasarkan pengertian diatas pengelolaan hutan merupakan suatu manajemen hutan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan hutan dengan tujuan menjaga kelestarian hutan dan pemanfaatan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

2.1.2 Pembangunan Kehutanan yang berkesinambungan (Sustainable)

Paradigma baru dalam pembangunan kehutanan adalah pembangunan yang berkelanjutan, dimana pembangunan kehutanan harus berdasarkan pendekatan intra generasi dan inter generasi. Intra generasi adalah pembangunan kehutanan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang. Inter generasi adalah harus memenuhi kebutuhan generasi yang akan datang. Jadi setiap generasi mempunyai porsi yang sama akan sumber daya hutan.

Menurut Muschett (1997) komponen pembangunan yang berkelanjutan harus memenuhi tiga komponen, yaitu; Ekologi, Sosial budaya dan Ekonomi. Ketiga komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang harus dipenuhi dalam pembangunan kehutanan.

1. Ekologi

Ekologi adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Pembangunan kehutanan harus menjamin kelangsungan

ekosistem, daya dukung lingkungan dan keanekaragaman hayati yang ada di hutan

2. Sosial budaya

Untuk menjamin keberhasilan pembangunan kehutanan, faktor sosial budaya sangat menentukan. Keberadaan masyarakat sekitar hutan harus dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pembangunan kehutanan.

3. Ekonomi

Tidak bisa dipungkiri bahwa kayu hutan mempunyai pasar yang sangat menggiurkan. Banyak keuntungan ekonomi yang di dapat dari penjualan kayu.

Untuk mendapatkan keuntungan tersebut maka pembangunan kehutanan harus menjamin pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar hutan

Sebagai solusi untuk mencari keseimbangan antara proses pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup adalah dalam pelaksanaan pembangunan hendaknya didasarkan pada kebersamaan antara pertimbangan ekologi, ekonomi dan soial sesuai dengan hasil kesepakatan dalam Deklarasi Stockholm, Deklarasi Nairobi Dan Deklarasi Manila yang secara jelas telah menggariskan hubungan antara lingkungan dan pembangunan, sehingga antara pembangunan ekonomi dan pelestarian fungsi lingkungan hidup tidak perlu dipermasalahkan secara serius, sepanjang ada balance antar keduanya.

2.2 Pembangunan Kehutanan merupakan Subsistem dari Pembangunan Wilayah

Pembangunan kehutanan merupakan bagian dari pembangunan nasional dan merupakan subsistem dari pembangunan wilayah dengan tujuan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat desa hutan. Sebagaimana yang tercantum dalam Bab IV huruf H angka 4 Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1999 – 2004 bahwa mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal serta penataan ruang.

Untuk itu pembangunan kehutanan harus menempatkan masyarakat sebagai subjek sekaligus objek dalam pembangunan kehutanan. Achmad Santosa (2000) menyimpulkan bahwa baik rakyat maupun pemerintah sama-sama mempunyai kewajiban untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Menurut Todaro (1986) pengembangan wilayah adalah usaha sadar dari suatu organisasi pusat untuk mempengaruhi, dan mengarahkan, serta mengendalikan perubahan-perubahan dalam variabel-variabel ekonomi utama dari wilayah tersebut selama kurun waktu tertentu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tujuan pengembangan wilayah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang melalui proses: 1) Peningkatan laju pertumbuhan wilayah. 2) Pemerataan pembangunan dan meminimalisir kesenjangan wilayah, golongan masyarakat dan sektor pembangunan. 3) Pengembangan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable*).

Berdasarkan pada pengertian pengembangan wilayah yang dikemukakan oleh Todaro tersebut, pembangunan kehutanan dapat diartikan sebagai serangkaian usaha secara sadar untuk mengembangkan kawasan hutan melalui pengembangan kegiatan/aktivitas wilayah dalam kesatuan ruang yang saling berinteraksi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa hutan di masa yang akan datang.

2.2.1 Pengembangan Wilayah

Wilayah (*region*) dalam pengertian geografi menurut Jayadinata (2000:13), merupakan kesatuan alam, yaitu alam yang serba sama atau homogen atau seragam dan kesatuan manusia, yaitu masyarakat serta kebudayaannya yang serba sama yang mempunyai ciri yang khas, sehingga wilayah tersebut dibedakan dari wilayah lain. Wilayah geografi dapat mengandung wilayah geologi (*geological region*), wilayah tubuh tanah (*soil region*), wilayah ekonomi (*economic region*) dan sebagainya. Batas wilayah geografi ini tidak berimpit, sehingga batasnya dapat dibuat dengan tepat. Wilayah geografi ini sering disebut sebagai wilayah formal (*formal region*).

Selain istilah wilayah formal terdapat istilah wilayah fungsional (*functional region*), yang didefinisikan sebagai suatu bagian dari permukaan bumi, di mana beberapa keadaan alam yang berlawanan memungkinkan timbulnya bermacam-macam kegiatan, yang hasilnya berbeda dan saling mengisi dalam keperluan kehidupan penduduk. Kadang-kadang wilayah seperti ini sering disebut wilayah organik, misalnya pada suatu pegunungan, penduduk dari suatu gunung hidup dari kehutanan, di lerengnya dari perkebunan dan pertambangan, di kakinya dari pertanian dan peternakan dan di dataran dari perdagangan, industri dan pelayanan, sehingga masing-masing penduduk wilayah tersebut dapat saling mengisi kebutuhan hidupnya.

Pengembangan suatu wilayah biasanya berkaitan dengan pertumbuhan perekonomian wilayah tersebut, ini menurut teori *resource endowment* (Perloff, 1960). Dalam teori ini dinyatakan bahwa pengembangan ekonomi wilayah tergantung pada sumber daya alam yang dimiliki dan permintaan terhadap komoditas yang dihasilkan dari sumber daya itu, yang dalam jangka pendek merupakan asset untuk memproduksi barang dan jasa.

Menurut North (1955), pertumbuhan wilayah dalam jangka panjang bergantung pada kegiatan industri ekspornya, sedangkan menurut Myrdal (1957), terdapat dua kekuatan yang bekerja pada pertumbuhan ekonomi, yaitu *backwash effect* dan *spread effect*. Kekuatan efek penyebaran (*spread effect*) mencakup penyebaran pasar hasil produksi bagi wilayah yang belum berkembang, kekuatan efek balik negatif (*backwash effect*) biasanya melampaui efek penyebaran dengan

ketidakseimbangan aliran modal dan tenaga kerja dari daerah tidak berkembang ke daerah berkembang.

Berdasarkan teori pengembangan wilayah, ada dua pendekatan yang umum dipakai, yaitu konsep pengembangan wilayah dari atas (*development from above*) dan konsep pengembangan dari bawah (*development from below*). Konsep pengembangan dari atas paling banyak digunakan, baik secara ekonomis maupun praktek. Tujuan dari strategi ini adalah pembangunan pada sektor-sektor utama (terpilih) pada lokasi tertentu, sehingga akan menyebarkan kemajuan ke seluruh bagian wilayah.

Konsep Pengembangan dari Bawah adalah suatu proses pembangunan yang menyeluruh dari berbagai kesempatan yang ada untuk individu, kelompok sosial dan kelompok masyarakat secara teritorial pada skala menengah dan kecil, memobilisasi sepenuhnya kemampuan dan sumber daya yang ada untuk memperoleh keuntungan bersama dalam ekonomi, sosial dan politik. Konsep ini merupakan kebalikan dari konsep pengembangan dari atas.

2.2.2 Pengembangan Ekonomi Lokal

Pada awalnya, sesuai dengan sejarah perencanaan pembangunan, di mana ada konsep pengembangan wilayah yang dilaksanakan secara *development from above*, *development from below* dan *selective spatial closure*, agropolitan tidak memberikan hasil yang diinginkan dan sulit diimplementasikan, maka lahirlah konsep *local economic development*. Konsep pengembangan ekonomi lokal berusaha memadukan konsep-konsep tersebut, dengan mengembangkan dan

meningkatkan peran elemen-elemen *endogenous development* dalam kehidupan sosial ekonomi lokal dan melihat keterkaitan serta integrasinya secara fungsional dan spasial dengan wilayah yang lebih luas (Ma'rif : 2000).

Pengembangan ekonomi lokal mendasari konsepnya pada pengembangan kewirausahaan lokal serta tumbuh kembangnya perusahaan-perusahaan lokal, kerja sama pemerintah lokal dengan swasta dan lembaga-lembaga lainnya dalam mengelola sumber-sumber yang potensial untuk mendorong aktivitas ekonomi.

Konsep ini pada dasarnya beranggapan bahwa pengembangan wilayah sangat ditentukan oleh tumbuh kembangnya wiraswasta lokal yang ditopang oleh kelembagaan yang ada di wilayah tersebut, meliputi industri, universitas, asosiasi kegiatan usaha, pemerintah daerah, pengusaha lokal dan lainnya. Masalahnya adalah bagaimana memobilisasi potensi-potensi kelembagaan tersebut dan menjadikannya sebagai faktor pendorong pengembangan wilayah.

Terdapat banyak fungsi yang harus diperhatikan dalam pengembangan ekonomi lokal, seperti sumber daya alam, tenaga kerja, modal investasi, skala ekonomis, pasar, situasi ekonomi, kemampuan pemerintah pusat dan daerah, serta situasi yang kondusif.

Dalam bahasa akademis, perekonomian lokal dapat dibagi menjadi dua sektor perekonomian, yaitu *sektor basis* dan *non basis*. Kegiatan pada sektor basis merupakan kegiatan yang mengeksport barang-barang dan jasa-jasa ke luar batas wilayah perekonomian. Sedangkan kegiatan non basis adalah kegiatan-kegiatan

yang menyediakan barang-barang dan jasa-jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam wilayah yang bersangkutan.

Teori basis ekonomi menyatakan bahwa bertambah banyak sektor basis dalam suatu daerah akan menambah arus pendapatan dari luar daerah ke dalam daerah yang bersangkutan, sehingga akan menambah permintaan terhadap barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi oleh sektor non basis, demikian pula sebaliknya. Sektor basis mempunyai peranan sebagai penggerak utama (*prime mover role*) perekonomian wilayah melalui *efek multiplier*. Dengan demikian suatu daerah dapat berkembang apabila mampu mengembangkan sektor basisnya (Glasson, 1977), serta penanaman modal pada industri-industri lokal merupakan investasi sebagai akibat kenaikan pendapatan dari industri-industri sektor basis (Kadariah, 1985).

Suatu daerah akan melakukan spesialisasi dalam memproduksi barang dan jasa yang menjadi sektor basisnya. Bagi daerah yang tidak memiliki sektor basis, maka akan lambat dalam pertumbuhan ekonominya. Sedangkan kerugiannya apabila suatu daerah tergantung pada satu kegiatan basis, maka perekonomian sangat rentan terhadap gejolak.

Teori Pengembangan Ekonomi Lokal pada intinya mengemukakan bagaimana mengembangkan perekonomian lokal dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki, sejauh mana industri tersebut menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat dan menumbuhkan perekonomian lokal serta bagaimana keberlanjutannya pada masa yang akan datang. Menurut Coffey and Polase dalam Blair (1985) proses berkembangnya perekonomian lokal pada

dasarnya meliputi empat tahap: *pertama*, tumbuhnya kewiraswastaan (*entrepreneurship*) lokal; *kedua*, lepas landasnya (*take off*) perusahaan-perusahaan lokal; *ketiga*, berkembangnya perusahaan-perusahaan tersebut keluar lokalitas, dan *keempat*, terbentuknya suatu perekonomian wilayah yang mengakar pada kegiatan dan inisiatif lokal serta keunggulan-keunggulan komparatif aktifitas ekonomi lokal tersebut.

Local economic development sebagai model, menekankan pada bagaimana merumuskan *endogeneous development policies* dengan sebanyak mungkin menggunakan aspek lokalitas dalam pembangunan, baik berupa sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan dan kelembagaan. Indikator yang sering digunakan adalah besarnya kesempatan kerja di daerah tersebut.

2.3 Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)

2.3.1 Latar Belakang Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat

Adanya kerusakan hutan sebagai akibat perkembangan sosial ekonomi masyarakat, menggambarkan bahwa pada tingkat tertentu tujuan pengelolaan hutan masih belum mampu mengantisipasi perkembangan sosial ekonomi masyarakat. PT. Perhutani sebagai BUMN yang disertai tugas untuk mengelola hutan di Jawa mempunyai tugas ganda yang harus diemban dengan penuh tanggung jawab.

Sebagai badan usaha Perhutani harus mengejar pendapatan dan memperoleh keuntungan untuk kelancaran pembangunan nasional. Akan tetapi sebagai badan usaha milik negara harus tetap memperhatikan aspek sosial

masyarakat dalam setiap tindakan dan kebijakan. Kepentingan kehutanan dan kepentingan masyarakat harus menjadi satu kesatuan.

Disamping tantangan pengelolaan hutan dari masyarakat sekitar hutan, telah terjadi perubahan sudut pandang masyarakat dunia terhadap lingkungan. Kelestarian alam dan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat menjadi isu global terutama setelah diselenggarakan konferensi lingkungan di Stockholm tahun 1972 dan ditindaklanjuti dalam kongres bumi di Rio de Janeiro tahun 1992. Sebelumnya telah diselenggarakan kongres kehutanan sedunia ke V di Seattle tahun 1960, tentang azas-azas pemanfaatan ganda dari hutan dan kehutanan (*Multiple Use Principle*). Sistem pengelolaan pemanfaatan ganda dari sumber daya hutan lebih dimantapkan dengan ditetapkannya sistem Sosial Forestry pada kongres Kehutanan Dunia (*WFC, World Forestry Congress*) VIII di Jakarta dengan tema *Forest for People*.

Melihat kondisi seperti itu PT. Perhutani mencoba berbenah diri dengan merombak secara perlahan tujuan pengelolaan hutan dari sistem konvensional menuju kehutanan sosial (*Social Forestry*). Apabila secara konvensional pengelolaan hutan semata-mata menghasilkan kayu untuk mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya, sistem kehutanan sosial selain membantu pembangunan ekonomi, juga mulai dilakukan usaha untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

Konsep pengelolaan hutan bersama masyarakat adalah merupakan strategi kehutanan sosial yang bertujuan hanya untuk kemakmuran masyarakat. Didalam pengelolaan hutan dengan strategi kehutanan sosial, disesuaikan dengan

karakteristik lahan tipe hutan, sosial budaya ekonomi, kelembagaan masyarakat setempat termasuk masyarakat hutan adat dan batas administrasi pemerintahan, yang berada dengan sistem konvensional yang mempunyai perbedaan sebagai berikut:

1. Tujuan Pengelolaan hutan tidak hanya untuk menghasilkan kayu pertukangan, melainkan untuk memanfaatkan sumber daya hutan bagi semua jenis hasil hutan yang dapat dihasilkan di tempat yang bervariasi menurut lokasi.
2. Orientasi pengelolaan hutan berubah dari kepentingan untuk memperoleh keuntungan finansial bagi perusahaan, kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar hutan.
3. Berbeda dengan pengelolaan kebun kayu, yang berskala luas dengan konsep kelas perusahaan untuk satu bagian hutan sebagai unit dalam strategi kehutanan sosial, bentuk pengelolaan hutan beragam sesuai dengan sifat fisik wilayah mikro dan pengaruh sosial (*management regimes*), untuk memaksimalkan produktivitas tiap jengkal kawasan hutan. Menurut Hasanu Simon (1999) bahwa satuan wilayah mikro yang diambil disini adalah unit kegiatan tahunan, khususnya pekerjaan tanaman yang pada hutan di Jawa dapat diidentikkan dengan petak (*compartement*) dengan luas 30-40 ha saja.

Langkah tersebut diformasikan menjadi program pendekatan kesejahteraan masyarakat (*Prosperity Approach*) dan pembinaan masyarakat desa hutan (PMDH) yang dimulai tahun 1973. Tahun 1986 dikembangkan konsep perhutanan sosial dan mulai tahun 1991 dikembangkan bentuk lain sistem kehutanan sosial berupa pengelolaan hutan model *management Regime* (MR) di

KPH Madiun. Program terakhir yang sedang gencar-gencarnya adalah Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) sesuai SK Direktur Utama Perhutani No. 136/Dir/2001. Semua program itu dimaksudkan untuk menjamin keamanan hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

Konsep PHBM mempunyai ciri-ciri pokok sebagai berikut:

1. Kehutanan ditempatkan sebagai bagian (sub sistem) dari sistem pembangunan wilayah
2. Karena titik (a) tersebut, maka tujuan pengelolaan hutan adalah untuk ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Hasan Simon (1991) bahwa untuk dapat merumuskan pengelolaan yang relevan dengan kondisi wilayah dan kepentingan masyarakat maka prosedur perencanaan dimulai dari identifikasi masalah pembangunan wilayah dengan disertai informasi yang jelas.

2.3.2 Pengertian Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat menurut ketua dewan pengawas PT. Perhutani No. 136/KPTS/DIR/2001 adalah suatu sistem pengelolaan sumber daya hutan yang dilakukan bersama oleh PT. Perhutani dan masyarakat desa atau PT. Perhutani dengan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dengan jiwa berbagi, sehingga kepentingan bersama untuk mencapai berkelanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proposional.

Pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat (PHBM) dihubungkan dengan UU No. 32 Th. 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Th. 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, PHBM merupakan sistem kebijakan pengelolaan atau manajemen yang berorientasi pada kolaborasi antara perusahaan dan pemerintah daerah dalam membangun kerjasama dengan masyarakat desa hutan maupun *stakeholders* yang dilandasi prinsip pembelajaran bersama, saling percaya dan saling menghargai peran masing-masing dalam konteks pengelolaan sumber daya hutan dengan memadukan aspek ekonomi, ekologi dan aspek sosial secara proporsional sesuai dengan tujuan UU No. 41 th. 1999 tentang kehutanan.

Adapun bentuk dari kegiatan PHBM yang dilakukan PT. Perhutani dan pemerintah daerah bersama masyarakat desa hutan, *stakeholders* meliputi berbagi dalam pemanfaatan lahan atau tata ruang, berbagi dalam pemanfaatan waktu, berbagi pemanfaatan hasil dalam pengelolaan sumber daya alam dengan prinsip saling menguntungkan, saling memperkuat dan saling mendukung.

Bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan sumber daya hutan yang dapat dikelola bersama masyarakat adalah jenis-jenis kegiatan berbasis lahan (*Land based*) yang dilaksanakan di kawasan hutan dan dapat dikembangkan di luar kawasan hutan dengan memanfaatkan lahan atau ruang melalui pola tanam yang disesuaikan karakteristik wilayah. Pola-pola yang sesuai karakteristik wilayah adalah pola tanam yang dapat mengembangkan keanekaragaman jenis dan komoditi kehutanan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dengan tetap mengoptimalkan fungsi dan manfaat sumber daya alam.

2.4 Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat di suatu wilayah. Sehingga kesejahteraan dapat ditinjau dari tingkat perkembangan suatu wilayah. Tingkat perkembangan wilayah merupakan suatu pendekatan yang akan dapat memberikan indikasi keberhasilan pembangunan yang telah dicapai pada suatu daerah. Ada beberapa cara yang dikenalkan oleh UNDP dalam mengukur tingkat perkembangan tersebut, yaitu; *Human Development Index (HDI)*, *Human Poverty Index (HPI)*, *Gender-related Development Index (GDI)* dan *Gender Empowerment Measure (GEM)*.

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Human Development Index (HDI)*, yang merupakan perhitungan dari beberapa indeks yang mempunyai indikator berbeda. Indikator tersebut adalah; tingkat pendapatan masyarakat, hasil pendidikan (angka melek huruf + rata-rata usia sekolah) dan tingkat harapan hidup. Indikator ini digunakan karena berhubungan dengan proses pembangunan pada setiap daerah.

2.4.1 Tingkat pendapatan masyarakat

Salah satu tolak ukur yang digunakan untuk melihat keberhasilan program pembangunan dari aspek ekonomi adalah pendapatan masyarakat. Untuk mengetahui tingkat pendapatan masyarakat berdasarkan perhitungan indeks pendapatan (*Purchasing Power Index*) menurut UNDP (2001), diberi kisaran nilai pendapatan masyarakat Indonesia dengan nilai minimum Rp. 360.000,- sampai nilai maksimum Rp.737.720,- sampai dengan tahun 2018, dengan rumus indeks pendapatan sebagai berikut:

Indeks pendapatan masyarakat = $(P_1 - 360.000) / (737.720 - 0) \times 100$

dimana; P_1 = rata-rata pendapatan per *households* pada desa penelitian

2.4.2 Hasil pendidikan masyarakat

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan dasar dalam kehidupan, sebagai faktor yang dominan dalam pembentukan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Pendidikan selain penting dalam mengatasi dan mengikuti tantangan zaman, juga membawa pengaruh positif terhadap perkembangan berbagai bidang kehidupan lainnya. Oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila sektor pendidikan senantiasa mendapat banyak perhatian.

Untuk mengetahui tingkat pendidikan dengan melihat angka melek huruf (usia 15 tahun keatas) dan rata-rata usia sekolah sebagai salah satu variabel dari *Human Development Index (HDI)*. Dasar dari perhitungan indeks pendidikan yang telah dicapai adalah gabungan dari:

- a. Indeks Angka Melek Huruf (*Literacy Rate Index*) menurut IHDR (2001), diberi kisaran persentase angka melek huruf masyarakat Indonesia dengan nilai kisaran dari 0 sampai 100 proses perhitungan indeks melek huruf sebagai berikut:

Rumus Indeks melek huruf = $(P_1 - 0) / (100 - 0) \times 100$

dimana; P_1 = % angka melek huruf pada desa penelitian

- b. Indeks Rata-rata usia sekolah (*Mean Years of Scholing Index*) menurut IHDR (2001), diberi kisaran rata-rata usia sekolah penduduk Indonesia dengan nilai kisaran minimum 0 sampai maksimum 15 tahun, proses perhitungannya sebagai berikut:

Rumus Indeks rata-rata usia sekolah = $(P_1 - 0) / (15 - 0) \times 100$

dimana; P_1 = rata-rata usia sekolah pada desa penelitian

Rumus yang digunakan untuk menghitung indeks hasil pendidikan yang telah dicapai berdasarkan IHDR (2001) adalah perpaduan antara indeks melek huruf dengan indeks rata-rata usia sekolah sebagai berikut:

Rumus indeks hasil pendidikan = $(2/3 \times I_1) + (1/3 \times I_2)$

Dimana : I_1 = Indeks melek huruf I_2 = Indeks rata-rata usia sekolah

2.4.3 Tingkat harapan hidup

Tolak ukur yang digunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan dari aspek Sosial adalah tingkat harapan hidup. Dasar dari perhitungan indeks harapan hidup (*Life Expectancy Index*) menurut IHDR (2001), diberi kisaran umur harapan hidup Penduduk Indonesia dengan nilai minimum 25 tahun sampai nilai maksimum 85 tahun dengan proses perhitungan indeks harapan hidup sebagai berikut:

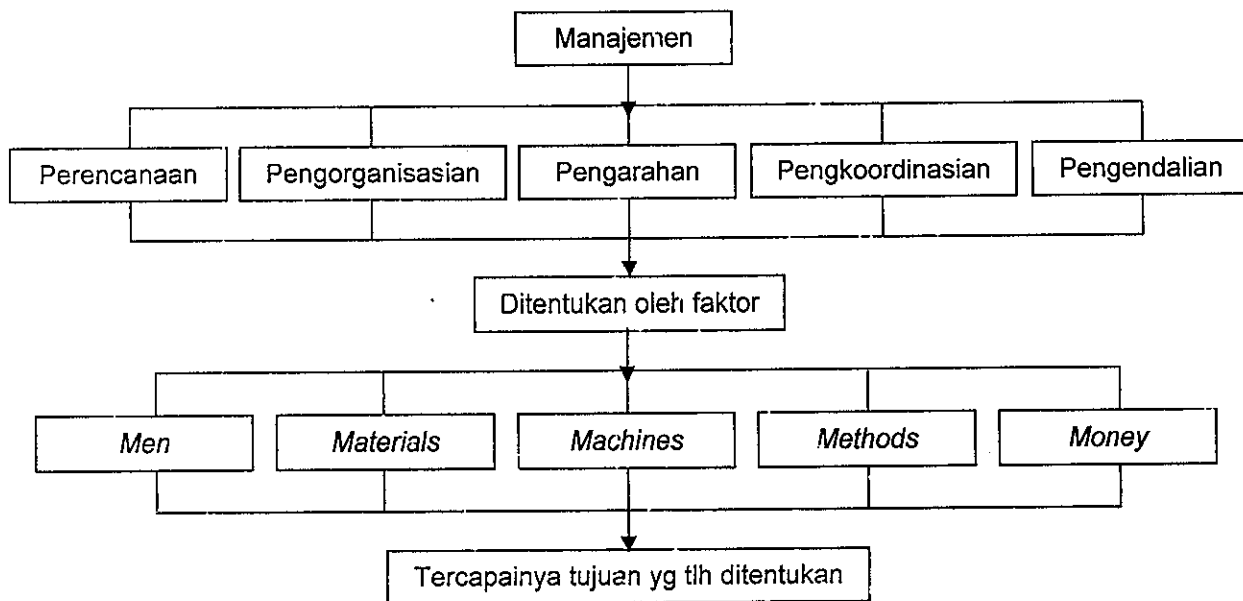
Rumus indeks harapan hidup = $(P_1 - 25) / (85 - 25) \times 100$

dimana; P_1 = tingkat harapan penduduk pada desa penelitian

2.5 Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat

Keberhasilan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat dapat diketahui dari tercapainya tujuan yang telah ditentukan. Setiap program pembangunan tidak terlepas dari kegiatan manajemen. Manajemen merupakan proses kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai sasaran-sasaran melalui

pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya yang lain. Untuk mencapai tujuan atau sasaran ditentukan oleh kemampuan mengelola faktor-faktor produksi atau sumber daya yang ada. Faktor-faktor produksi tersebut adalah *men, materials, machines, methods dan money*. (Sumarni M. dan Soeprihanto J ; 1995).



GAMBAR 2.1
PROSES MANAJEMEN

Sumber: Buku Pengantar Bisnis, Sumarni M. dan Soeprihanto J, 1995

Sedangkan menurut Ibrahim lubis (1985) faktor-faktor produksi tersebut disebut unsure-unsur manajemen yang terdiri dari 6M yaitu : *Men, Materials, Machines, Methods, Money, Market*. Unsur-unsur manajemen menurut OF. Petersen dalam Lubis Ibrahim (1985) adalah penggunaan sekelompok manusia, uang serta material untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Prawirosentono S. (2002) ada 6 (enam) unsur dasar yang mempengaruhi hasil, yaitu manusia, metode, mesin, bahan, ukuran (standar) dan lingkungan

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat adalah *men, materials dan machines, methods, money*, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sumber daya manusia (*Men*)

Sumber daya manusia adalah unsur utama yang menentukan keberhasilan suatu program. Manusia yang terlibat dalam PHBM yaitu petani.

2. Peralatan (*Materials*)

Peralatan mempunyai peran yang penting karena akan mempengaruhi kualitas, jumlah dan kecepatan proses penyelesaian suatu kegiatan. Peralatan dalam PHBM adalah alat-alat pertanian, bibit tanaman, obat dan pupuk

3. Cara/Metoda (*Methods*)

Hal ini meliputi petunjuk dan prosedur kerja yang harus dilakukan petani dalam kegiatan PHBM yaitu penanaman tanaman pokok, tanaman sela dan tanaman pertanian sesuai dengan model plang-plangan

4. Biaya (*Money*)

Dalam hal ini adalah biaya yang diberikan/dibutuhkan didalam pelaksanaan program pengelolaan hutan bersama masyarakat.

5. Kedekatan dengan lokasi (faktor lingkungan)

Hal ini sangat menentukan keberhasilan, karena berkaitan dengan efisiensi sumber daya. Yang dimaksud disini adalah jarak antara permukiman dengan lokasi lahan pertanian PHBM

2.6 Rangkuman Kajian Teori

Dari kajian teori di atas, disusun landasan teori agar dapat mencapai tujuan dalam penelitian ini yang mencakup variabel terpengaruh, yaitu tujuan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat adalah kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat desa hutan. Sedangkan variabel yang mempengaruhi adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan program tersebut.

1. Variabel terpengaruh di dalam penelitian ini adalah kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat desa hutan

a. Kelestarian hutan dapat dilihat dari dua indikator yaitu :

- perubahan lahan non produktif; semakin sedikit luas lahan non produktif berarti semakin sedikit lahan gundul dan semakin banyak jumlah tanaman hutan.
- Tingkat pencurian kayu; semakin sedikit pencurian kayu berarti semakin terjaga kelestarian hutan

b. Kesejahteraan masyarakat desa hutan, indikator yang digunakan adalah *Human Development Indeks* (HDI) mengukur keseluruhan prestasi pada suatu daerah yang di dalamnya terkandung tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dalam pertumbuhan manusia, pengetahuan dan suatu standard hidup yang layak, hal ini terukur oleh Tingkat pendapatan masyarakat, hasil pendidikan yang dicapai dan tingkat harapan hidup.

- Tingkat pendapatan masyarakat

Salah satu tolok ukur yang digunakan dalam melihat keberhasilan pembangunan dari aspek ekonomi adalah pendapatan masyarakat.

Diasumsikan semakin tinggi pendapatan masyarakat semakin berhasil pembangunan yang dilakukan.

- Hasil pendidikan yang dicapai

Hasil pendidikan yang dicapai adalah salah satu indikator Human Development Index (HDI), yang merupakan gabungan dari usia rata-rata sekolah dan tingkat melek huruf. Hasil pendidikan yang dicapai menunjukkan potensi masyarakat yang memiliki sumberdaya manusia berkualitas dalam membangun.

- Tingkat harapan hidup

Tujuan dari tingkat harapan hidup adalah mengukur seberapa jauh masyarakat berhasil mencapai sejumlah karakteristik sosial atau kebutuhan dasar untuk menjamin kelangsungan hidupnya.

2. Variabel independent yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat, yaitu :

a. Sumber daya manusia (*Men*)

Sumber daya manusia adalah unsur utama yang menentukan keberhasilan suatu program. Manusia yang terlibat dalam PHBM yaitu petani.

Indikator sumber daya manusia dalam pengelolaan hutan adalah:

- Pendidikan
- Umur
- Jenis kelamin
- Lama bekerja

b. Peralatan (*Materials*)

Peralatan mempunyai peran yang penting karena akan mempengaruhi kualitas, jumlah dan kecepatan proses penyelesaian suatu kegiatan. Peralatan dalam PHBM adalah alat-alat pertanian, bibit tanaman, obat dan pupuk. Indikator peralatan dalam pengelolaan hutan adalah :

- Kecukupan alat (Jumlah alat)
- Jenis alat
- Kemudahan alat
- Kualitas alat

c. Cara/Metoda (*Methods*)

Hal ini meliputi petunjuk dan prosedur kerja yang harus dilakukan petani dalam kegiatan PHBM yaitu penanaman tanaman pokok, tanaman sela dan tanaman pertanian sesuai dengan model plong-plongan. Indikator metoda dalam pengelolaan hutan adalah :

- Kesesuaian metoda
- Kejelasan metoda (pemahaman terhadap metoda)
- Kemampuan pelaksanaannya

d. Biaya (*Money*)

Dalam hal ini adalah biaya yang dibutuhkan didalam pelaksanaan program pengelolaan hutan bersama masyarakat. Indikator biaya dalam pengelolaan hutan adalah :

- Bantuan
- Kemudahan mendapatkan biaya

- Kecukupan

e. Kedekatan dengan lokasi (faktor lingkungan)

Hal ini sangat menentukan keberhasilan, karena berkaitan dengan efisiensi sumber daya. Yang dimaksud disini adalah jarak antara permukiman dengan lokasi lahan pertanian PHBM, indikatornya adalah:

- Jarak tempuh
- Waktu tempuh

BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH PELAKSANAAN PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT DI KABUPATEN NGAWI

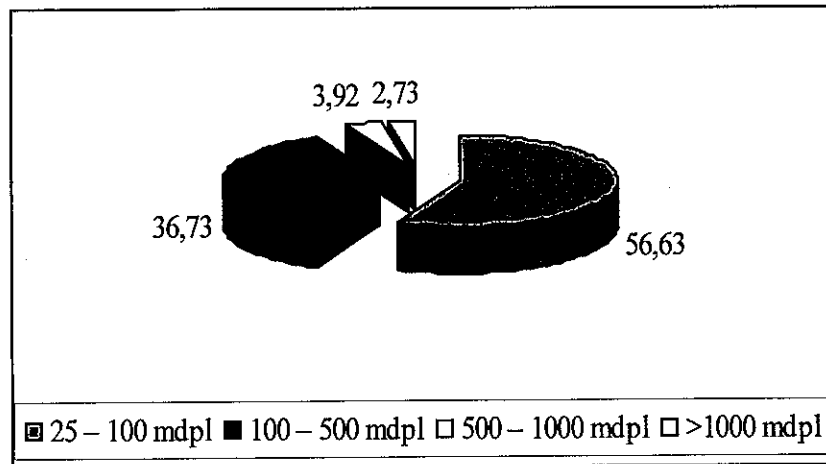
3.1 Kondisi Geografis Kabupaten Ngawi

Kabupaten Ngawi merupakan bagian wilayah Propinsi Jawa Timur yang letaknya berbatasan dengan Propinsi Jawa Tengah, terbentang antara 7°21' - 7°31' Lintang Selatan dan 110°10' - 111°40' Bujur Timur, dengan luas wilayah 1.295,98 km² (129.598 Ha). Struktur administrasi wilayah Kabupaten Ngawi terdiri dari 17 kecamatan, 213 desa dan 4 kelurahan. Batas-batas wilayah Kabupaten Ngawi, yaitu sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Blora dan Kabupaten Grobogan, Propinsi Jawa Tengah
- Sebelah Barat : Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah
- Sebelah Timur : Kabupaten Madiun, Propinsi Jawa Timur
- Sebelah Selatan : Kabupaten Madiun dan Kabupaten Magetan, Propinsi Jawa Timur

Kabupaten Ngawi terletak pada ketinggian 25 sampai dengan 3000 meter dari permukaan air laut, dengan sebagian besar wilayahnya berada pada ketinggian 25 sampai dengan 500 meter dari permukaan air laut yang cocok untuk areal pertanian dan sebagian lainnya berada pada lereng Gunung Lawu, yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Ketinggian 25 – 100 meter sebanyak 73.389 Ha (56,63 %)
- b. Ketinggian 100 – 500 meter sebanyak 47.600 Ha (36,73 %)
- c. Ketinggian 500 – 1000 meter sebanyak 5.075 Ha (3,92 %)
- d. Ketinggian lebih dari 1000 sebanyak 3.515 Ha (2,73 %)

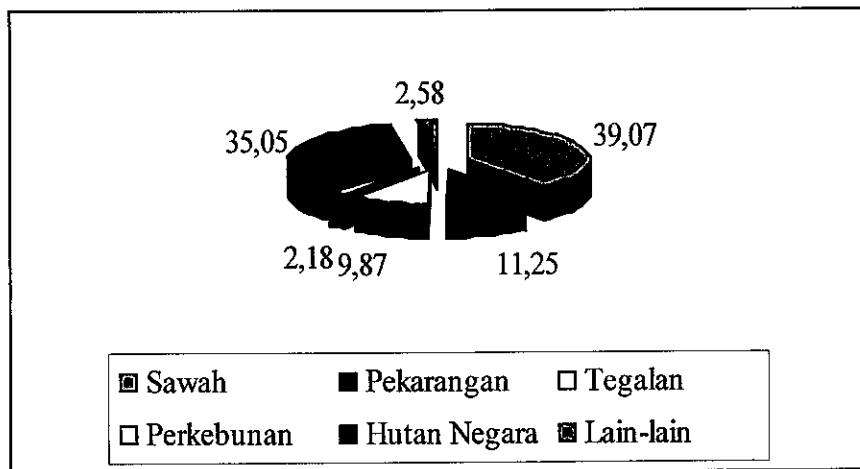


GAMBAR 3.1
WILAYAH KABUPATEN NGAWI BERDASARKAN KETINGGIAN
DARI PERMUKAAN AIR LAUT

Sumber : Kabupaten Ngawi Dalam Angka, diolah, BPS 2003

Sementara dari luas lahan di Kabupaten Ngawi seluas 129.598 Ha sebagian besar diperuntukkan untuk pertanian dan kehutanan dan sesuai dengan tata guna lahannya terbagi sebagai berikut :

- a. Sawah seluas : 50.639 Ha (39,07 %)
- b. Pekarangan seluas : 14.575 Ha (11,25 %)
- c. Tegalan seluas : 12.787 Ha (9,87 %)
- d. Hutan Negara seluas : 45.429 Ha (35,05 %)
- e. Perkebunan seluas : 2.826 Ha (2,18 %)
- f. Lain-lain seluas : 3.342 Ha (2,58 %)



GAMBAR 3.2
WILAYAH KABUPATEN NGAWI
BERDASARKAN PERUNTUKANNYA

Sumber : Kabupaten Ngawi Dalam Angka, diolah, BPS 2003

3.2. Potret Sektor Kehutanan Kabupaten Ngawi

Luas kawasan hutan Kabupaten Ngawi sebanyak 55.918,31 Ha (43%), terdiri dari kawasan hutan negara seluas 45.428,6 Ha (35%) dan kawasan hutan rakyat seluas 10.489,71 Ha (8%). Hutan negara tersebut terbagi atas 3 KPH yaitu; KPH Ngawi seluas 34.921,3 Ha, KPH Saradan seluas 5.198,9 Ha dan KPH Lawu DS seluas 5.308,4 Ha seperti terlihat pada Gambar 3.3

Keberadaan hutan sangat besar manfaatnya bagi masyarakat Kabupaten ngawi, dimana dari 217 desa/kelurahan terdapat 85 desa yang termasuk desa hutan, dimana masyarakat desa tersebut sangat menggantungkan hidupnya pada keberadaan hutan. Dari 85 desa hutan tersebut sebagian besar berada pada KPH Ngawi, sebagaimana terlihat pada Tabel III.1 berikut ini:

TABEL III.1
JUMLAH DESA HUTAN DI KABUPATEN NGAWI
DAN LUAS HUTANNYA

KPH	Desa	Kecamatan	Luas (Ha)	KPH	Desa	Kecamatan	Luas (Ha)
Ngawi	1 Ketanggung	Sine	130,80	Ngawi	44 Kedunggalar	Kedunggalar	18,50
	2 Jagir	Sine	404,10		45 Jati Gembol	Kedunggalar	345,00
	3 Krandegan	Ngrambe	659,20		46 Jenggrik	Kedunggalar	125,80
	4 Dawung	Jogorogo	227,40		47 Sambirejo	Mantingan	263,00
	5 Patalan	Kendal	1.716,20		48 Pengkol	Mantingan	432,60
	6 Majasem	Kendal	575,10		49 Tambakboyoy	Mantingan	515,40
	7 Guyung	Geneng	74,90		50 Pakah	Mantingan	1.076,80
	8 Widodaren	Geneng	466,30		51 Ngrancang	Mantingan	126,30
	9 Babadan	Paron	569,30		52 Jarak	Mantingan	55,90
	10 Kedungputri	Paron	292,40		53 Bulakpepe	Mantingan	123,30
	11 Semen	Paron	22,40		54 Gembol	Karanganyar	1.929,10
	12 Dimplangan	Pitu	92,70		55 Karanganyar	Karanganyar	3.290,70
	13 Pitu	Pitu	1.191,10		56 Mengger	Karanganyar	931,70
	14 Kalang	Pitu	168,60		57 Pandean	Karanganyar	4.156,90
	15 Cantel	Pitu	416,60		58 Sekarjati	Karanganyar	182,90
	16 Ngancar	Pitu	142,50		59 Kerek	Ngawi	120,60
	17 Papungan	Pitu	190,60	Saradan	1 Bringin	Bringin	509,30
	18 Karanggeneng	Pitu	704,60		2 Sumberbening	Bringin	1.386,70
	19 Bangunrejo Lor	Pitu	2.208,40		3 Krompol	Bringin	36,50
	20 Banjarbanggi	Pitu	313,70		4 Dero	Bringin	103,00
	21 Selopuro	Pitu	150,50		5 Dampit	Bringin	256,20
	22 Kauman	Widodaren	252,90		6 Kenongrejo	Bringin	1.141,50
	23 Widodaren	Widodaren	437,10		7 Lurowo	Karangjati	52,40
	24 Karangbanyu	Widodaren	510,50		8 Rejuno	Karangjati	1.304,40
	25 Sidolaju	Widodaren	474,60		9 Ploso	Karangjati	556,30
	26 Sekar Alas	Widodaren	145,70	Lawu Ds	1 Wonosari	Sine	824,90
	27 Banyubiru	Widodaren	983,50		2 Pandansari	Sine	135,90
	28 Gendingan	Widodaren	414,00		3 Girikerto	Sine	90,50
	29 Bulak	Widodaren	32,20		4 Pocol	Sine	64,60
	30 Kayutrejo	Widodaren	26,20		5 Sumbersari	Sine	46,60
	31 Gandong	Bringin	202,80		6 Kuniran	Sine	42,50
	32 Lego Wetan	Bringin	80,20		7 Tulakan	Sine	85,20
	33 Gunungsari	Padas	853,10		8 Hargosari	Sine	121,70
	34 Kasreman	Padas	71,80		9 Banjaran	Sine	207,50
	35 Kiyonten	Padas	216,20		10 Ngrendeng	Ngrambe	442,20
	36 Lego Kulon	Padas	116,10		11 Giriharjo	Ngrambe	11,60
	37 Kwadung Lor	Padas	77,60		12 Hargomulyo	Ngrambe	328,70
	38 Pacing	Padas	41,00		13 Tawangrejo	Ngrambe	14,90
	39 Begal	Kedunggalar	954,80		14 Sambirejo	Ngrambe	24,60
	40 Wonorejo	Kedunggalar	254,80		15 Kleiekan	Ngrambe	8,30
	41 Katikan	Kedunggalar	206,60		16 Karanggupito	Kendal	891,30
	42 Bangnrejo Kdl	Kedunggalar	885,60		17 Basri	Kendal	0,60
	43 Pelang Lor	Kedunggalar	398,50	Jumlah			45.428,60

Sumber : Potensi Sumber Daya Hutan Kab. Ngawi, PT. Perhutani 2001

Secara garis besar peruntukan kawasan hutan di Kabupaten Ngawi, berdasarkan fungsinya seluas 41.419,4 Ha bisa dimanfaatkan untuk produksi. Sedangkan hutan yang tidak untuk produksi seluas 4.009,2 Ha berfungsi sebagai kawasan lindung, hutan wisata, jalan dan lain-lain, seperti tersaji dalam Tabel III.2 beriku ini:

TABEL III.2
KAWASAN HUTAN NEGARA KABUPATEN NGAWI
BERDASARKAN FUNGSI

No.	KPH	Kelas Persh.	Luas Kawasan Hutan		
			Untuk Produksi	Bukan u. Prod	Jumlah
1.	Ngawi	Jati	34.202,8	718,5	34.921,3
2.	Saradan	Jati	5.007,2	191,7	5.198,9
3.	Lawu DS	Pinus	2.209,4	3.099,0	5.308,4
Jumlah			41.419,4	4.009,2	45.428,6

Sumber: *Potensi Sumber Daya Hutan Kab. Ngawi, PT. Perhutani 2001*

Sementara luas areal hutan yang non produktif di Kabupaten Ngawi cukup tinggi, yang tertinggi di KPH saradan yaitu 57,1 % dari luas areal hutan. Sedangkan di KHP Lawu terdapat areal yang tidak bisa tebang habis yaitu 5 % karena berada di daerah lereng gunung. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel III.3 berikut ini:

TABEL III.3
KONDISI HUTAN NEGARA KABUPATEN NGAWI

No	Kelas Hutan	KPH Ngawi		KPH Saradan		KPH Lawu DS	
		Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%
1	Produktif	15.693,94	44,9	1.798	34,6	1.715,9	32,3
2	Tdk Produktif	12.338,85	35,3	2.969,7	57,1	225,5	4,2
3	Tdk Baik u.Tebang Habis	0	0	0	0	267,9	5
4	Bukan untuk Prod Jati	6.170	17,7	239,5	4,6	-	-
5	Bukan u Produksi	718,51	2,1	191,7	3,7	3.099,0	58,2
Total		34.921,30	100	5.198,9	100	5.308,4	100

Sumber: *Potensi Sumber Daya Hutan Kab. Ngawi, PT. Perhutani 2001*

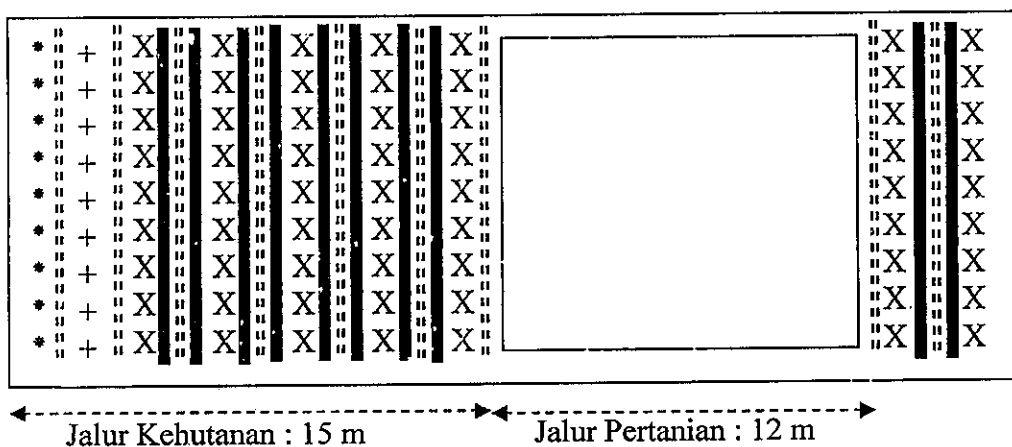
3.3 Jenis-Jenis Kegiatan PHBM

Dari kesepakatan tim, bentuk dan ragam kegiatan dalam pelaksanaan program PHBM Kabupaten Ngawi Tahun 2003 meliputi kegiatan non fisik berupa pendampingan dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dan kegiatan fisik berupa pembangunan kawasan hutan tidak produktif dengan pola “Plong-Plongan”. Pola “plong-plongan” ini merupakan salah satu bentuk aplikasi sistem *social forestry*, dimana kawasan hutan tidak hanya memberikan manfaat keuntungan finansial bagi perusahaan, tetapi kehutanan harus ikut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam implementasinya tidak seluruh kawasan hutan ditanami tanaman kehutanan tetapi diberikan ruang dengan lebar tertentu dalam bentuk “plong-plongan” (jalur pertanian) dengan tujuan sebagai wahana penduduk untuk meningkatkan pendapatan. Penduduk diberikan hak untuk mengelola lahan di jalur “plong-plongan” tersebut untuk menghasilkan bahan pangan, pakan ternak, kayu bakar, kayu pertukangan dan hasil-hasil produktif lainnya.

Jangka waktu keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan dan pemanfaatan jalur ‘plong-plongan’ tidak hanya sebatas 2 – 3 tahun sebagaimana model tumpangsari, tetapi dapat dikelola sampai 10, 15 bahkan sampai akhir daur. Masyarakat dalam kelompok-kelompok kerja, juga dilibatkan secara aktif mulai dari proses perencanaan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan bagi hasil kayu dalam posisi sebagai mitra kerja yang sejajar. Pelaksanaan pembangunan kawasan hutan tidak produktif dengan pola “plong-plongan” mengambil lokasi di 3 KPH yaitu meliputi wilayah KPH Ngawi, KPH Saradan dan KPH Lawu Ds :

1. KPH Ngawi

Mengingat kawasan hutan di KPH Ngawi dari dahulu merupakan kelas perusahaan hutan jati, dan arealnya cukup subur dengan topografi datar-landai, pola “plong-plongan” yang diterapkan adalah model III, dengan lebar jalur kehutanan 15 meter dan jalur pertanian 12 meter. Pola pemanfaatan lahan pada jalur kehutanan dengan tanaman pokok jati jarak tanam 3 x 1 meter, sedangkan pada jalur pertanian selama 2 - 3 tahun ditanami tanaman pertanian, setelah itu dapat ditanami tanaman pangan tahan teduh maupun tanaman penghasil kayu bakar maupun kayu pertukangan.



Keterangan :

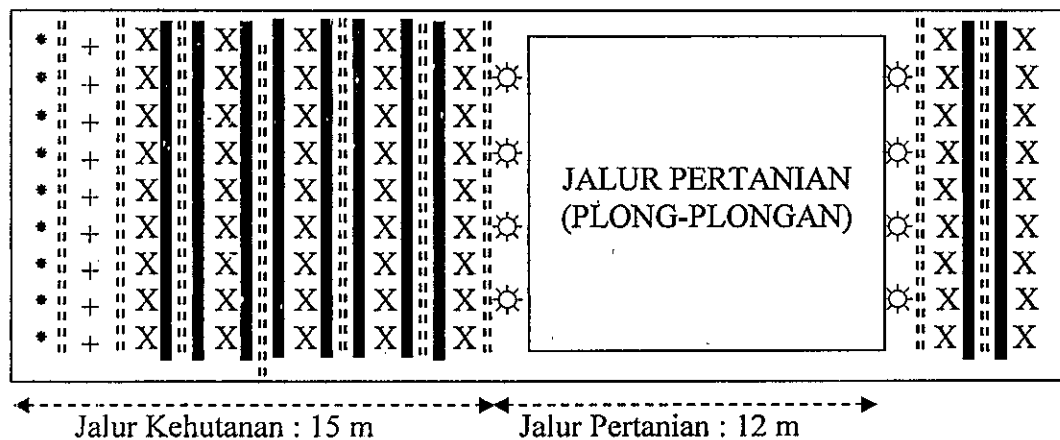
- | | | |
|------|-----------------------------|--|
| ** | : Jalur Tanaman Pagar | : Acacia arabica dengan jarak 1 x 0.5 mtr |
| ++ | : Jalur Tanaman Tepi | : Mahoni, dengan jarak 1 mtr, setiap 4 meter ditanami suren/mindi/johar/tan. buah |
| XXX | : Jalur Tanaman Pokok | : Tanaman Jati dengan Jarak Tanam 3 x 1 m |
| ==== | : Jalur Tanaman Sela | : Tanaman Lamtoro atau tanaman pakan ternak |
| ■ | : Jalur Tanaman Tumpangsari | : a. Tanaman Pertanian 2 – 3 tahun
b. Setelah itu tanaman pangan tahan teduh |
| □ | : Jalur Pertanian | : a. Tanaman pangan 5 – 10 tahun
b. Tanaman pangan tahan teduh
c. Tanaman kayu bakar/kayu pertukangan setelah tahun ke-3 (<i>Acacia mangium</i>) |

GAMBAR 3.4
POLA PLONG-PLONGAN DI KPH NGAWI

Sumber : Program PHBM Kabupaten Ngawi 2001

2. KPH Saradan

Mengingat kondisi spesifik kawasan hutan di KPH saradan disamping sebagai penghasil kayu, juga sebagai kawasan *catchment* area Waduk Pondok - Sangiran, maka pengelolaan hutan yang diterapkan menggunakan model V dengan lebar jalur kehutanan 15 meter dan jalur pertanian 12 meter. Yang membedakan dengan model di KPH Ngawi adalah adanya penanaman Sono Siso maupun Sono Kembang di antara larikan tanaman pokok jati untuk meningkatkan produksi humus dan menjaga erosi di *catchment* area waduk.



Keterangan :

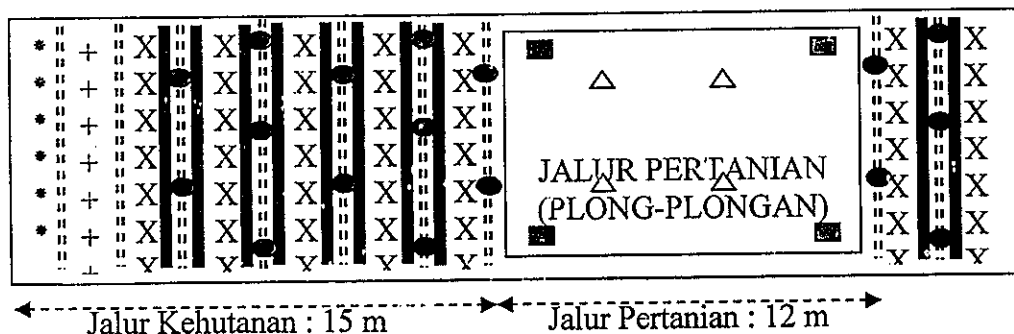
- * * : Jalur Tanaman Pagar : Acacia arabica dengan jarak 1 x 0.5 mtr
- + + : Jalur Tanaman Tepi : Mahoni, dengan jarak 1 mtr, setiap 4 meter ditanami suren/mindi/johar/tan. buah
- XXX: Jalur Tanaman Pokok : Tanaman Jati dengan Jarak Tanam 3 x 1 m
- ==== : Jalur Tanaman Sela : Tanaman Larntoro atau tanaman pakan ternak
- ☼☼☼ : Tanaman Pelindung : Sono Siso atau Sono Kembang ditepi plong-plongan jarak tiap 2 m
- : Jalur Tanaman : a. Tanaman Pertanian 2 – 3 tahun
Tumpangsari b. Setelah itu tanaman pangan tahan teduh
- : Jalur Pertanian : a. Tanaman pangan 5 – 10 tahun
b. Tanaman pangan tahan teduh
c. Tanaman kayu bakar/kayu pertukangan setelah tahun ke-3 (*Acacia mangium*)

GAMBAR 3.5
POLA PLONG-PLONGAN DI KPH SARADAN

Sumber : Program PHBM Kabupaten Nguwi 2001

3. KPH Lawu Ds

Wilayah hutan di KPH Lawu Ds merupakan kelas perusahaan pinus dengan topografi berbukit-bukit dan bergunung-gunung. Model pengelolaan hutan yang diterapkan adalah model III dengan lebar jalur kehutanan 15 meter dan jalur pertanian 12 meter. Mengingat kondisi wilayah yang rawan bahaya erosi dan tanah longsor, maka sejak tahun pertama pada jalur pertanian selain ditanami tanaman pertanian juga ditanami tanaman kehutanan setempat yang sudah terbukti tumbuh baik dan disukai masyarakat seperti jenis Suren.



Keterangan :

- * * : Jalur Tanaman Pagar : Acacia arabica dengan jarak 1 x 0.5 mtr
- ++ : Jalur Tanaman Tepi : Mahoni, dengan jarak 1 mtr, setiap 4 meter ditanami suren/mindi/johar/tan. buah
- XXX: Jalur Tanaman Pokok : Tanaman Pinus Merkusii dengan jarak tanam 2x1
- === : Jalur Tanaman Sela : Tanaman Lamtoro atau tanaman pakan ternak
- : Jalur Tanaman : a. Tanaman Pertanian 2 – 3 tahun
Tumpangsari b. Setelah itu tanaman pangan tahan teduh
- : Jalur Pertanian : a. Tanaman pangan 5 – 10 tahun
b. Setelah ternaungi tanaman pokok, ditanami tanaman pangan tahan teduh/pakan ternak
- : Tanaman plong-plongan: Suren jarak 9 x 4 m, ditanam tahun ke-1 bersama-sama tanaman pokok
- △△ : Tanaman plong-plongan: Cengkeh jarak 3 x 4 m, ditanam tahun ke-1 bersama-sama tanaman pokok
- : Tanaman pengisi : Puspa dengan jarak 3 x 4 m, ditanam tahun ke-1 bersama-sama tanaman pokok

GAMBAR 3.6
POLA PLONG-PLONGAN DI KPH NGAWI

Sumber : Program PHBM Kabupaten Ngawi 2001

3.4 Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian terdiri dari 3 KPH yang berada di Kabupaten Ngawi yang telah dilaksanakan program PHBM yang meliputi 9 desa yang tersebar pada 3 Kecamatan, dengan jumlah penduduk 39.310 jiwa, laki-laki 18.616 jiwa dan perempuan 20.694 jiwa, seperti pada tabel berikut ini:

TABEL III.4
JUMLAH PENDUDUK

No.	Desa	Kecamatan	Laki	Perempuan	Jumlah
1	KPH Ngawi				
1	Tambakboyoy	Mantingan	3.872	4.063	7.935
2	Pakah	Mantingan	2.979	2.913	5.892
3	Sambirejo	Mantingan	3.057	4.548	7.605
4	Jagir	Sine	3.185	3.405	6.590
	KPH Saradan				
5	Dero	Bringin	1.376	1.486	2.862
6	Krompol	Bringin	1.165	1.215	2.380
	KPH Lawu DS				
7	Pandansari	Sine	929	958	1.887
8	Girikerto	Sine	1.076	1.126	2.202
9	Pocol	Sine	977	980	1.957
	Jumlah		18.616	20.694	39.310

Sumber : Kecamatan Dalam Angka, BPS 2001

Jumlah keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1 di desa-desa lokasi penelitian cukup tinggi yaitu 44,17 % dari jumlah KK, ini menandakan bahwa desa tersebut masih tergolong desa miskin. Keberadaan hutan yang merupakan sumber devisa negara pada kenyataannya belum mampu meningkatkan kesejahteraannya. Justru kondisi hutan menyebabkan desa-desa mereka terisolasi dengan desa-desa lain dan jauh dari pusat-pusat pertumbuhan. Kondisi yang terisolasi tersebut semakin membuat desa-desa tersebut sulit berkembang mengikuti desa lain yang jauh dari hutan. Kesejahteraan masyarakat desa hutan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL III.5
JUMLAH KELUARGA PRA KELUARGA SEJAHTERA DAN
KELUARGA SEJAHTERA I

No.	Desa	Kec.	Pra KS + KS I	Jml KK	Persen (%)
1	KPH Ngawi				
1	Tambakboyo	Mantingan	691	1.527	45,25
2	Pakah	Mantingan	754	1.171	64,39
3	Sambirejo	Mantingan	272	1.640	16,59
4	Jagir	Sine	549	1.771	31,00
	KPH Saradan				
5	Dero	Bringin	652	692	94,22
6	Krompol	Bringin	610	672	90,77
	KPH Lawu DS				
7	Pandansari	Sine	149	494	30,16
8	Girikerto	Sine	107	483	22,15
9	Pocol	Sine	173	508	34,06
	Jumlah		3.957	8.958	44,17

Sumber: Kecamatan Dalam Angka, BPS 2001

Jumlah sarana pendidikan cukup memadai dimana setiap desa sudah terdapat TK dan SD. Untuk SMP dan SMU banyak yang belum tersedia karena cakupan wilayah untuk penyediaan sarana tersebut harus terdiri dari beberapa desa dengan standar yang sudah ada, seperti pada tabel berikut ini:

TABEL III.6
JUMLAH SARANA PENDIDIKAN

No.	Desa	Kecamatan	TK	SD	SMP	SMU
	KPH Ngawi					
1	Tambakboyo	Mantingan	2	5	2	0
2	Pakah	Mantingan	1	4	1	0
3	Sambirejo	Mantingan	6	6	1	0
4	Jagir	Sine	4	6	1	0
	KPH Saradan					
5	Dero	Bringin	1	3	0	0
6	Krompol	Bringin	2	2	1	0
	KPH Lawu DS					
7	Pandansari	Sine	2	1	0	0
8	Girikerto	Sine	2	2	0	0
9	Pocol	Sine	1	2	0	0
	Jumlah		21	31	6	0

Sumber: Kecamatan Dalam Angka, BPS 2001

Jumlah sarana kesehatan, untuk standar desa (Posyandu dan Polindes) tergolong cukup memadai, namun ada beberapa desa yang belum tersedia polindes, seperti terlihat pada tabel berikut ini:

TABEL III.7
JUMLAH SARANA KESEHATAN

No.	Desa	Kecamatan	Pus-kesmas	Pustu	Praktek Dokter	Praktek Bidan	Pos-yandu	Polindes
1	KPH Ngawi							
1	Tambakboyo	Mantingan	1	0	1	1	9	0
2	Pakah	Mantingan	0	0	0	1	1	1
3	Sambirejo	Mantingan	1	0	3	1	7	0
4	Jagir	Sine	0	1	0	1	4	0
	KPH Saradan							
5	Dero	Bringin	0	0	0	1	2	1
6	Krompol	Bringin	0	1	0	1	4	0
	KPH Lawu DS							
7	Pandansari	Sine	0	0	0	0	3	1
8	Girikerto	Sine	0	0	0	0	1	1
9	Pocol	Sine	0	0	0	0	0	0
	Jumlah		2	2	4	6	31	4

Sumber: Kecamatan Dalam Angka, BPS 2001

3.5 Ringkasan Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dari data-data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kondisi kehutanan masih memprihatinkan dimana lebih dari 40 % hutan di Kabupaten Ngawi dalam kondisi rusak yang banyak disebabkan oleh kegiatan pencurian kayu. Tekanan sosial ekonomi masyarakat desa hutan merupakan salah satu penyebab pencurian kayu, dimana kesejahteraan masyarakat yang masih rendah yaitu 40 % masyarakat termasuk kategori kurang mampu / miskin. Sehingga menjadi beban yang besar terhadap kelestarian hutan.

Untuk mengatasi kondisi tersebut telah banyak dilakukan upaya pengelolaan hutan, namun belum menunjukkan keberhasilan. Kemudian di tahun 2001 telah dilaksanakan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat

(PHBM), yang merupakan pola pembangunan kehutanan yang berbasis kehutanan sosial yang telah dikombinasikan dengan pembangunan yang menampung aspirasi dari masyarakat desa hutan. Program inipun belum dapat diketahui tingkat keberhasilannya. Oleh karena itu studi ini akan mengkaji keberhasilan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat khususnya di Kabupaten Ngawi.

BAB IV

ANALISIS PENGARUH PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT (PHBM) TERHADAP KELESTARIAN KAWASAN HUTAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA HUTAN

Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat adalah suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama oleh Perhutani dan masyarakat desa hutan atau Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dengan jiwa berbagi, sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional, (SK Perhutani Nomor 136 Tahun 2001). Sedangkan tujuan dari program tersebut adalah menjaga kelestarian hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa hutan.

Program tersebut muncul setelah berbagai upaya pengelolaan hutan yang digulirkan tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Disamping itu program ini muncul seiring dengan perubahan paradigma pembangunan yang lebih demokratis, transparan dan mengedepankan aspirasi masyarakat desa hutan (*bottom up*) dengan memberikan peran dan tanggung jawab kepada masyarakat desa hutan di dalam pengelolaan hutan. Namun program ini belum diketahui keberhasilannya

Untuk mengetahui pelaksanaan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di Kabupaten Ngawi yang sudah berjalan tiga tahun dan mengkaji pengaruhnya terhadap kelestarian kawasan hutan dan kesejahteraan masyarakat desa hutan, maka dilakukan dengan beberapa analisa antara lain :

4.1 Analisis Korelasi antara Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat, Kelestarian Kawasan Hutan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Hutan

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antar variabel yaitu variabel PHBM, kelestarian kawasan hutan dan kesejahteraan masyarakat desa hutan. Dan juga analisis ini dilakukan untuk membuktikan bahwa perubahan pada variabel kelestarian kawasan hutan dan kesejahteraan masyarakat desa hutan banyak disebabkan oleh variabel PHBM. Untuk mengetahui hubungan antar variabel tersebut dilakukan dengan analisis korelasi pada masing-masing Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH).

Didalam analisis ini input data yang diperoleh adalah data primer dengan memberikan daftar kuesioner kepada 100 responden, yang terbagi secara proporsional kedalam 3 desa yang mewakili 3 KPH. Untuk Desa Sambirejo yang mewakili KPH Ngawi berjumlah 50 responden, Desa Krompol yang mewakili KPH Saradan berjumlah 29 responden dan Desa Pandansari yang mewakili KPH Lawu DS berjumlah 21 responden Teknik analisisnya adalah mencari angka korelasi (r), kemudian dirumuskan berdasarkan parameter sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui koefisien korelasi dapat dirumuskan dengan berpedoman koefisien korelasi menurut Sugiono (2000) sebagai berikut:

TEBEL IV.1
PEDOMAN INTERPRETASI KOEFISIEN KORELASI

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat kuat

Sumber : Buku Metode Penelitian Administrasi, Sugiono, 2004

2. Arah korelasi bernilai (+) berarti berkorelasi searah, dimana apabila salah satu variabel meningkat akan mempengaruhi peningkatan variabel yang lain. Arah korelasi bernilai (-) berarti berkorelasi tidak searah/berlawanan, dimana apabila salah satu variabel meningkat maka variabel lain menurun.
3. Untuk mengetahui tingkat signifikansi hubungan antar variabel dilihat dengan angka probabilitas. Apabila angka probabilitasnya $< 0,05$ maka hubungannya signifikan, dan sebaliknya apabila angka probabilitasnya $> 0,05$ maka hubungan antar variabel tidak signifikan.

4.1.1 Analisis Korelasi di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Ngawi

KPH Ngawi adalah salah satu dari tiga Kesatuan Pemangkuan Hutan yang berada di wilayah Kabupaten Ngawi yang mempunyai luasan yang paling luas, sehingga keberadaannya sangat mempengaruhi sebagian besar kondisi sosial ekonomi masyarakat desa hutan di Kabupaten Ngawi.

Berdasarkan data kuesioner terhadap 50 responden, persepsi masyarakat terhadap keberhasilan program, 54% responden menyatakan program PHBM berhasil, 38% menyatakan kurang berhasil dan 8% menyatakan tidak berhasil. Kemudian persepsi masyarakat terhadap perubahan kelestarian setelah PHBM, 50% responden menyatakan perubahannya besar, 42% menyatakan perubahannya sedang dan 8% menyatakan tidak terjadi perubahan. Persepsi masyarakat terhadap peningkatan pendapatan setelah PHBM, 44% responden menyatakan pendapatan meningkat banyak, 56% responden menyatakan cukup dan 0% yang menyatakan tidak ada peningkatan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel IV.2 berikut ini:

TABEL IV.2
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PHBM, KELESTARIAN HUTAN
DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KPH NGAWI

No.	Instrumen	Persepsi					
Persepsi terhadap PHBM							
1.	Pemahaman terhadap maksud dan tujuan PHBM	Paham		Kurang paham		Tidak paham	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%
		24	48	21	42	5	10
2.	Keterlibatan terhadap program PHBM	Terlibat		Kadang-kadang		Tdk terlibat	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%
		36	70	10	20	4	8
3.	Dukungan terhadap Program PHBM	Mendukung		Krg mendukung		Tdk mendukung	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%
		26	52	13	26	11	22
4.	Keberhasilan Program PHBM	Berhasil		Krg berhasil		Tdk berhasil	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%
		27	54	19	38	4	8
5.	Metoda yang diterapkan	Setuju		kurang setuju		Tidak setuju	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%
		36	72	10	20	4	8
Persepsi terhadap kelestarian hutan							
1.	Upaya penanaman hutan setelah program PHBM	Banyak		Sedang		Tidak ada	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%
		41	82	7	14	2	4
2.	Perubahan kelestarian hutan setelah PHBM	Besar		Sedang		Tidak ada	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%
		25	50	21	42	4	8
3.	Sistem pengamanan hutan dalam program PHBM	Tepat		Kurang tepat		Tidak tepat	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%
		26	52	17	34	7	14
4.	Pelibahan masyarakat dalam pengamanan hutan setelah PHBM	Dilibatkan		Kadang-kadang		Tidak pernah	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%
		19	38	20	40	11	22
5.	Pencurian kayu setelah program PHBM	Tidak ada		Berkurang		sering	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%
		0	0	37	74	13	26
Persepsi terhadap kesejahteraan masyarakat							
1.	Peningkatan pendapatan setelah program PHBM	Banyak		Cukup		Tidak ada	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%
		22	44	28	56	0	0
2.	Kemampuan menyekolahkan anak	Mampu		Kurang mampu		Tidak mampu	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%
		3	6	23	46	24	48
3.	Kemampuan menyekolahkan anak setingkat	SMA		SMP		SD	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%
		6	12	25	50	19	38
4.	Pendapatan dari PHBM terhadap biaya sekolah	Sgt membantu		Cukup membantu		Tdk membantu	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%
		16	32	28	56	6	12
5.	Peran PHBM terhadap pelayanan kesehatan	Sgt membantu		Cukup membantu		Tdk membantu	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%
		12	24	26	52	12	24

Sumber : Olahan data promer, 2005

Dari tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa hubungan antara program PHBM, kelestarian dan kesejahteraan adalah cukup kuat, dimana rata-rata responden memberikan respon yang positif terhadap program PHBM.

Namun untuk lebih jelasnya hubungan antara program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat, kelestarian kawasan hutan dan kesejahteraan masyarakat desa hutan di KPH Ngawi, dilakukan dengan analisis korelasi, yang hasilnya dapat dilihat dalam Tabel IV.3 di bawah ini:

TABEL IV.3
ANALISIS KORELASI DI KPH NGAWI

Correlations				
		PHBM	Kelestarian Kawasan Hutan	Kesejahteraan Masyarakat
PHBM	Pearson Correlation	1,000	,683**	,650**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000
	N	50	50	50
Kelestarian Kawasan Hutan	Pearson Correlation	,683**	1,000	,530**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000
	N	50	50	50
Kesejahteraan Masyarakat	Pearson Correlation	,650**	,530**	1,000
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	
	N	50	50	50

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Hasil analisis korelasi dengan SPSS.10 for Windows, 2005

Dari tabel analisis korelasi diatas dapat diketahui bahwa:

1. Hubungan antara PHBM dengan kelestarian kawasan hutan sebesar + 0,683, termasuk kategori kuat. Hubungan antara PHBM dengan kesejahteraan masyarakat desa hutan sebesar + 0,650 termasuk kategori kuat. Hubungan antara kelestarian kawasan hutan dengan kesejahteraan masyarakat desa hutan sebesar +0,530 termasuk kategori sedang.

2. Arah korelasi bernilai (+) berarti berkorelasi searah, apabila salah satu variabel meningkat akan mempengaruhi peningkatan variabel yang lain.
3. Hubungan antar variabel mempunyai korelasi yang signifikan dimana seluruh hubungan antar variabel mempunyai angka probabilitas 0,000 jauh dibawah angka 0,05, selain itu tanda ** dapat diartikan angka korelasi yang signifikan.

4.1.2 Analisis Korelasi di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Saradan

Untuk mengetahui persepsi masyarakat di KPH Saradan terhadap program PHBM, kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat, dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada 29 responden di Desa Krompol. Persepsi masyarakat terhadap pemahaman terhadap maksud dan tujuan PHBM, 52% responden pahan, 34% menyatakan kurang pahan dan 14% tidak pahan. Persepsi masyarakat terhadap keberhasilan program PHBM adalah 52% responden menyatakan berhasil, 28% menyatakan kurang berhasil dan 21% menyatakan tidak berhasil.

Persepsi masyarakat terhadap perubahan kelestarian adalah 48% menyatakan besar perubahannya, 45% menyatakan perubahannya sedan dan 7% menyatakan tidak ada perubahan. Kemudian persepsi terhadap peningkatan pendapatan, 48% responden menyatakan banyak mengalami peningkatan pendapatan, 48% menyatakan cukup dan 3% menyatakan tidak ada peningkatan. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel IV.4 berikut ini:

UPT-PUSTAK-UNDIP

TABEL IV.4
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PHBM, KELESTARIAN HUTAN
DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KPH SARADAN

No.	Instrumen	Persepsi					
Persepsi terhadap PHBM							
1.	Pemahaman terhadap maksud dan tujuan PHBM	Paham		Kurang paham		Tidak paham	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%
		15	52	10	34	4	14
2.	Keterlibatan terhadap program PHBM	Terlibat		Kadang-kadang		Tdk terlibat	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%
		13	45	14	48	2	7
3.	Dukungan terhadap Program PHBM	Mendukung		Krg mendukung		Tdk mendukung	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%
		20	69	8	28	1	3
4.	Keberhasilan Program PHBM	Berhasil		Krg berhasil		Tdk berhasil	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%
		15	52	8	28	6	21
5.	Metoda yang diterapkan	Setuju		Kurang setuju		Tidak setuju	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%
		21	72	7	24	1	3
Persepsi terhadap kelestarian hutan							
1.	Upaya penanaman hutan setelah program PHBM	Banyak		Sedang		Tidak ada	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%
		16	55	13	45	0	7
2.	Perubahan kelestarian hutan setelah PHBM	Besar		Sedang		Tidak ada	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%
		14	48	13	45	2	7
3.	Sistem pengamanan hutan dalam program PHBM	Tepat		Kurang tepat		Tidak tepat	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%
		12	41	9	31	8	28
4.	Pelibatan masyarakat dalam pengamanan hutan setelah PHBM	Dilibatkan		Kadang-kadang		Tidak pernah	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%
		19	66	5	17	5	17
5.	Pencurian kayu setelah program PHBM	Tidak ada		Berkurang		Sering	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%
		0	0	9	31	20	69
Persepsi terhadap kesejahteraan masyarakat							
1.	Peningkatan pendapatan setelah program PHBM	Banyak		Cukup		Tidak ada	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%
		14	48	14	48	1	3
2.	Kemampuan menyekolahkan anak	Mampu		Kurang mampu		Tidak mampu	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%
		2	7	9	31	18	62
3.	Kemampuan menyekolahkan anak setingkat	SMA		SMP		SD	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%
		2	7	10	34	17	59
4.	Pendapatan dari PHBM terhadap biaya sekolah	Sgt membantu		Cukup membantu		Tdk membantu	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%
		9	31	15	52	5	17
5.	Peran PHBM terhadap pelayanan kesehatan	Sgt membantu		Cukup membantu		Tdk membantu	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%
		6	21	14	48	9	31

Sumber : Olahan data primer, 2005

Untuk lebih mengetahui seberapa besar hubungan antara program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat, kelestarian kawasan hutan dan kesejahteraan masyarakat desa hutan di KPH Saradar, dilakukan dengan analisis korelasi, yang hasilnya dapat dilihat dalam Tabel IV.5 di bawah ini:

TABEL IV.5
ANALISIS KORELASI DI KPH SARADAN

Correlations				
		PHBM	Kelestarian Kawasan Hutan	Kesejahteraan Masyarakat
PHBM	Pearson Correlation	1,000	,619**	,664**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000
	N	29	29	29
Kelestarian Kawasan Hutan	Pearson Correlation	,619**	1,000	,537**
	Sig. (2-tailed)	,000		,003
	N	29	29	29
Kesejahteraan Masyarakat	Pearson Correlation	,664**	,537**	1,000
	Sig. (2-tailed)	,000	,003	
	N	29	29	29

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Hasil analisis korelasi dengan SPSS.10 for Windows, 2005

Dari tabel analisis korelasi diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Hubungan antara PHBM dengan kelestarian kawasan hutan sebesar + 0,619 termasuk kategori kuat. Hubungan antara PHBM dengan kesejahteraan masyarakat desa hutan sebesar + 0,654 termasuk kategori kuat. Hubungan antara kelestarian kawasan hutan dengan kesejahteraan masyarakat desa hutan sebesar + 0,537 termasuk kategori sedang.
2. Arah korelasi bernilai (+) berarti antar variabel mempunyai hubungan yang searah, apabila salah satu variabel meningkat akan menyebabkan peningkatan pada variabel yang lain.

3. Hubungan antar variabel mempunyai korelasi yang signifikan, ditandai dengan hubungan antara program PHBM dengan kelestarian kawasan hutan dan juga hubungan antara program PHBM dengan kesejahteraan masyarakat desa hutan mempunyai angka probabilitas 0,000 jauh di bawah 0,005. Hubungan yang signifikan juga terjadi pada hubungan antara kelestarian kawasan hutan dengan kesejahteraan masyarakat desa hutan yang mempunyai angka probabilitas 0,003 yang masih jauh di bawah 0,05, selain itu tanda ** dapat diartikan angka korelasi yang signifikan.

4.1.3 Analisis Korelasi di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Lawu DS.

Dari data kuesioner yang diberikan kepada 21 responden di Desa Pandansari Kecamatan Sine, dapat diketahui bahwa hubungan antara program PHBM, kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat adalah cukup kuat. Persepsi masyarakat terhadap pemahaman maksud dan tujuan program PHBM, 71% responden menyatakan paham terhadap maksud dan tujuan program, 19% menyatakan kurang paham dan 10% menyatakan tidak paham. Persepsi masyarakat terhadap keberhasilan program PHBM, 57% responden menyatakan berhasil, 38% menyatakan kurang berhasil dan 5% menyatakan tidak berhasil.

Persepsi masyarakat terhadap perubahan kelestarian setelah program PHBM, 48% responden menyatakan perubahan yang besar, 48% menyatakan perubahan sedang dan 5% menyatakan tidak ada perubahan. Persepsi masyarakat terhadap peningkatan pendapatan adalah 43% responden menyatakan meningkat banyak, 57% menyatakan cukup meningkat dan 0% yang menyatakan tidak meningkat. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel IV.6 berikut ini:

TABEL IV.6
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PHBM, KELESTARIAN HUTAN
DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KPH LAWU DS

No.	Instrumen	Persepsi					
Persepsi terhadap PHBM							
1.	Pemahaman terhadap maksud dan tujuan PHBM	Paham		Kurang paham		Tidak paham	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%
		15	71	4	19	2	10
2.	Keterlibatan terhadap program PHBM	Terlibat		Kadang-kadang		Tdk terlibat	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%
		14	67	4	19	3	14
3.	Dukungan terhadap Program PHBM	Mendukung		Krg mendukung		Tdk mendukung	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%
		15	71	5	24	1	5
4.	Keberhasilan Program PHBM	Berhasil		Krg berhasil		Tdk berhasil	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%
		12	57	8	38	1	5
5.	Metoda yang diterapkan	Setuju		Kurang setuju		Tidak setuju	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%
		16	76	3	14	2	10
Persepsi terhadap kelestarian hutan							
1.	Upaya penanaman hutan setelah program PHBM	Banyak		Sedang		Tidak ada	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%
		13	62	8	38	0	0
2.	Perubahan kelestarian hutan setelah PHBM	Besar		Sedang		Tidak ada	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%
		10	48	10	48	1	5
3.	Sistem pengamanan hutan dalam program PHBM	Tepat		Kurang tepat		Tidak tepat	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%
		10	48	8	38	3	14
4.	Pelibahan masyarakat dalam pengamanan hutan setelah PHBM	Dilibatkan		Kadang-kadang		Tidak pernah	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%
		18	86	0	0	3	14
5.	Pencurian kayu setelah program PHBM	Tidak ada		Berkurang		sering	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%
		0	0	4	19	17	81
Persepsi terhadap kesejahteraan masyarakat							
1.	Peningkatan pendapatan setelah program PHBM	Banyak		Cukup		Tidak ada	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%
		9	43	12	57	0	0
2.	Kemampuan menyekolahkan anak	Mampu		Kurang mampu		Tidak mampu	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%
		2	10	12	57	7	33
3.	Kemampuan menyekolahkan anak setingkat	SMA		SMP		SD	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%
		3	14	10	48	8	38
4.	Pendapatan dari PHBM terhadap biaya sekolah	Sgt membantu		Cukup membantu		Tdk membantu	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%
		8	38	10	48	3	14
5.	Peran PHBM terhadap pelayanan kesehatan	Sgt membantu		Cukup membantu		Tdk membantu	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%
		5	24	9	43	7	33

Sumber : Olahan data primer, 2005

Untuk lebih jelasnya mengenai hubungan antara program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat, kelestarian kawasan hutan dan kesejahteraan masyarakat desa hutan di KPH Lawu DS, dilakukan dengan analisis korelasi, yang hasilnya dapat dilihat dalam Tabel IV.7 di bawah ini:

TABEL IV.7
ANALISIS KORELASI DI KPH LAWU DS

Correlations				
		PHBM	Kelestarian Kawasan Hutan	Kesejahteraan Masyarakat
PHBM	Pearson Correlation	1,000	,650**	,603**
	Sig. (2-tailed)		,001	,004
	N	21	21	21
Kelestarian Kawasan Hutan	Pearson Correlation	,650**	1,000	,657**
	Sig. (2-tailed)	,001		,001
	N	21	21	21
Kesejahteraan Masyarakat	Pearson Correlation	,603**	,657**	1,000
	Sig. (2-tailed)	,004	,001	
	N	21	21	21

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Hasil analisis korelasi dengan SPSS.10 for Windows, 2005

Dari tabel analisis diatas dapat terlihat bahwa:

1. Hubungan antara PHBM, kelestarian kawasan hutan dan kesejahteraan masyarakat desa hutan termasuk kategori kuat karena nilainya di atas 0,60 yang menunjukkan hubungan yang kuat.
2. Arah korelasi bernilai (+) berarti antar variabel mempunyai hubungan yang searah, apabila salah satu variabel meningkat akan menyebabkan peningkatan pada variabel yang lain.
3. Sedangkan hubungan antar variabel mempunyai korelasi yang signifikan, ditandai dengan hubungan antara program PHBM dengan kelestarian kawasan

hutan dan juga hubungan antara kelestarian kawasan hutan dengan kesejahteraan masyarakat desa hutan mempunyai angka probabilitas 0,001 jauh di bawah 0,005. Hubungan yang signifikan juga terjadi pada hubungan antara program PHBM dengan kesejahteraan masyarakat desa hutan yang mempunyai angka probabilitas 0,004 yang masih jauh di bawah 0,05, selain itu tanda ** dapat diartikan angka korelasi yang signifikan.

4.1.4 Kesimpulan Analisis Korelasi antara Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat, kelestarian kawasan hutan dan kesejahteraan masyarakat desa hutan.

Dari analisis korelasi pada masing-masing KPH di Wilayah Kabupaten Ngawi dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara program PHBM, kelestarian kawasan hutan dan kesejahteraan masyarakat desa hutan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel IV. 8 berikut ini:

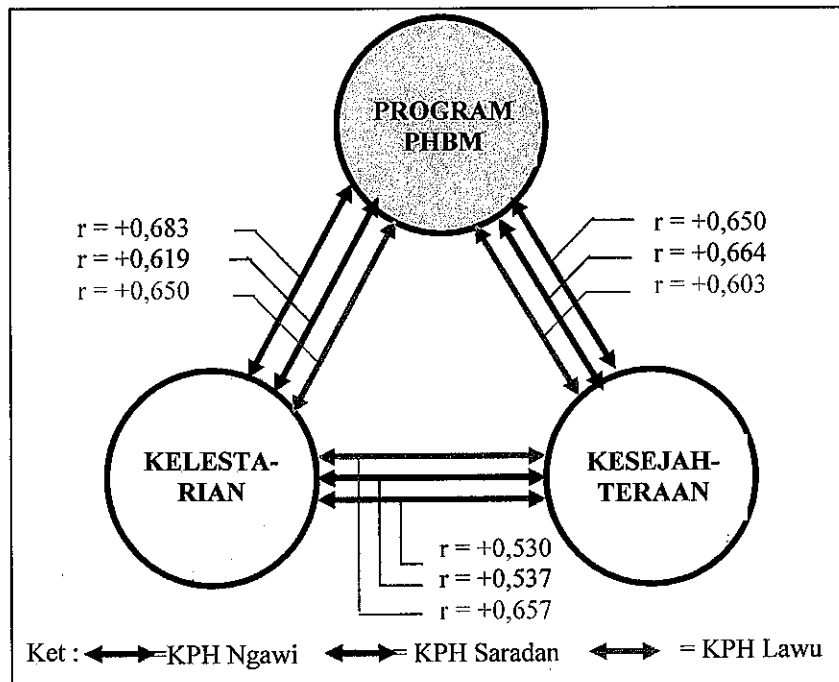
TABEL IV.8
HASIL PERHITUNGAN KORELASI

Hubungan antar variabel	KPH Ngawi			KPH Saradan			KPH Lawu DS		
	Korelasi	Arah	Probabilitas	Korelasi	Arah	Probabilitas	Korelasi	Arah	Probabilitas
PHBM dg Kelestarian	Kuat	+	Signifikan	Kuat	+	Signifikan	Kuat	+	Signifikan
PHBM dg Kesejahteraan	Kuat	+	Signifikan	Kuat	+	Signifikan	Kuat	+	Signifikan
Kelestarian dg Kesejahteraan	Sedang	+	Signifikan	Sedang	+	Signifikan	Kuat	+	Signifikan

Sumber : Hasil Analisis, 2005

Dari hasil analisis korelasi diatas dapat disimpulkan hubungan antara PHBN, kelestarian kawasan hutan dan kesejahteraan masyarakat desa hutan adalah kuat dan signifikan untuk semua Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) di Kabupaten Ngawi. Arah korelasinya positif, berarti peningkatan salah satu

variabel menyebabkan meningkatnya variabel yang lainnya. Sehingga penelitian ini dapat dilanjutkan untuk mengetahui kondisi pelaksanaan Program PHBM.



GAMBAR 4.1
BAGAN KORELASI ANTARA PHBM, KELESTARIAN
KAWASAN HUTAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DESA HUTAN DI KABUPATEN NGAWI

Sumber : Hasil analisis, 2005

4.2 Analisis Pengaruh Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat terhadap Kelestarian Kawasan Hutan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Hutan

Untuk mengkaji pengaruh program PHBM terhadap kelestarian kawasan hutan dan kesejahteraan masyarakat desa hutan, dilakukan dengan menganalisa kondisi desa-desa yang telah dilaksanakan program tersebut, dengan melakukan pengurangan terhadap kondisi sesudah pelaksanaan program dengan kondisi sebelum pelaksanaan program. Dengan indikator kelestarian kawasan hutan

adalah perubahan lahan non produktif dan perubahan tingkat pencurian kayu. Sedangkan indikator kesejahteraan masyarakat desa hutan adalah menggunakan model *Human Development Index (HDI)*, yang merupakan perhitungan dari beberapa indeks yang mempunyai indikator berbeda. Indikator tersebut adalah tingkat pendapatan masyarakat, tingkat pendidikan (angka melek huruf + rata-rata usia sekolah) dan tingkat harapan hidup.

4.2.1 Analisis Kelestarian Kawasan Hutan

Salah satu tujuan dari program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat adalah untuk menjaga kelestarian kawasan hutan. Sesuai dengan kajian yang telah dilakukan, indikator dari kelestarian kawasan hutan adalah perubahan lahan non produktif dan perubahan tingkat pencurian kayu hutan. Untuk mengetahui keberhasilan program tersebut dalam menjaga kelestarian kawasan hutan berdasarkan indikator yang ada, perlu dilakukan analisis dengan cara mengurangkan data setelah program dengan data sebelum program, kemudian dibagi dengan data sebelum program dikalikan 100 persen, seperti rumus berikut:

$$P = \frac{H_n - H_o}{H_o} \times 100$$

P = Perubahan

H_o = Kondisi sebelum program

H_n = Kondisi setelah program

a. Analisis Perubahan Lahan Non Produktif

Untuk menganalisa perubahan lahan non produktif dalam hal ini adalah tanah kosong, input data yang diperoleh adalah data sekunder dari instansi terkait,

yang merupakan data tahun 2000 (sebelum program) dan data tahun 2003 (setelah program). Dari data tersebut dilakukan analisa dengan mengurangi data tanah kosong sesudah program dengan data tanah kosong sebelum program PHBM, dan melakukan prosentase perubahannya.

Contoh perhitungan perubahan lahan non produktif di KPH Ngawi

$$P = \frac{7.367,75 - 7.650,25}{7.650,25} \times 100 = 3,75 \%$$

Jadi perubahan lahan non produktif di KPH Ngawi adalah 3,75 %

Hasil analisis selengkapanya untuk perubahan lahan non produktif pada di Kabupaten Ngawi dapat dilihat pada Tabel IV.9 berikut ini:

TABEL IV.9
ANALISIS PERUBAHAN LAHAN NON PRODUKTIF

No.	KPH	Luas (Ha)	Perubahan Lahan Non Produktif (tanah kosong)			
			Th. 2000 (Ha)	Th. 2003 (Ha)	Perubahan	%
1.	Ngawi	34.921,3	7.650,25	7.367,75	- 285,5	3,73
2.	Saradan	5.198,9	1.299,72	1.254,22	- 45,5	3,50
3.	Lawu DS	5.308,4	955,51	871,61	- 83,9	8,78
Jumlah		45.428,6	9.904,48	9.493,58	- 414,9	4,19

Sumber : Hasil Analisis, 2005

Dari tabel analisis perubahan lahan non produktif di atas dapat di ketahui bahwa dari tiga Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) yang berada pada wilayah Kabupaten Ngawi telah terjadi perubahan. Terlihat telah dilakukan penanaman tanah kosong di semua KPH, yang paling luas dilakukan di KPH Ngawi yaitu seluas 285,5 Ha dengan perubahan sebesar 3,73 %. Namun perubahan tertinggi terjadi di KPH Lawu DS dengan perubahan sebesar 8,78 %. Hal ini dikarenakan KPH Lawu berada pada lereng Gunung Lawu

yang mempunyai kemiringan yang cukup tinggi sehingga perlu diprioritaskan dalam pelaksanaan program PHBM ini. Dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa program PHBM mempunyai pengaruh positif terhadap perubahan lahan non produktif, dimana terjadi perubahan sebesar 419,9 Ha dengan prosentase perubahan sebesar 4,19%. Jadi analisis perubahan lahan non produktif bernilai positif untuk semua KPH di Kabupaten Ngawi

b. Analisis Perubahan Tingkat Pencurian Kayu

Untuk menganalisa perubahan tingkat pencurian kayu diperlukan input data sekunder dari instansi terkait, dengan melakukan pengurangan data sesudah program dengan data sebelum program,

Contoh perhitungan perubahan tingkat pencurian kayu di KPH Ngawi

$$P = \frac{18 - 25}{25} \times 100 = 28\%$$

Jadi perubahan tingkat pencurian kayu di KPH Ngawi adalah 28%

Hasil analisis selengkapnya untuk perubahan tingkat pencurian kayu pada desa-desa hutan di Kabupaten Ngawi dapat dilihat pada Tabel IV.10 berikut:

TABEL IV.10
ANALISIS PERUBAHAN TINGKAT PENCURIAN KAYU

No	KPH	Desa Penelitian	Luas Hutan (Ha)	Perubahan Tingkat Pencurian Kayu			
				Th. 2000	Th. 2003	Perubahan	%
1.	Ngawi	Sambirejo	263,0	25	18	- 7	28
2.	Saradan	Krompol	36,5	10	14	+ 4	40
3.	Lawu DS	Pandansari	135,9	8	11	+ 3	37.5

Sumber : Hasil Analisis, 2005

Perubahan tingkat pencurian kayu di Kabupaten Ngawi, keberhasilannya berbeda-beda pada masing-masing KPH. Dari tabel analisis di atas terlihat bahwa perubahan tingkat pencurian kayu di KPH Ngawi mengalami

penurunan sebesar 28%, sehingga mempunyai nilai positif. Namun berbeda dengan KPH Saradan yang mengalami peningkatan sebesar 40%, yang berarti pencurian kayu masih tetap berlangsung dan mengalami peningkatan, sehingga bernilai negatif. Hal yang sama juga terjadi di KPH Lawu DS yang mengalami peningkatan sebesar 37,5%, artinya belum mengalami keberhasilan atau bernilai negatif.

c. Kesimpulan analisis kelestarian kawasan hutan

Dari dua indikator yang telah dianalisis dapat disimpulkan bahwa pengaruh Program PHBM terhadap kelestarian kawasan hutan adalah:

- Untuk KPH Ngawi mempunyai pengaruh yang tinggi karena dari dua indikator kelestarian kawasan hutan, semuanya bernilai positif. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pengaruh program PHBM terhadap kelestarian kawasan hutan di KPH Ngawi adalah tinggi atau dengan kata lain, untuk variabel kelestarian kawasan hutan program PHBM mengalami keberhasilan.
- Untuk KPH Saradan mempunyai pengaruh sedang karena dari dua indikator salah satunya bernilai negatif. Kesimpulan dari pengaruh program PHBM terhadap kelestarian kawasan hutan di KPH Saradan adalah sedang atau dengan kata lain kurang berhasil.
- Demikian juga untuk KPH Lawu DS mempunyai pengaruh yang sedang karena salah satu indikator bernilai negatif. Dari nilai sedang tersebut dapat diartikan bahwa pengaruh program PHBM terhadap kelestarian kawasan hutan di KPH Lawu DS kurang berhasil

4.2.2 Analisis Kesejahteraan Masyarakat Desa Hutan

a. Analisis Perubahan Tingkat Pendapatan

Analisis tingkat pendapatan masyarakat ini didasarkan pada perhitungan indeks pendapatan (*Purchasing Power Index*) menurut UNDP (2001), dimana sampai dengan tahun 2018 pendapatan masyarakat Indonesia mempunyai kisaran Rp. 360.000,- sampai dengan Rp.737.720,-, dengan proses perhitungan indeks pendapatan sebagai berikut:

$$I = \frac{P1 - 360.000}{737.000 - 360.000} \times 100$$

I = Indeks pendapatan

P1 = Rata-rata pendapatan kepala keluarga

Didalam analisis ini input data yang diperoleh adalah data primer dengan memberikan daftar kuesioner kepada 100 responden, yang terbagi secara proporsional kedalam 3 desa yang mewakili 3 KPH. Untuk Desa Sambirejo yang mewakili KPH Ngawi berjumlah 50 responden, Desa Krompol yang mewakili KPH Saradan berjumlah 29 responden dan Desa Pandansari yang mewakili KPH Lawu DS berjumlah 21 responden.

Contoh perhitungan indeks pendapatan masyarakat di KPH Ngawi

- Sebelum program PHBM

$$I = \frac{398.500 - 360.000}{737.000 - 360.000} \times 100 = 10,19$$

Jadi indeks pendapatan sebelum program PHBM adalah 10,19%

- Sesudah Program PHBM

$$I = \frac{548.500 - 360.000}{737.000 - 360.000} \times 100 = 49,90$$

Jadi indeks pendapatan sesudah program PHBM adalah 49,90%

Kemudian untuk mengetahui perubahan pendapatan masyarakat dilakukan dengan mengurangi indeks pendapatan sesudah program dengan indeks pendapatan sebelum pelaksanaan program PHBM,

$$\begin{aligned}\text{Perubahan indeks pendapatan} &= \text{indeks sesudah} - \text{indek sebelum PHBM} \\ &= 49,90 - 10,19 \\ &= 39,71\end{aligned}$$

Hasil analisis selengkapnya untuk perubahan tingkat pendapatan masyarakat pada desa-desa hutan di Kabupaten Ngawi dapat dilihat pada Tabel IV.11 berikut ini:

TABEL IV.11
ANALISIS PERUBAHAN TINGKAT PENDAPATAN

No.	KPH	Desa Penelitian	Pendapatan		Indeks Pendapatan (%)		
			Th. 2000	Th. 2003	Th. 2000	Th. 2003	Perub.
1.	Ngawi	Sambirejo	398.500,00	548.500,00	10,19	49,90	39,71
2.	Saradan	Krompol	400.862,10	525.862,06	10,82	43,91	33,09
3.	Lawu DS	Pandansari	379.761,90	529.761,90	5,23	44,94	39,71

Sumber : Hasil Analisis, 2005

Dari analisis di atas dapat diketahui telah terjadi perubahan indeks pendapatan setelah pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat. Untuk KPH Ngawi dan Lawu DS perubahan indeks pendapatan sebesar 39,71%, sedangkan untuk KPH Saradan sebesar 33,09%. Untuk rata-rata perubahan indeks pendapatan di Kabupaten Ngawi sebesar 37,50%, hal ini dapat disimpulkan bahwa perubahan tingkat pendapatan masyarakat adalah ≥ 1 sehingga perubahan ini bernilai positif untuk semua KPH di Kabupaten Ngawi.

b. Analisis Perubahan Tingkat Pendidikan

Untuk menganalisa tingkat pendidikan berdasarkan kriteria menurut *Human Development Index (HDI)*, yaitu dengan melihat angka melek huruf dan rata-rata usia sekolah (usia 15 tahun keatas)

- 1) Indeks Angka Melek Huruf (*Literacy Rate Index*) menurut IHDR (2001), dimana persentase angka melek huruf masyarakat Indonesia mempunyai kisaran dari 0 sampai 100, proses perhitungannya sebagai berikut:

$$I_1 = \frac{P1 - 0}{100 - 0} \times 100$$

I_1 = Indeks melek huruf

P1 = Persentase angka melek huruf masyarakat desa hutan

Contoh perhitungan indeks melek huruf di KPII Ngawi

- Sebelum program PHBM

$$I_1 = \frac{84,5 - 0}{100 - 0} \times 100 = 84,5$$

Jadi indek melek huruf sebelum program PHBM adalah 84,5%

- Sesudah Program PHBM

$$I_1 = \frac{84,7 - 0}{100 - 0} \times 100 = 84,7$$

Jadi indek melek huruf sesudah program PHBM adalah 84,7%

Untuk mengetahui perubahan indeks angka melek huruf, dilakukan dengan mengurangi indeks melek huruf sesudah dengan indeks melek huruf sebelum program PHBM

$$\begin{aligned} \text{Perubahan indek melek huruf} &= \text{indeks sesudah} - \text{indek sebelum PHBM} \\ &= 84,5 - 84,7 \\ &= 0,2 \end{aligned}$$

Hasil analisis selengkapnya untuk perubahan tingkat pendapatan masyarakat pada desa-desa hutan di Kabupaten Ngawi dapat dilihat pada Tabel IV.12 di bawah ini:

TABEL IV.12
ANALISIS ANGKA MELEK HURUF

No.	KPH	Desa Penelitian	Indeks Angka Melek Huruf (%)		
			Th. 2000	Th. 2003	Perubahan
1.	Ngawi	Sambirejo	84,50	84,70	0,20
2.	Saradan	Krompol	84,70	85,00	0,30
3.	Lawu DS	Pandansari	84,80	85,50	0,70

Sumber : Hasil Analisis, 2005

Dari analisis diatas dapat disimpulkan bahwa perubahan indek angka melek huruf di Kabupaten Ngawi < 1 untuk semua KPH, perubahan tertinggi berada pada KPH Lawu DS yaitu sebesar 0,70%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa program PHBM tidak mampu meningkatkan angka melek huruf

- 2) Indeks Rata-rata usia sekolah (*Mean Years of Scholing Index*) menurut IHDR (2001), dimana rata-rata usia sekolah penduduk Indonesia mempunyai kisaran minimum 0 sampai maksimum 15 tahun, proses perhitungannya sebagai berikut:

$$I_2 = \frac{P1 - 0}{15 - 0} \times 100$$

I_2 = Indeks rata-rata usia sekolah

P1 = Rata-rata usia sekolah masyarakat desa hutan

Contoh perhitungan indeks rata-rata usia sekolah di KPH Ngawi

- Sebelum program PHBM

$$8,38 - 0$$

$$I_2 = \frac{8,38 - 0}{15 - 0} \times 100 = 55,9$$

Jadi indeks rata-rata usia sekolah sebelum program PHBM = 55,9%

- Sesudah Program PHBM

$$8,5 - 0$$

$$I_2 = \frac{8,5 - 0}{15 - 0} \times 100 = 56,7$$

Jadi indeks rata-rata usia sekolah sesudah program PHBM = 56,7%

Untuk mengetahui perubahan indeks rata-rata usia sekolah, dilakukan dengan mengurangi rata-rata usia sekolah sesudah dengan rata-rata usia sekolah sebelum program PHBM

$$\begin{aligned} \text{Perubahan indeks usia sekolah} &= \text{indeks sesudah} - \text{indeks sebelum PHBM} \\ &= 56,7 - 55,9 \\ &= 0,8 \end{aligned}$$

Hasil perhitungan selengkapya, untuk mengetahui perubahan indeks rata-rata usia sekolah pada desa-desa hutan di Kabupaten Ngawi dapat dilihat pada Tabel IV.13 berikut ini:

TABEL IV.13
ANALISIS ANGKA USIA SEKOLAH

No.	KPH	Desa Penelitian	Rata-rata usia sekolah		Indeks Angka Usia Sekolah (%)		
			Th. 2000	Th. 2003	Th. 2000	Th. 2003	Perub
1.	Ngawi	Sambirejo	8,38	8,5	55,90	56,70	0,80
2.	Saradan	Krompol	8,66	8,72	57,70	58,20	0,46
3.	Lawu DS	Pandansari	8,43	8,52	56,20	56,80	0,63

Sumber : Hasil Analisis, 2005

Dari tabel diatas diketahui perubahan indeks rata-rata usia sekolah < 1 untuk semua KPH. Perubahan tertinggi pada KPH Ngawi dengan indeks 0,80% dan perubahan terendah pada KPH Saradan yaitu 0,46%. Sehingga

dapat disimpulkan bahwa program PHBM tidak mampu meningkatkan indeks rata-rata usia sekolah

Kemudian untuk menghitung indeks tingkat pendidikan masyarakat berdasarkan IHDR (2001) adalah perpaduan antara indeks melek huruf dengan indeks rata-rata usia sekolah dengan proses perhitungan sebagai berikut:

$$I = (2/3 \times I_1) + (1/3 \times I_2)$$

I = Indeks pendidikan

I₁ = Indeks melek huruf

I₂ = Indeks rata-rata usia sekolah

Contoh perhitungan indeks pendidikan di KPH Ngawi

- Sebelum program PHBM

$$I_2 = (2/3 \times 84,5) + (1/3 \times 55,9) = 74,96$$

Jadi indeks pendidikan sebelum program PHBM = 74,96

- Sesudah Program PHBM

$$I_2 = (2/3 \times 84,7) + (1/3 \times 56,7) = 75,36$$

Jadi indeks pendidikan sesudah program PHBM = 75,36

Untuk mengetahui perubahan pendidikan, dilakukan dengan mengurangi pendidikan sesudah dengan pendidikan sebelum program PHBM

$$\begin{aligned} \text{Perubahan indeks pendidikan} &= \text{indeks sesudah} - \text{indeks sebelum PHBM} \\ &= 75,36 - 74,96 \\ &= 0,40 \end{aligned}$$

Hasil perhitungan selengkapnya, untuk mengetahui perubahan pendidikan pada desa-desa hutan di Kabupaten Ngawi dapat dilihat pada Tabel IV.14 berikut ini:

TABEL IV.14
ANALISIS PERUBAHAN TINGKAT PENDIDIKAN

No.	KPH	Desa Penelitian	Indeks Pendidikan		
			Th. 2000	Th. 2003	Perubahan
1.	Ngawi	Sambirejo	74,96	75,36	0,40
2.	Saradan	Krompol	75,67	76,05	0,39
3.	Lawu DS	Pandansari	75,24	75,93	0,69

Sumber : Hasil Analisis, 2005

Dari tabel analisis perubahan tingkat pendidikan terlihat tidak terjadinya perubahan yang signifikan, dimana rata-rata perubahan indeks pendidikan hanya 0,5 atau < 1, hal ini dapat disimpulkan bahwa pengaruh program PHBM terhadap tingkat pendidikan bernilai negatif untuk semua KPH di wilayah Kabupaten Ngawi

c. Analisis Perubahan Tingkat Harapan Hidup

Dasar dari perhitungan indeks harapan hidup (*Life Expectancy Index*) menurut IHDR (2001), dimana umur harapan hidup Penduduk Indonesia mempunyai kisaran nilai minimum 25 tahun sampai nilai maksimum 85 tahun dengan proses perhitungan indeks harapan hidup sebagai berikut:

$$I = \frac{P1 - 25}{85 - 25} \times 100$$

I = Indeks harapan hidup

P1 = Tingkat harapan hidup masyarakat desa hutan

Contoh perhitungan indeks harapan hidup di KPH Ngawi

- Sebelum program PHBM

$$I_2 = \frac{64,2 - 25}{85 - 25} \times 100 = 65,3$$

Jadi indeks harapan hidup sebelum program PHBM = 65,3%

- Sesudah Program PHBM

$$I_2 = \frac{64,4 - 25}{85 - 25} \times 100 = 65,67$$

Jadi indeks harapan hidup sesudah program PHBM = 65,67%

Untuk mengetahui perubahan harapan hidup, dilakukan dengan mengurangi harapan hidup sesudah dengan harapan hidup sebelum program PHBM

$$\begin{aligned} \text{Perubahan indeks harapan hidup} &= \text{indeks sesudah} - \text{indek sebelum PHBM} \\ &= 65,67 - 65,3 \\ &= 0,33 \end{aligned}$$

Hasil perhitungan selengkapnya, untuk mengetahui perubahan indeks harapan hidup pada desa-desa hutan di Kabupaten Ngawi dapat dilihat pada Tabel IV.15 berikut ini:

TABEL IV.15
ANALISIS PERUBAHAN TINGKAT HARAPAN HIDUP

No.	KPH	Desa Penelitian	Rata-rata Harapan Hidup		Indeks Harapan Hidup (%)		
			Th. 2000	Th. 2003	Th. 2000	Th. 2003	Perub
1.	Ngawi	Sambirejo	64,2	64,4	65,3	65,67	0,33
2.	Saradan	Krompol	64,0	64,3	64,9	65,52	0,57
3.	Lawu DS	Pandansari	64,1	64,5	64,5	65,87	0,79

Sumber : Hasil Analisis 2005

Dari tabel analisis diatas terlihat bahwa program PHBM tidak mampu meningkatkan harapan hidup masyarakat desa hutan, karena perubahan indek harapan hidup < 1, atau bernilai negatif untuk semua KPH di wilayah Kabupaten Ngawi

- d. Kesimpulan analisis kesejahteraan masyarakat desa hutan

Dari ketiga indikator yang telah dianalisis dapat disimpulkan bahwa pengaruh PHBM terhadap kesejahteraan masyarakat desa hutan, mempunyai pengaruh

yang sedang untuk keseluruhan KPH di wilayah Kabupaten Ngawi baik KPH Ngawi, KPH Saradan dan KPH Lawu Ds, karena ada dua indikator yang hasilnya negatif dan hanya satu yang bernilai positif.

4.2.3 Kesimpulan analisis pengaruh Program PHBM terhadap kelestarian kawasan hutan dan kesejahteraan masyarakat desa hutan

Dari keseluruhan analisis di atas yang merupakan analisis pengaruh program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat terhadap kelestarian kawasan hutan dan kesejahteraan masyarakat desa hutan, dapat dilakukan pengelompokan berdasarkan nilai-nilai keberhasilan yang peroleh. Dari nilai-nilai keberhasilan yang peroleh tersebut dilakukan pembobotan sehingga diperoleh tipologi keberhasilan program PHBM, sebagaimana Tabel IV.16 berikut:

TABEL IV.16
KEBERHASILAN PROGRAM PHBM DI KABUPATEN NGAWI

KPH	Nilai Pengaruh Program PHBM					Skor Pengaruh Program PHBM							Tipologi
	Kelestarian		Kesejahteraan			Kelestarian			Kesejahteraan			Jumlah	
	LNP	PK	TP	TPDK	THH	T	S	R	T	S	R		
Ngawi	+	+	+	-	-	3				2		5	II
Saradan	+	-	+	-	-		2			2		4	III
Lawu DS	+	-	+	-	-		2			2		4	III

Keterangan :

LNP : Lahan non produktif

PK : Pencurian kayu

TP : Tingkat pendapatan

TPDK : Tingkat pendidikan

THH : Tingkat harapan hidup

T : Tinggi

S : Sedang

R : Rendah

Sumber : Hasil Analisis, 2005

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa keberhasilan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat pada 3 KPH di wilayah Kabupaten Ngawi cukup beragam, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Keberhasilan program PHBM di KPH Ngawi

Keberhasilannya untuk variabel kelestarian kawasan hutan adalah tinggi dan untuk variabel kesejahteraan masyarakat adalah sedang. Hal ini dapat diartikan bahwa Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat mempunyai pengaruh yang tinggi terhadap kelestarian kawasan hutan dimana perubahan luas lahan non produktif dan perubahan tingkat pencurian kayu mempunyai nilai positif (menurun). Sedangkan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat desa hutan adalah sedang, karena hanya perubahan tingkat pendapatan yang mempunyai nilai positif (meningkat), sementara perubahan tingkat pendidikan dan harapan hidup mempunyai nilai negatif (tidak meningkat). Berdasarkan hasil tersebut KPH Ngawi masuk dalam tipologi II

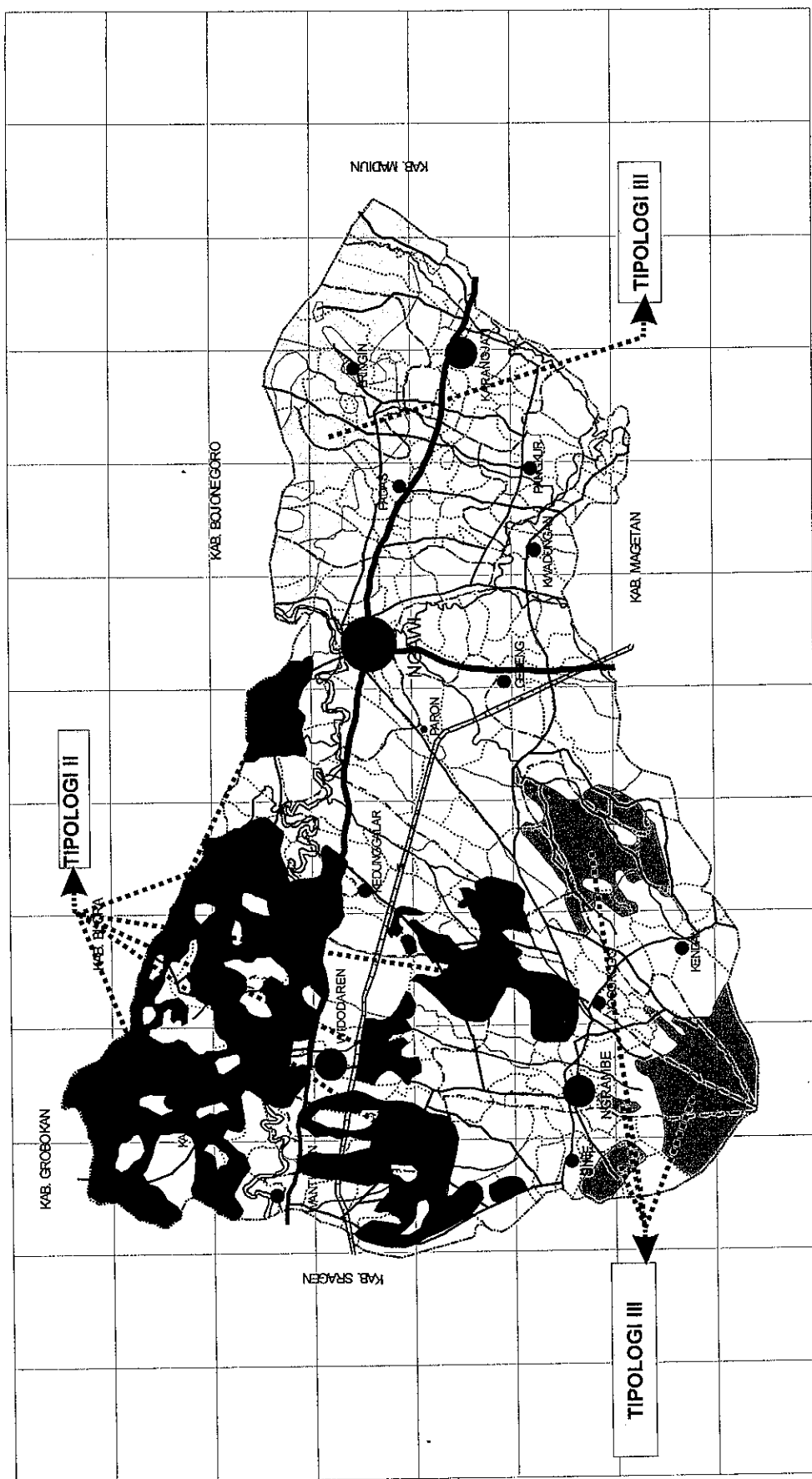
2. Keberhasilan program PHBM di KPH Saradan

Di dalam tabel di atas terlihat tingkat keberhasilan program PHBM terhadap kelestarian kawasan hutan dan kesejahteraan masyarakat desa hutan di KPH Saradan adalah sedang, dapat diartikan bahwa pengaruh Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat terhadap kelestarian kawasan hutan adalah sedang, karena hanya perubahan lahan non produktif yang bernilai positif (menurun), sementara perubahan tingkat pencurian kayu bernilai negatif. Demikian juga pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat desa hutan, yaitu sedang, dimana hanya perubahan tingkat pendapatan yang bernilai positif (meningkat), sedangkan perubahan tingkat pendidikan dan harapan hidup bernilai negatif (tidak meningkat). Dari nilai-nilai keberhasilan tersebut KPH Saradan termasuk ke dalam tipologi III

3. Keberhasilan program PHBM di KPH Lawu DS

Terlihat bahwa tingkat keberhasilan program PHBM terhadap kelestarian kawasan hutan dan kesejahteraan masyarakat desa hutan di KPH Lawu DS adalah sedang, dapat diartikan bahwa pengaruh Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat terhadap kelestarian kawasan hutan adalah sedang, karena hanya perubahan lahan non produktif yang bernilai positif (menurun), sementara perubahan tingkat pencurian kayu bernilai negatif. Demikian juga pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat desa hutan, yaitu sedang, dimana hanya perubahan tingkat pendapatan yang bernilai positif (meningkat), sedangkan perubahan tingkat pendidikan dan harapan hidup bernilai negatif (tidak meningkat). Dari nilai-nilai keberhasilan tersebut KPH Saradan termasuk ke dalam tipologi III

Berdasarkan keberhasilan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat yang telah dijelaskan di atas dapat dituangkan ke dalam Peta Tipologi Wilayah Keberhasilan, yang tersaji pada Gambar 4. 2 berikut ini:



SKALA : 1 : 300.000

0 3 6 9 km

HALAMAN : 98




- LEGENDA:**
- HIRARKI KOTA
 - KPH NGAWI
 - KPH SARADAN
 - KPH LAWU DS
 - BATAS DESA
 - == JALAN NEGARA
 - == JALAN KABUPATEN
 - == JALUR KERETA API
 - ~ SUNGAI

GAMBAR 4.2

PETA TIPOLOGI WILAYAH KEBERHASILAN
PROGRAM PENGELOLAAN HUJAN BERSAMA
MASYARAKAT (PHBM)

SUMBER : HASIL ANALISIS, 2005

MAGISTER PERENCANAAN
PENGABANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG 2005



4.3 Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dengan variabel terpengaruh. Adapun variabel terpengaruhnya adalah program PHBM. Sedangkan variabel yang mempengaruhinya adalah sumber daya manusia, peralatan, metoda, pembiayaan dan kedekatan lokasi. Untuk mengetahui pengaruh antar variabel digunakan uji statistik *Chi Square*

Hipotesis nol (H_0) adalah hipotesis yang menyatakan tidak ada pengaruh antara faktor-faktor keberhasilan terhadap program PHBM, sedangkan pernyataan hipotesis alternatif (H_a) adalah hipotesis yang menyatakan ada pengaruh antara faktor-faktor keberhasilan terhadap program PHBM. Nilai *Chi Square* tersebut dihitung berdasarkan selang kepercayaan atau tingkat signifikan tertentu. Selang kepercayaan yang digunakan dalam studi ini sebesar 95%. Penetapan selang kepercayaan ini berdasarkan pertimbangan praktis dalam penelitian sosial.

- Jika nilai *Chi Square* hitung \geq *Chi Square* tabel, maka hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh antara faktor-faktor keberhasilan terhadap program PHBM ditolak (hipotesis H_a diterima).
- Jika nilai *Chi Square* hitung $<$ *Chi Square* tabel, maka hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh antara faktor-faktor keberhasilan terhadap program PHBM diterima (hipotesis H_0 ditolak).

Setelah dilakukan uji *Chi Square* maka langkah selanjutnya adalah melihat taraf signifikansi. Nilai taraf signifikansi yang dihasilkan menunjukkan bahwa ada atau tidak hubungan antara dua variabel yang diuji. Batas taraf

signifikansi yang digunakan pada penelitian ini adalah 0,05 artinya jika taraf signifikansi yang dihasilkan kurang dari 0,05 maka pernyataan bahwa kedua variabel yang diuji tidak saling berhubungan harus diterima, sebaliknya jika nilai tersebut lebih besar dari 0,05 maka kedua variabel yang diuji tidak saling berhubungan harus ditolak.

1. Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Ngawi

Berdasarkan hasil kuesioner yang diberikan kepada 50 responden terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di KPH Ngawi tersaji dalam Tabel IV.17 berikut ini:

TABEL IV.17
HASIL PERHITUNGAN *CHI SQUARE* DARI FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI PROGRAM PHBM DI KPH NGAWI

No.	Faktor-faktor yang mempengaruhi	Pengaruh Program PHBM di		
		<i>Chi Square</i> Hitung	<i>Chi Square</i> Tabel	Probabilitas
1.	Sumber Daya Manusia	11,095	9,488	0,026
2.	Peralatan	1,616	9,488	0,806
3.	Metoda	16,988	9,488	0,002
4.	Pembiayaan	3,738	9,488	0,443
5.	Kedekatan Lokasi	15,052	9,488	0,005

Sumber : Hasil Analisis, 2005

Dari tabel di atas terlihat dari lima faktor yang mempengaruhi keberhasilan program di KPH Ngawi, ada tiga faktor yang mempengaruhi yaitu faktor sumber daya manusia, metoda dan kedekatan lokasi, dengan nilai *Chi Square* hitung lebih besar dari nilai *Chi Square* tabel. Dari ketiga faktor tersebut mempunyai pengaruh yang kuat / signifikan, dengan nilai probabilitas jauh di bawah 0,05. Sedangkan dua faktor lainnya yaitu peralatan dan pembiayaan tidak

mempengaruhi, karena mempunyai nilai *Chi Square* hitung lebih kecil dari nilai *Chi Square* tabel dan nilai probabilitas di atas 0,05. Dari hasil crosstab diketahui bahwa faktor peralatan dan pembiayaan tidak memadai dalam pelaksanaan program PHBM.

2. Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Saradan

Berdasarkan hasil kuesioner yang diberikan kepada 29 responden terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di KPH Saradan diperoleh hasil yang berbeda dengan KHP Ngawi, yang selengkapnya tersaji dalam Tabel IV.18 berikut ini:

TABEL IV.18
HASIL PERHITUNGAN *CHI SQUARE* DARI FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI PROGRAM PHBM DI KPH SARADAN

No.	Faktor-faktor yang mempengaruhi	Pengaruh Program PHBM di		
		<i>Chi Square</i> Hitung	<i>Chi Square</i> Tabel	Probabilitas
1.	Sumber Daya Manusia	6,359	9,488	0,174
2.	Peralatan	5,233	9,488	0,264
3.	Metoda	10,295	9,488	0,036
4.	Pembiayaan	7,856	9,488	0,097
5.	Kedekatan Lokasi	12,820	9,488	0,012

Sumber : Hasil Analisis, 2005

Untuk KPH Saradan, hanya dua faktor yang mempengaruhi keberhasilan program PHBM, yaitu faktor metoda dan kedekatan lokasi, dengan nilai *Chi Square* hitung sebesar 10,295 dan 12,820, lebih besar dari nilai *Chi Square* tabel 9,488. Kedua faktor tersebut mempunyai pengaruh yang kuat / signifikan, dengan nilai probabilitas jauh di bawah 0,05. Sedangkan ketiga faktor lainnya yaitu faktor sumber daya manusia, peralatan dan pembiayaan tidak mempengaruhi

keberhasilan program PHBM dengan nilai *Chi Square* hitung lebih kecil dari nilai *Chi Square* tabel dan nilai probabilitas di atas 0,05 yang menunjukkan tidak punya pengaruh. Dari hasil crosstab diketahui bahwa faktor sumber daya manusia sebenarnya mempunyai tingkat kemampuan yang cukup tinggi, akan tetapi tidak mendukung keberhasilan program PHBM. Berdasarkan hasil crosstab juga diketahui bahwa faktor peralatan dan pembiayaan tidak memadai dalam pelaksanaan program PHBM.

3. Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Lawu DS

Berdasarkan hasil kuesioner yang diberikan kepada 21 responden terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di KPH Lawu DS dapat disajikan dalam Tabel IV.19 berikut ini:

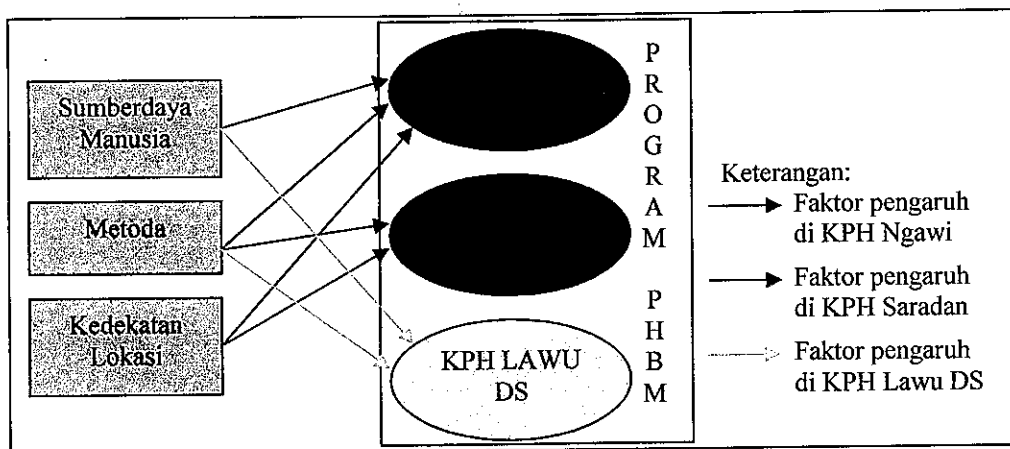
TABEL IV.19
HASIL PERHITUNGAN *CHI SQUARE* DARI FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI PROGRAM PHBM DI KPH LAWU DS

No.	Faktor-faktor yang mempengaruhi	Pengaruh Program PHBM di		
		<i>Chi Square</i> Hitung	<i>Chi Square</i> Tabel	Probabilitas
1.	Sumber Daya Manusia	13,083	9,488	0,011
2.	Peralatan	2,015	9,488	0,733
3.	Metoda	12,413	9,488	0,015
4.	Pembiayaan	2,546	9,488	0,636
5.	Kedekatan Lokasi	4,127	9,488	0,389

Sumber : Hasil Analisis, 2005

Berdasarkan hasil perhitungan analisis *Chi Square* di atas terlihat bahwa faktor-faktor mana yang mempengaruhi keberhasilan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di KPH Lawu DS, yang secara rinci dapat disimpulkan bahwa untuk KPH Lawu DS, hanya dua faktor yang mempengaruhi keberhasilan program PHBM yaitu sumberdaya manusia dan metoda, dengan nilai *Chi Square* hitung sebesar 13,083 dan 12,413, lebih besar dari nilai *Chi Square* tabel 9,488. Selain itu kedua faktor tersebut mempunyai pengaruh yang kuat / signifikan terhadap program PHBM dengan nilai probabilitas di bawah 0,05. Sedangkan tiga faktor lainnya yaitu peralatan, pembiayaan dan kedekatan lokasi tidak mempengaruhi keberhasilan program PHBM, dengan nilai *Chi Square* hitung lebih kecil dari nilai *Chi Square* tabel dan nilai probabilitas di atas 0,05 yang menunjukkan faktor tersebut tidak mempunyai pengaruh terhadap program PHBM. Dari hasil crosstab diketahui bahwa faktor peralatan dan pembiayaan tidak memadai dalam pelaksanaan program PHBM. Sedangkan berdasarkan hasil crosstab juga diketahui lokasi program PHBM yang jauh dari tempat tinggal penduduk, sehingga pelaksanaan program tidak berjalan optimal.

Dari hasil analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program PHBM dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi program PHBM pada masing-masing KPH berbeda-beda, seperti terlihat pada bagan berikut ini:



GAMBAR 4.3
BAGAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROGRAM PHBM PADA MASING-MASING KPH DI KABUPATEN NGAWI

Sumber: Hasil analisis, 2005

4.4 Analisis Perbandingan antara Kondisi Program PHBM dengan Faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Teknik yang dilakukan adalah dengan membandingkan antara hasil dari analisis kondisi program PHBM dengan hasil dari analisis faktor-faktor yang mempengaruhi program PHBM. Sehingga dapat diketahui keberhasilan pelaksanaan program PHBM dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya. Hasil perbandingan tersebut dapat dilihat pada Tabel IV.20 berikut ini:

TABEL IV.20
ANALISIS PERBANDINGAN

No	KPH	Kondisi Program PHBM terhadap							Faktor-faktor yang mempengaruhi
		Kelestarian			Kesejahteraan				
		LHP	PK	Pengaruhnya	TP	TPDK	THH	Pengaruhnya	
1.	Ngawi	+	+	Tinggi	+	-	-	Sedang	- Sdm - Metoda - Kedekatan lokasi
2.	Saradan	+	-	Sedang	+	-	-	Sedang	- Metoda - Kedekatan Lokasi
3.	Lawu DS	+	-	Sedang	+	-	-	Sedang	- Sdm - Metoda

Keterangan :

LNP : Lahan non produktif

PK : Pencurian kayu

TP : Tingkat pendapatan

TPDK : Tingkat pendidikan

THH : Tingkat harapan hidup

Sumber : Hasil Analisis, 2005

Dari tabel analisis perbandingan di atas dapat diketahui tingkat keberhasilan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya pada masing-masing KPH di Kabupaten Ngawi:

1. Hasil pelaksanaan Program PHBM di KPH Ngawi

Pengaruh variabel program PHBM terhadap variabel kelestarian kawasan hutan adalah tinggi, karena dua dari dua indikatornya bernilai positif. Sedangkan pengaruh variabel program PHBM terhadap variabel kesejahteraan masyarakat desa hutan adalah sedang, karena hanya satu indikator yang bernilai positif yaitu tingkat pendapatan masyarakat, sementara dua indikator lainnya yaitu tingkat pendidikan masyarakat dan tingkat harapan hidup masyarakat bernilai negatif.

Keberhasilan program PHBM tersebut dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia, metoda dan kedekatan lokasi, sedangkan faktor peralatan dan pembiayaan tidak mempunyai pengaruh terhadap program PHBM.

2. Hasil pelaksanaan Program PHBM di KPH Saradan

Hasil program PHBM di KPH Saradan adalah sedang, karena pengaruh variabel program PHBM terhadap kelestarian kawasan hutan adalah sedang, dimana hanya satu dari dua indikatornya yang bernilai positif. Demikian juga pengaruh variabel program PHBM terhadap kesejahteraan masyarakat desa hutan adalah sedang, dimana hanya satu dari tiga indikatornya yang bernilai positif, sedangkan dua lainnya bernilai negatif. Keberhasilan program PHBM di KPH Saradan dipengaruhi oleh faktor metoda dan kedekatan lokasi.

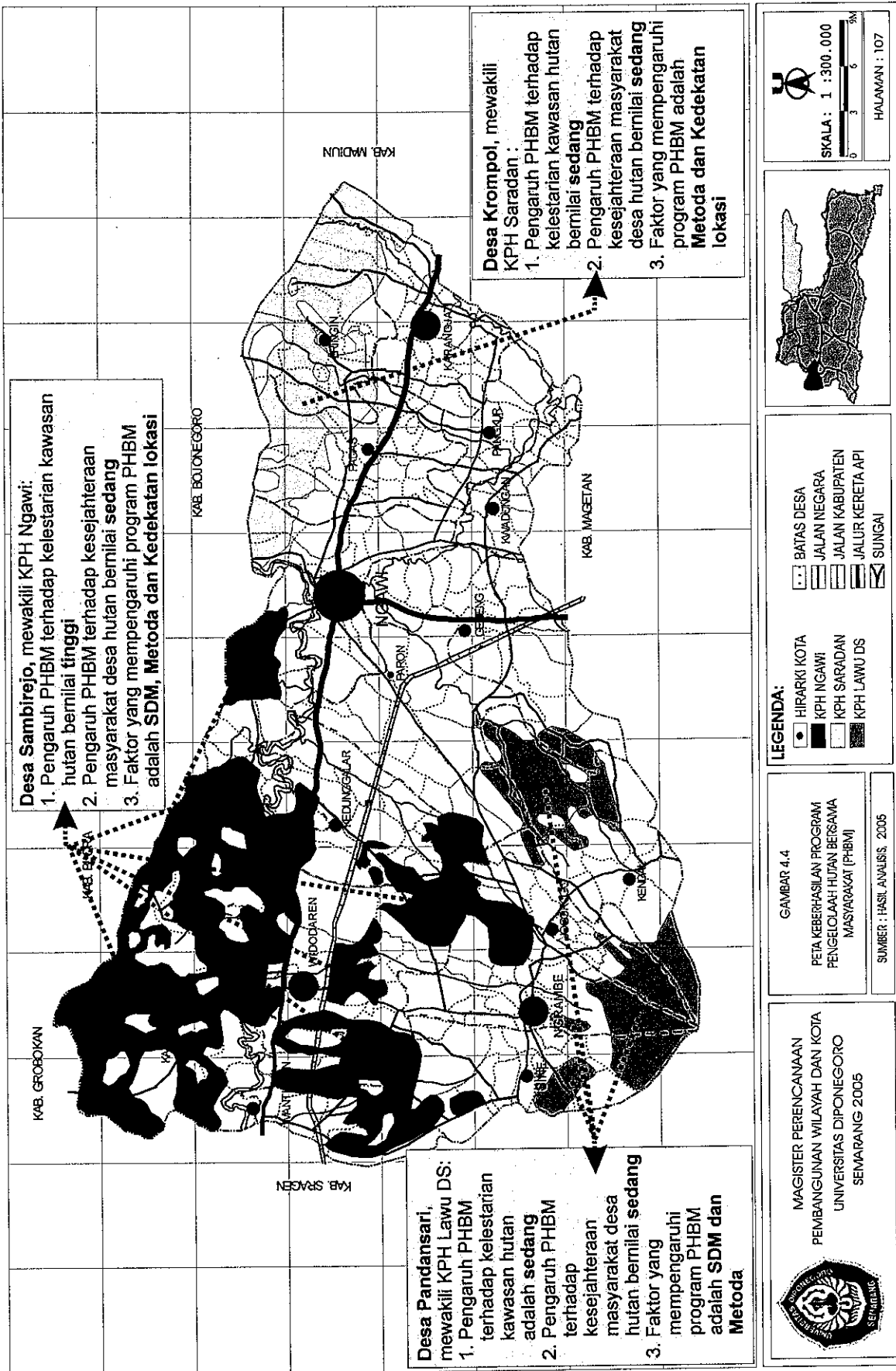
Sedangkan tiga faktor lainnya yaitu sumber daya manusia, peralatan dan pembiayaan tidak mempengaruhi.

3. Hasil pelaksanaan Program PHBM di KPH Lawu DS.

Pengaruh variabel program PHBM terhadap variabel kelestarian kawasan hutan adalah sedang, karena hanya satu dari dua indikatornya bernilai positif. Sedangkan pengaruh variabel program PHBM terhadap variabel kesejahteraan masyarakat desa hutan adalah sedang, karena hanya satu indikator yang bernilai positif yaitu tingkat pendapatan masyarakat, sementara dua indikator lainnya yaitu tingkat pendidikan masyarakat dan tingkat harapan hidup masyarakat bernilai negatif.

Keberhasilan program PHBM di KPH Lawu DS dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia dan metoda, sedangkan faktor peralatan, pembiayaan dan kedekatan lokasi tidak mempunyai pengaruh terhadap program PHBM.

Dari uraian tersebut dapat dituangkan kedalam peta keberhasilan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat, seperti pada Gambar 4.4 berikut ini:



4.5 Arahan Pengembangan Komoditas Kehutanan

Dari analisis kondisi di atas diperoleh hasil bahwa pelaksanaan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di Kabupaten Ngawi mempunyai tingkat keberhasilan yang sedang, dimana dari lima indikator ada tiga indikator yang mengalami keberhasilan, sedangkan dua indikator lainnya belum berhasil. Dua indikator yang belum berhasil tersebut bisa dipahami karena waktu pelaksanaan program PHBM yang relatif masing singkat sehingga belum banyak berpengaruh terhadap pendidikan dan harapan hidup masyarakat.

Untuk tiga indikator yang berhasil yaitu menurunnya lahan non produktif, menurunnya tingkat pencurian kayu dan meningkatnya pendapatan, hal ini disebabkan oleh upaya mengotimalkan peran masyarakat desa hutan yang mayoritas petani. Yaitu dengan memberikan hak pengelolaan lahan hutan kepada petani untuk kegiatan pertanian. Dari hasil pertanian kehutanan tersebut dihasilkan produk-produk sebagaimana Tabel IV.21 berikut ini:

TABEL IV.21
KOMODITAS PERTANIAN KEHUTANAN
PROGRAM PHBM DI KABUPATEN NGAWI

No.	Jenis Komoditas	Jumlah Produksi tahun 2003 (Kg)		
		Desa Sambirejo	Desa Krompol	Desa Pandansari
1.	Jagung	8.690	10.300	6.425
2.	Kacang tanah	32.571	28.670	21.375
3.	Kedelai	10.240	14.742	9.520
4.	Ketela pohon	15.845	13.130	11.680

Sumber : Olahan data primer, 2005

Data tersebut diambil pada tiga dari sembilan desa hutan yang telah dilaksanakan program PHBM. Sedangkan target dari program PHBM ini untuk semua desa hutan di Kabupaten Ngawi yang berjumlah 85 desa hutan yang

tersebar pada tiga KPH. Sehingga apabila seluruh desa telah dilaksanakan program tersebut, dapat diperkirakan jumlah yang cukup besar dari produk-produk pertanian kehutanan, yang merupakan potensi yang besar. Namun produk-produk tersebut masih dikelola dengan sistem terdisional dan subsistent sehingga tidak mampu memberikan efek pengganda (*multiplier effect*) kepada sektor lain.

Komoditas hasil pertanian kehutanan tersebut dijual kepada para pedagang yang datang dari kota kabupaten maupun kota kecamatan. Dan kemudian dipasarkan ke dalam kota maupun luar kota. Dari data kuesioner, pangsa pasar untuk komoditas pertanian kehutanan adalah sebagai berikut:

TABEL IV. 22
PEMASARAN KOMODITAS PERTANIAN KEHUTANAN
PROGRAM PHBM DI KABUPATEN NGAWI

No.	Jenis Komoditas	Dari		
		KPH Ngawi	KPH Saradan	KPH Lawu DS
		Dipasarkan ke		
1.	Jagung	Ngawi dan Sragen	Ngawi dan Madiun	Ngawi dan Sragen
2.	Kacang tanah	Ngawi dan Solo	Madiun	Sragen dan Magetan
3.	Kedelai	Ngawi dan Solo	Ngawi dan Nganjuk	Ngawi dan Sragen
4.	Ketela pohon	Sragen dan Karanganyar	Madiun	Karanganyar

Sumber : Olahan data primer, 2005

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa sebagian besar komoditas pertanian kehutanan dipasarkan ke luar daerah Ngawi. Hal ini menunjukkan belum adanya penyerapan komoditas pertanian yang mengikuti pola hirarki pusat pertumbuhan, dimana semua produk terserap ke kota-kota besar. Untuk mengetahui pemasaran komoditas pertanian kehutanan dapat dilihat pada Gambar 4.5 berikut ini:

Dari hasil observasi di lapangan, selain produk-produk tersebut diatas masih ada lagi produk pertanian kehutanan yang mempunyai potensi pengembangan yang lebih besar lagi yaitu produk tanaman jamu seperti; kunir, kencur, lengkuas, jahe dan lain-lain. Produk-produk tersebut tumbuh secara liar di bawah teduhan pohon kehutanan dan kurang dimanfaatkan oleh petani padahal tanam tersebut mempunyai nilai jual yang tinggi.

Untuk itu perlu perubahan kebijakan pembangunan kehutan ke arah pengembangan wilayah dengan mengoptimalkan produk-produk lokal kehutanan. Berdasarkan potensi yang ada, pengembangan wilayah kehutanan di Kabupaten Ngawi dapat dilakukan dengan mengembangkan indutri kecil, menengah atau besar yang merupakan industri turunan dari pertanian kehutanan, antara lain:

1. Mengembangkan *home industri* industri rumah tangga pembuatan tempe, dengan bahan baku kedelai yang dihasilkan dari pertanian kehutanan
2. Mengembangkan *home industri* keripik singkong, dengan bahan baku ketela pohon yang dihasilkan dari pertanian kehutanan
3. Mendirikan industri jamu dengan bahan baku tanaman obat-obatan yang sangat cocok di tanam di bawah tegakan pohon kehutanan seperti; kunir, jahe, kencur, kunyit, laos, dan lain-lain
4. Mengembangkan kegiatan usaha dengan pemanfaatan bahan baku kehutanan seperti usaha kerajinan seni ukir bongkol kayu jati yang mempunyai nilai jual yang tinggi.
5. Mengembangkan peternakan kambing dan sapi, dengan pemanfaatan lahan kehutanan untuk tanaman makanan ternak.

Berdasarkan karakteristik wilayah yang berbeda pada masing-masing KPH, pengembangan wilayah kehutanan dapat dikelompokkan menjadi tiga wilayah pengembangan:

a. Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Ngawi

Karakteristik: mempunyai wilayah dengan topografi yang rendah, dilewati akses jalan negara, memiliki jenis tanah yang subur dan merupakan wilayah hutan terluas di Kabupaten Ngawi serta langsung berbatasan dengan Propinsi Jawa Tengah

Arah pengembangan:

- 1). Mengembangkan *home industri* tempe
- 2). Mengembangkan *home industri* keripik singkong
- 3). Mengembangkan industri jamu
- 4). Mengembangkan usaha seni kerajinan bongkol kayu jati
- 5). Mengembangkan ternak sapi dan kambing

b. Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Saradan

Karakteristik: mempunyai wilayah dengan topografi yang rendah, dilewati akses jalan negara, memiliki jenis tanah yang subur

Arah pengembangan:

- 1). Mengembangkan *home industri* tempe
- 2). Mengembangkan *home industri* keripik singkong
- 3). Mengembangkan usaha seni kerajinan bongkol kayu jati
- 4). Mengembangkan ternak sapi dan kambing

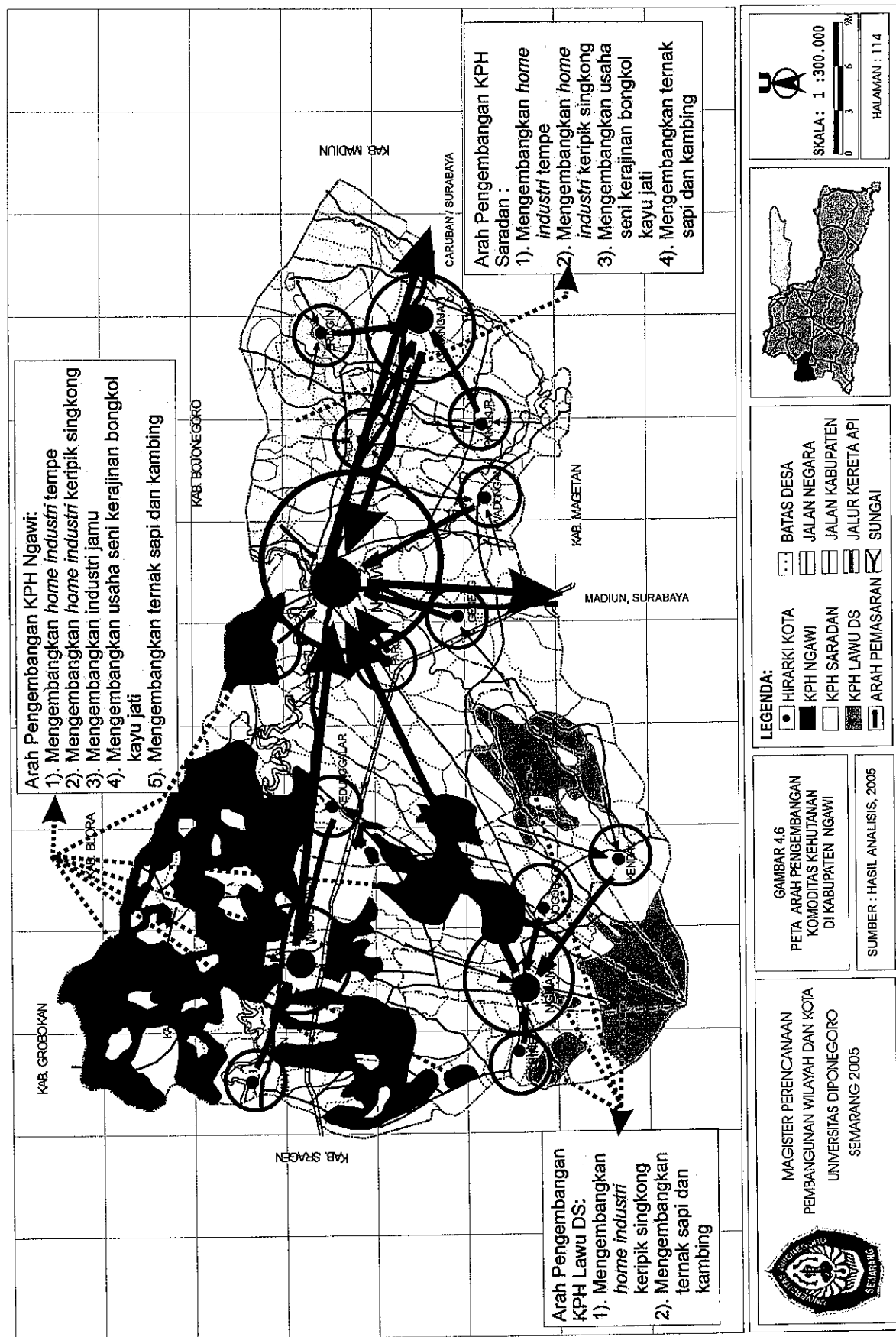
c. Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Lawu DS

Karakteristik: mempunyai wilayah dengan topografi yang tinggi, hanya dilewati akses jalan kabupaten, memiliki jenis tanah yang subur

Arah pengembangan:

- 1). Mengembangkan *home industri* keripik singkong
- 2). Mengembangkan ternak sapi dan kambing

Pengembangan wilayah kehutanan tersebut dapat dituangkan ke dalam peran wilayah sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 4.6 berikut ini:



4.6 Aktivitas Ekonomi Keluarga Masyarakat Desa Hutan

1. Sumber Pendapatan Keluarga

Besar kecilnya penghasilan keluarga merupakan ukuran yang mudah untuk menentukan keluarga dikatakan sejahtera atau tidak, apabila keluarga memiliki pendapatan yang besar akan lebih terpenuhi kebutuhannya dan tentu saja sebaliknya, keluarga yang penghasilannya rendah akan sulit memenuhi kebutuhan hidupnya. Besar kecilnya penghasilan akan ditentukan oleh kualitas dan kuantitas sumber pendapatannya. Pekerjaan dengan kualitas yang baik akan memberikan pemasukan yang besar. Namun juga akan lebih besar lagi apabila jumlah pekerjaannya lebih dari satu. Sumber pendapatan keluarga untuk masyarakat desa hutan ternyata bersumber bukan hanya satu pekerjaan, seperti hasil dari wawancara dengan Bapak Wagiman, warga Dusun Pekik Desa Sambirejo yang merupakan wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Ngawi, mengatakan:

"Untuk mencukupi kebutuhan keluarga, saya harus kerja serabutan pak, setelah selesai bertani di areal PHBM, saya kadang mencari bekicot untuk dijual, lumayan Rp. 700,- per Kg, selain itu saya juga punya hewan peliharaan, kalau ada kebutuhan mendesak bisa dijual" (lampiran 2.B.1)

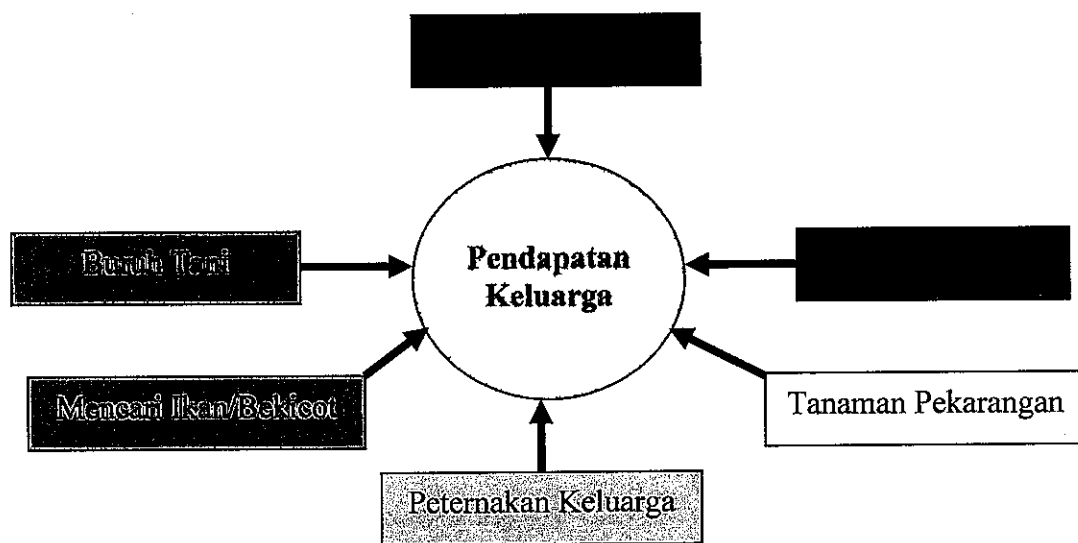
Hal serupa juga dikatakan oleh Bapak Darso, warga Dusun Kepuh Desa Krompol yang merupakan wilayah KPH Saradan, mengatakan:

"Macam-macam pak sumber pendapatan keluarga saya, ada dari ternak, pertanian PHBM, tukang kayu, cari ikan di sungai. Kalau tidak begitu repot untuk memenuhi kebutuhan" (lampiran 2.B.2)

Demikian juga untuk masyarakat desa hutan di wilayah KPH Lawu DS, mereka juga memiliki sumber pendapatan yang lebih dari satu, seperti yang dikatakan Bapak Nardi, warga Dusun Bulak Desa Pandansari yang mengatakan:

“Sumber pendapatan keluarga saya berasal dari berbagai pekerjaan yaitu buruh tani, peternakan keluarga, pertanian kehutanan PHBM dan tanaman pekarangan, itu saja masih belum bisa mencukupi kebutuhan keluarga” (lampiran 2.B.3)

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa sumber pendapatan keluarga masyarakat desa hutan bukan hanya dari pertanian kehutanan PHBM, tetapi ada sumber-sumber yang lain seperti; buruh tani, peternakan, tukang kayu, tanaman pekarangan, mencari ikan, mencari bekicot.



GAMBAR 4.7
BAGAN SUMBER PENDAPATAN KELUARGA

Sumber: Olahan data promer, 2005

2. Perbandingan pendapatan dari pertanian kehutanan PHBM dengan sumber pendapatan yang lain

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh program pertanian kehutanan PHBM terhadap pendapatan keluarga dapat diketahui dari hasil wawancara dengan Bapak Wagiman yang mengatakan:

"Kalau dibandingkan antara pendapatan dari pertanian kehutanan PHBM dengan sumber penghasilan yang lain, lebih besar pendapatan dari sumber selain pertanian kehutanan PHBM, untuk itu saya harus kerja yang lain, tetapi program PHBM ini sangat membantu ekonomi keluarga saya" (lampiran 2.B.1)

Pernyataan yang sama juga diperoleh dari Bapak Darso dan Nardi yang mengatakan bahwa lebih besar pendapatan dari non Program PHBM dari pada pendapatan dari program PHBM. Namun demikian mereka sependapat bahwa program PHBM ini sangat membantu ekonomi keluarga.

3. Tingkat Pendapatan Keluarga

Penghasilan yang diperoleh baik dari pertanian kehutanan PHBM maupun dari non program PHBM ternyata belum bisa mencukupi kebutuhan keluarga yang terus meningkat, seperti pendapat Bapak Darso yang mengatakan:

"Pendapatan saya sekarang ini belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saja masih kurang, apalagi untuk biaya sekolah anak-anak, belum lagi kalau ada keluarga yang sakit. Pokoknya masih sangat kurang pak. Untuk itu saya berharap pada pemerintah untuk memberikan pekerjaan yang dapat memberikan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan" (lampiran 2.B.2)

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pendapatan selama ini belum mencukupi kebutuhan keluarga, untuk itu perlu upaya yang menyeluruh dari berbagai sektor. Bukan hanya pertanian kehutanan saja yang dilakukan, tetapi harus didukung oleh sektor yang lain seperti pasar, akses menuju pasar,

lembaga bantuan modal, pengembangan agro industri dan lain-lain sehingga akan memberi peluang kepada masyarakat untuk mengembangkan aktivitas ekonominya.

4. Rangkuman Aktifitas Ekonomi Keluarga Masyarakat Desa Hutan

Dari hasil wawancara mengenai aktifitas ekonomi keluarga dapat disimpulkan bahwa sumber penghasilan masyarakat lebih dari satu kegiatan, mereka banyak melakukan aktifitas ekonomi lain selain kegiatan pertanian kehutanan program PHBM antara lain; buruh tani, peternakan keluarga, tanaman pekarangan, tukang kayu dan mencari kerja sampingan seperti mencari ikan dan bekicot. Namun demikian pertanian kehutanan program PHBM dirasakan sangat perlu untuk menambah pemasukan ekonomi keluarga, meskipun jumlahnya lebih kecil dari kegiatan ekonomi yang lain.

Dari sumber pendapatan yang ada, ternyata masih belum mencukupi semua kebutuhan yang terus meningkat. Untuk itu perlu upaya komprehensif yang melibatkan semua komponen *stakeholders* baik pemerintah, swasta maupun masyarakat, untuk berperan dalam membangkitkan aktifitas ekonomi masyarakat desa hutan, sehingga akan bertambah kualitas dan kuantitas dari sumber pendapatan mereka.

BAB V PENUTUP

5.1 Temuan Studi

Pelaksanaan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat merupakan program yang dicanangkan PT. Perhutani dengan perubahan paradigma dari hutan komersial menjadi hutan sosial. Program pengelolaan hutan ini berusaha menyerap aspirasi masyarakat desa hutan dengan menempatkan pada posisi sebagai mitra Perhutani yang akan menjaga dan memelihara kelestarian hutan. Dengan posisinya sebagai mitra tersebut masyarakat desa hutan juga mendapatkan keuntungan dari keberadaan hutan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Dari hasil analisis pengaruh program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat terhadap kelestarian kawasan hutan dan kesejahteraan masyarakat desa hutan di Kabupaten Ngawi terdapat temuan, yaitu:

1. Dari analisis korelasi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program PHBM mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kelestarian kawasan hutan dan kesejahteraan masyarakat desa hutan
2. Dari analisis kondisi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program PHBM pada masing-masing KPH adalah:
 - a. Program PHBM di KPH Ngawi

Keberhasilan program PHBM untuk variabel kelestarian kawasan hutan adalah tinggi dan untuk variabel kesejahteraan masyarakat adalah sedang.

Hal ini dapat diartikan bahwa Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat mempunyai pengaruh yang tinggi terhadap kelestarian kawasan hutan dimana perubahan luas lahan non produktif dan perubahan tingkat pencurian kayu mempunyai nilai positif (menurun). Sedangkan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat desa hutan adalah sedang, karena hanya perubahan tingkat pendapatan yang mempunyai nilai positif (meningkat), sementara perubahan tingkat pendidikan dan harapan hidup mempunyai nilai negatif (tidak meningkat).

b. Program PHBM di KPH Saradan

Pengaruh program PHBM terhadap kelestarian kawasan hutan dan kesejahteraan masyarakat desa hutan di KPH Saradan adalah sedang, dapat diartikan bahwa pengaruh Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat terhadap kelestarian kawasan hutan adalah sedang, karena hanya perubahan lahan non produktif yang bernilai positif (menurun), sementara perubahan tingkat pencurian kayu bernilai negatif. Demikian juga pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat desa hutan, yaitu sedang, dimana hanya perubahan tingkat pendapatan yang bernilai positif (meningkat), sedangkan perubahan tingkat pendidikan dan harapan hidup bernilai negatif (tidak meningkat).

c. Program PHBM di KPH Lawu DS

Terlihat bahwa tingkat keberhasilan program PHBM terhadap kelestarian kawasan hutan dan kesejahteraan masyarakat desa hutan di KPH Lawu DS adalah sedang, dapat diartikan bahwa pengaruh Program Pengelolaan

Hutan Bersama Masyarakat terhadap kelestarian kawasan hutan adalah sedang, karena hanya perubahan lahan non produktif yang bernilai positif (menurun), sementara perubahan tingkat pencurian kayu bernilai negatif. Demikian juga pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat desa hutan, yaitu sedang, dimana hanya perubahan tingkat pendapatan yang bernilai positif (meningkat), sedangkan perubahan tingkat pendidikan dan harapan hidup bernilai negatif (tidak meningkat).

3. Dari analisis faktor penyebab dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program PHBM pada masing-masing KPH, yaitu:

- a. Program PHBM di KPH Ngawi

Keberhasilan program PHBM di KPH Ngawi dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia, metoda dan kedekatan lokasi, sedangkan faktor peralatan dan pembiayaan tidak mempunyai pengaruh terhadap program PHBM.

- b. Program PHBM di KPH Saradan

Keberhasilan program PHBM di KPH Saradan dipengaruhi oleh faktor metoda dan kedekatan lokasi. Sedangkan tiga faktor lainnya yaitu sumber daya manusia, peralatan dan pembiayaan tidak mempengaruhi.

- c. Program PHBM di KPH Lawu DS

Keberhasilan program PHBM di KPH Lawu DS dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia dan metoda, sedangkan faktor peralatan, pembiayaan dan kedekatan lokasi tidak mempunyai pengaruh terhadap program PHBM

5.2 Kesimpulan

Berdasarkan temuan-temuan studi dari analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengaruh Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) terhadap kelestarian kawasan hutan dan kesejahteraan masyarakat desa hutan, untuk KPH Ngawi termasuk cukup berhasil. Hal ini terlihat dari indikator kelestarian kawasan hutan yaitu perubahan lahan non produktif dan perubahan tingkat pencurian kayu mengalami keberhasilan (positif). Untuk indikator kesejahteraan masyarakat yaitu perubahan tingkat pendapatan, perubahan tingkat pendidikan dan perubahan tingkat harapan hidup, hanya satu indikator yang berhasil yaitu perubahan tingkat pendapatan. Sedangkan indikator perubahan tingkat pendidikan dan perubahan tingkat harapan hidup belum berhasil. Hal ini dapat dipahami karena waktu pelaksanaan program tersebut masih cukup singkat yaitu tiga tahun sehingga pengaruhnya terhadap indikator tersebut belum kelihatan.

Pengaruh program PHBM di KPH Saradan termasuk kurang berhasil. Dari lima indikator yaitu perubahan lahan non produktif, perubahan tingkat pencurian kayu, perubahan tingkat pendapatan, perubahan tingkat pendidikan dan perubahan tingkat harapan hidup, hanya dua indikator yang berhasil yaitu indikator perubahan lahan non produktif dan perubahan tingkat pendapatan, sedangkan tiga indikator lainnya belum berhasil.

Pengaruh program tersebut di KPH Lawu DS juga termasuk kurang berhasil dari lima indikator hanya dua yang berhasil yaitu indikator perubahan lahan non produktif dan perubahan tingkat pendapatan masyarakat, sedangkan tiga indikator lainnya belum berhasil.

Faktor yang mempengaruhi program PHBM di Kabupaten Ngawi adalah kesesuaian metoda yang dilaksanakan, sumberdaya manusia yang cukup memadai dan lokasi pelaksanaan program yang dekat dengan tempat tinggal mereka, sedangkan faktor peralatan (alat pertanian, bibit, pupuk, obat-obatan dan lain-lain) tidak memadai dan tidak bisa mempengaruhi keberhasilan program PHBM. Demikian juga faktor pembiayaan yang masih kurang memadai sehingga faktor tersebut tidak banyak mempengaruhi keberhasilan PHBM.

5.3 Rekomendasi

Dari kesimpulan di atas yang didasarkan pada temuan hasil analisis dapat dirumuskan rekomendasi terhadap pelaksanaan program Pengelolaah Hutan Bersama Masyarakat di Kabupaten Ngawi, antara lain:

1. Mengupayakan keberhasilan dalam pelaksanaan indikator kelestarian kawasan hutan dan kesejahteraan masyarakat desa hutan yang belum berhasil menjadi berhasil.
 - a. Di KPH Ngawi, indikator yang belum berhasil adalah tingkat pendidikan dan harapan hidup masyarakat desa hutan yang belum meningkat
 - b. Di KPH Saradan, indikator yang belum berhasil adalah tingkat pencurian kayu, tingkat pendidikan dan harapan hidup masyarakat desa hutan yang belum meningkat

- c. Di KPH Lawu DS, indikator yang belum berhasil adalah tingkat pencurian kayu, tingkat pendidikan dan harapan hidup masyarakat desa hutan yang belum meningkat
2. Mengoptimalkan peran faktor-faktor yang belum berperan dalam keberhasilan program ini, yaitu peralatan dan pembiayaan.
3. Memprioritaskan penanganan pelaksanaan program PHBM berdasarkan tipologi wilayah keberhasilan. Yaitu mendahulukan tipologi wilayah III untuk ditangani terlebih dulu, baru kemudian tipologi wilayah II yang akan ditangani berikutnya.
4. Untuk lebih meningkatkan kemakmuran masyarakat desa hutan, pengembangan wilayah kehutanan diarahkan kepada pengembangan industri yang berbasis pertanian kehutanan, dengan membagi peran pada tiga wilayah pengembangan, yaitu:
 - a. Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Ngawi
Karakteristik: mempunyai wilayah dengan topografi yang rendah, dilewati akses jalan negara, memiliki jenis tanah yang subur dan merupakan wilayah hutan terluas di Kabupaten Ngawi serta langsung berbatasan dengan Propinsi Jawa Tengah
Arah pengembangan:
 - 1). Mengembangkan *home industri* tempe
 - 2). Mengembangkan *home industri* keripik singkong
 - 3). Mengembangkan industri jamu
 - 4). Mengembangkan usaha seri kerajinan bongkol kayu jati

- 5). Mengembangkan ternak sapi dan kambing
- b. Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Saradan
- Karakteristik: mempunyai wilayah dengan topografi yang rendah, dilewati akses jalan negara, memiliki jenis tanah yang subur
- Arah pengembangan:
- 1). Mengembangkan *home industri* tempe
 - 2). Mengembangkan *home industri* keripik singkong
 - 3). Mengembangkan usaha seni kerajinan bongkol kayu jati
 - 4). Mengembangkan ternak sapi dan kambing
- c. Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Lawu DS
- Karakteristik: mempunyai wilayah dengan topografi yang tinggi, hanya dilewati akses jalan kabupaten, memiliki jenis tanah yang subur
- Arah pengembangan:
- 1). Mengembangkan *home industri* keripik singkong
 - 2). Mengembangkan ternak sapi dan kambing

UPT-PUSTAK-UNDIP

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Achmad Santosa Mas. 2000. *Membentuk Pemerintah Peduli Lingkungan dan Rakyat*, ICEL. Jakarta
- Arief Arifin. 2001. *Hutan dan Kehutanan*, Kanisius. Yogyakarta
- Bambang Pamulardi. 1995. *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Beatley, T dan Manning, K. 1997. *The Ecology Place Planning for Environment, Economy, and Community*. Washington: Island Press.
- Blair, John P. 1995. *Local Economic Development Analysis and Practice*, Sage Publication Inc. California
- Blakely, E.J.1989. *Planning Local Economic Development : Theory and Practice*, Sage Publication Inc. California
- Budiharjo, Eko. 1996. *Kota Berkelanjutan*. Bandung: Penerbit Alumni
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka. Jakarta
- Glasson, John. 1977. *Pengantar Perencanaan Regional*, Edisi Terjemahan Paul Sihotang. LPFE UI. Jakarta
- Ilyas. 1995. *Kinerja*, FKM UI. Jakarta
- Jayadinata, Johara T. 1999. *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Perdesaan, Perkotaan dan Wilayah*, ITB. Bandung
- Kadariah. 1985. *Ekonomi Perencanaan*, LPFE UI. Jakarta
- Lubis Ibrahim. 1985. *Pengendalian dan Pengawasan Proyek dalam Manajemen*, Ghalia Indonesia. Jakarta
- Moechadjir, Noeng. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin. Yogyakarta
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya. Bandung
- Myrdal, Gunnar. 1957. *Economic Theory In Underdeveloped Regions*, Duckworth. London
- M. Subana dan Sudrajat. 2001. *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, Pustaka Setia. Bandung
- Nazir, Mohamad. 1998. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta

- Parr, John B. 1999. *Growth Pole Strategies in Regional Economic Planning: A Retrospective View*, Carfax Publishing
- Perlof, HS, ES Dunn, EE Lampard and RF Muth. 1960. *Regions, Resources and Economic Growth*, Resources of The Future Inc. John Hopkins Press. Baltimore
- Prawirosentono S. 2002. *Manajemen Mutu Terpadu*, Bumi Aksara. Jakarta
- Rondinelli, Denis A. 1983. *Secondary City in Developing Countries, policies for Diffusi Urbanization*, Sage Publicatioan Inc. London.
- Salim HS. 1997. *Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika. Jakarta
- Singarimbun, Masri. 1995. *Metode Penelitian Survey*, LP3ES. Jakarta
- Simon Hasanu. 1993. *Hutan Jati dan Kemakmuran*, Aditya Media. Yogyakarta
- _____. 1999. *Pengelolaan Hutan Bersama Rakyat (Cooperative Forest Management)*, Biograf Publishing. Yogyakarta
- Stoner, AF.James. 1982. *Manajement 2nd Edition*, diterjemahkan oleh Alfonsus Sirait, Manajemen, Erlangga. Jakarta
- Sumarni M. dan Soeprihanto J. 1995. *Pengantar Bisnis*, Liberty. Yogyakarta
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Administratif*, Alfabeta. Bandung

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997. tentang *Pengelolaan Lingkungan Hidup*
- Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang *Kehutanan*
- Keputusan Ketua Dewan Pengawas Perum Perhutani Nomor 136/KPTS/DIR/2001 tentang *Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat*

BUKU DATA/LAPORAN

- BPS Kabupaten Ngawi. 2003. *Kabupaten Ngawi Dalam Angka Tahun 2003*. Ngawi
- PT. Perhutani Kabupaten Ngawi. 2001. *Potensi Sumber Daya Hutan Kabupaten Ngawi*, Ngawi

TERBITAN TERBATAS

- Muschett. 1997. *Sustainable Development*, yang disampaikan dalam materi perkuliahan dalam mata kuliah "Manajemen Pembangunan Wilayah dan Kota" Catur Wulan II. MPPWK UNDIP.
- Ma'rif, Samsul. 2002. *Ekonomi Wilayah dan Kota, Ekonomika dalam Perencanaan Identifikasi Sektor Strategis*, Diktat Kuliah PWK UNDIP Semarang.